

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Sumber**

**Telp. (0231) 321197-321792 Fax. (0231) 321025**

**Website : <http://cirebonkab.go.id>**

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah patut kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Cirebon memuat informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Tahun 2017.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Cirebon ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Sumber,      Maret 2018

**Plt. BUPATI CIREBON,  
WAKIL BUPATI**

**SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.**

## **EXECUTIVE SUMMARY**

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Cirebon, sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Indikator Kinerja Utama ini juga merupakan target capaian kinerja yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, telah menetapkan Program dan Kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Mengacu pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 39 Tahun 2016, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- Misi I terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 9 indikator kinerja :
  - Capaian indikator sasaran, sebanyak 8 indikator sasaran atau 88.89 % kategori baik sekali (melampaui target), 1 indikator sasaran atau 11.11% kategori baik (mencapai target).
- Misi II memiliki 1 tujuan 5 sasaran dan 25 indikator kinerja:
  - Capaian indikator sasaran, sebanyak 4 indikator sasaran atau 16% kategori baik sekali (mencapai target), 17 indikator sasaran atau 68% kategori baik (mencapai target) dan 1 indikator sasaran atau 4% kategori cukup (tidak mencapai target), 1 indikator sasaran atau 4% kategori kurang (tidak mencapai target). 2 indikator

sasaran atau 8% kewenangan pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

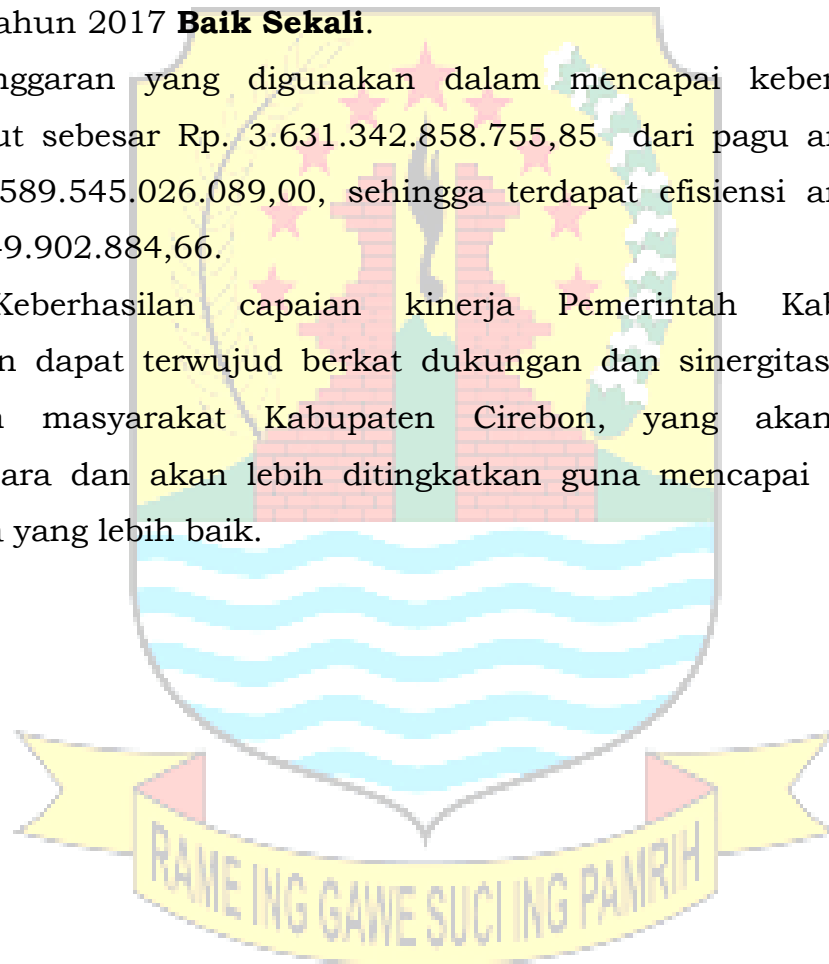
- Misi III terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 17 indikator kinerja :
  - Capaian indikator sasaran, sebanyak 11 indikator sasaran atau 64,71 % kategori baik sekali (melampaui target), 2 indikator sasaran atau 11,76 % kategori baik (mencapai target) dan 2 indikator sasaran atau 11,76% dan 2 indikator sasaran atau 11.76% kategori kurang (tidak mencapai target).
- Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator kinerja :
  - Capaian indikator sasaran, sebanyak 3 indikator sasaran atau 100 % kategori baik sekali (melampaui target).
- Misi V terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 10 indikator kinerja :
  - Capaian indikator sasaran, sebanyak 5 indikator sasaran atau 50% kategori baik sekali (melampaui target), 4 indikator sasaran atau 40% kategori baik dan (mencapai target) dan 1 indikator sasaran atau 10% katagori kurang (tidak mencapai target).
- Misi VI terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 9 indikator kinerja :
  - Capaian indikator sasaran, sebanyak 4 indikator sasaran atau 44.45% kategori baik sekali (melampaui target), 2 indikator sasaran atau 22.22% kategori baik dan (mencapai target) dan 1 indikator sasaran atau 11.11% katagori cukup (tidak mencapai target), 2 indikator sasaran atau 22.22% katagori kurang (tidak mencapai target).

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, Hasil analisis

pencapaian indikator sasaran terhadap 15 sasaran yang mencakup 73 indikator sasaran, diketahui bahwa 35 indikator sasaran atau 49,3% Baik Sekali, 26 indikator sasaran atau 36,62 % Baik, 4 indikator sasaran atau 5,63% Cukup, 6 indikator sasaran atau 8,45% kurang dan 2 indikator sasaran kewenangannya pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **110,99%** atau bermakna **Baik Sekali**. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2017 **Baik Sekali**.

Anggaran yang digunakan dalam mencapai keberhasilan tersebut sebesar Rp. 3.631.342.858.755,85 dari pagu anggaran Rp. 3.589.545.026.089,00, sehingga terdapat efisiensi anggaran 257.149.902.884,66.

Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat terwujud berkat dukungan dan sinergitas semua elemen masyarakat Kabupaten Cirebon, yang akan terus dipelihara dan akan lebih ditingkatkan guna mencapai sasaran kinerja yang lebih baik.



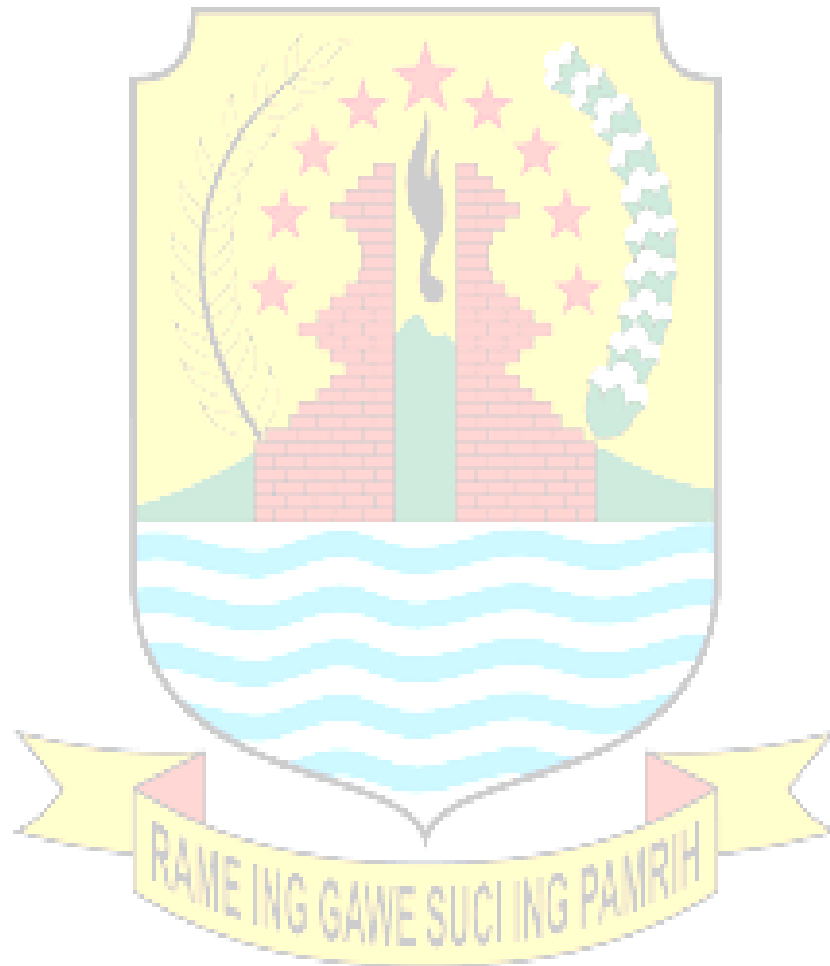


## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	I-1
B. Maksud dan Tujuan .....	I-3
C. Dasar Hukum .....	I-3
D. Gambaran Umum Daerah.....	I-5
E. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh .....	I-20
F. Isu Strategis Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2017.....	I-20
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Perencanaan Strategis .....	II-1
B. Indikator Kinerja Utama .....	II-5
C. Rencana Kerja Tahunan .....	II-9
D. Perjanjian Kinerja 2017 .....	II-10
E. Rencana Aksi Daerah .....	II-17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Akuntabilitas Kinerja.....	III-2
1. Pengukuran Kinerja .....	III-2
2. Perbandingan Capaian Kinerja Sampai dengan Akhir Periode RPJMD .....	III-39
B. Akuntabilitas Keuangan .....	III-45
<b>BAB IV KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan .....	IV-1
B. Rencana Tindak Lanjut .....	IV-2

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. Peta Adminitrasi Kabupaten Cirebon ..... I.6



## DAFTAR TABEL

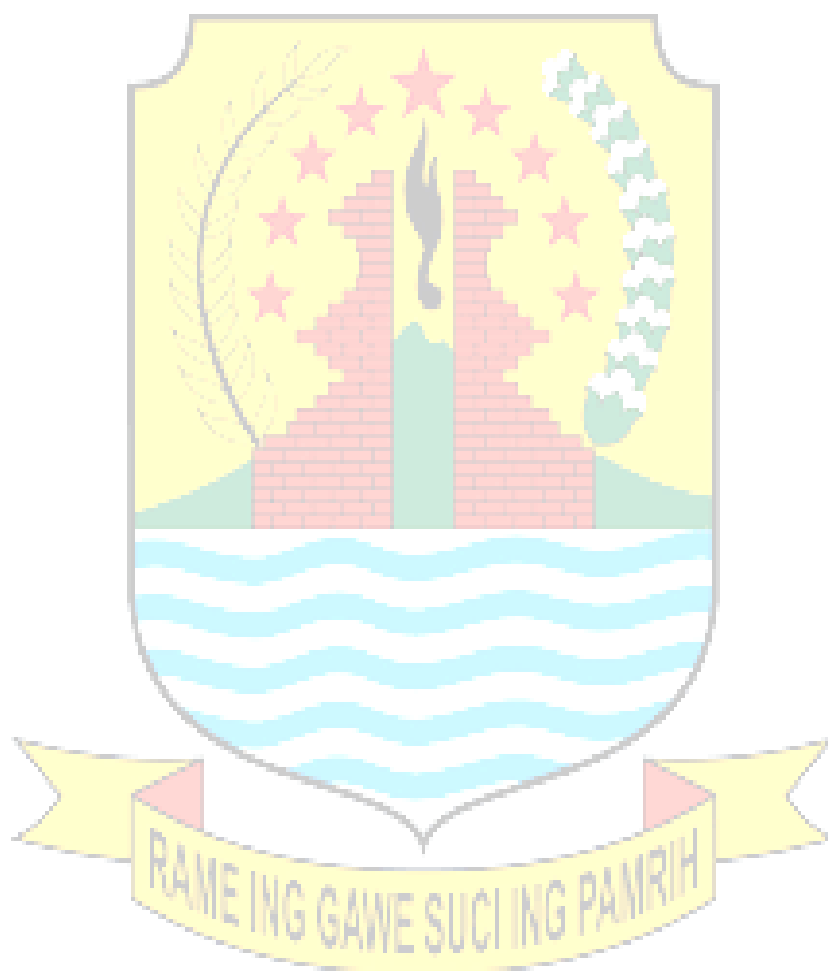
Tabel 1.1. Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Cirebon.....	I.7
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon.....	I.9
Tabel 1.3. Kepadatan Penduduk Kabupaten Cirebon .....	I.11
Tabel 1.4. Penduduk Kabupaten Cirebon Menurut Struktur Usia Tahun 2017 .....	I.12
Tabel 1.5. Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2017 .....	I.14
Tabel 1.6. PDRB Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 .....	I.15
Tabel 1.7. PDRB Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-20116 .....	I.16
Tabel 1.8. SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.....	I.17
Tabel 1.9. Kecamatan di Kabupaten Cirebon .....	I.18
Tabel 1.10. Kelurahan di Kabupaten Cirebon .....	I.19
Tabel 1.11. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin .....	I.20
Tabel 1.12. Jumlah ASN Berdasarkan Ruang Golongan .....	I.21
Tabel 1.13. Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan.....	I.22
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran.....	II.3
Tabel 2.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran .....	II.4
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Pemkab Cirebon .....	II.6
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja 2017 Pemkab Cirebon .....	II.11
Tabel 3.1. Katagori Capaian Kinerja .....	III.3
Tabel 3.2. Pencapaian Indikator Sasaran/IKU .....	III.4
Tabel 3.3. Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Aktifitas Kehidupan Beragama, Keshalehan Sosial Masyarakat dan Toleransi antar dan Intern Umat Beragama .....	III.6
Tabel 3.4. Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Pendidikan Untuk Semua.....	III.9



Tabel 3.5. Target dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.....	III.13
Tabel 3.6. Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya, Berketerampilan dan Berjiwa Kewirausahaan .....	III.15
Tabel 3.7. Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Kabupaten Cirebon Sebagai Daerah Wisata Berbasis Budaya .....	III.18
Tabel 3.8. Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Kemandirian Peningkatan Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga.....	III.19
Tabel 3.9. Target dan Capaian Indikator Sasaran Peningkatan Konektifitas Antar Wilayah .....	III.20
Tabel 3.10. Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Pembangunan Prasarana Wilayah yang Memadai .....	III.22
Tabel 3.11. Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Cirebon yang Bersih, Asri dan Lestari.....	III.25
Tabel 3.12. Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat .....	III.27
Tabel 3.13. Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kondisi Perekonomian Masyarakat.....	III.28
Tabel 3.14. Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang lebih Berkualitas	III.30
Tabel 3.15. Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima.....	III.32
Tabel 3.16. Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah .....	III.34
Tabel 3.17. Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih .....	III.36
Tabel 3.18. Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2017..	III.46
Tabel 3.19. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017..	III.46
Tabel 3.20. Target dan Realisasi PAD Tahun 2017.....	III.47
Tabel 3.21. Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2017...	III.47

Tabel 3.22. Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah  
Tahun 2017 ..... III.48

Tabel 3.23. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017.... III.4



# 1

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Daerah merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan gambaran akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah kepada publik. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja. Secara operasional, penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja pemerintah.

Dokumen Laporan Kinerja daerah memiliki peran strategis dalam mekanisme pelaporan kinerja instansi pemerintah daerah. Dokumen ini menjadi bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, dokumen ini menjadi bahan evaluasi pencapaian kinerja. Di era transparansi dan tuntutan publik terhadap kinerja instansi pemerintah, keberadaan dokumen Laporan Kinerja menjadi bagian dari kerangka pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan demikian, hal yang terpenting dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah mekanisme pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Di era desentralisasi saat ini, pemerintah daerah mendapatkan ruang kewenangan untuk mengelola berbagai sumber daya yang tersedia.

Dalam bingkai sistem pemerintahan nasional, Pemerintah Kabupaten Cirebon mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan berbagai kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Merujuk pada berbagai regulasi diatas, Pemerintah Kabupaten Cirebon harus mampu mempertanggungjawabkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan kongkuren yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan sosial dan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 18 urusan serta 8 urusan pilihan pemerintahan kepada publik sebagaimana dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas eksternal dan internal sesuai dengan dinamika pembangunan dan tuntutan masyarakat. Berbekal berbagai target kinerja sebagaimana telah diformulasikan dalam indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah, Pemerintah Kabupaten Cirebon bertekad untuk menyampaikan informasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada publik secara baik.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini Pemerintah Kabupaten Cirebon akan memberikan gambaran dan menjelaskan secara utuh dan komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Cirebon dimaksudkan untuk menjadi instrumen evaluasi dan umpan balik perbaikan terhadap berbagai capaian kinerja.

### **2. Tujuan**

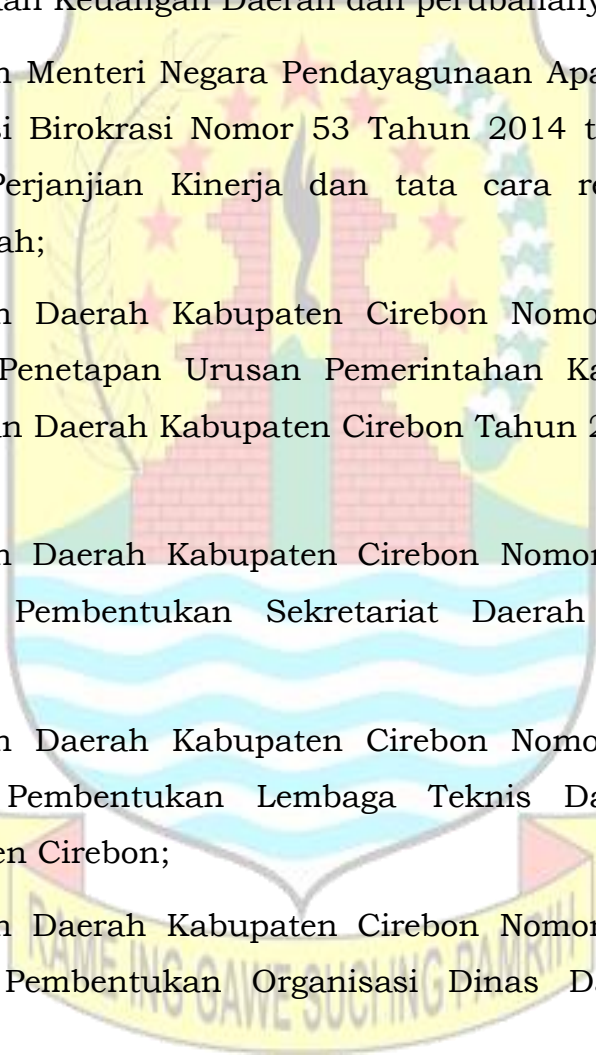
Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Cirebon bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas kinerja terukur yang telah dan seharusnya dicapai, dan menyediakan media tolok ukur capaian kinerja dalam upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

## **C. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Cirebon, yaitu:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 
- f. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;
  - i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Ketentuan Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara reviu atas kinerja Pemerintah;
  - j. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
  - k. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
  - l. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lemtekda) Kabupaten Cirebon;
  - m. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
  - n. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019;
  - o. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Tahun Anggaran Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 5 Seri A.2); dan

- p. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 82 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 82 Seri A.3).

## **D. Gambaran Umum Daerah**

### **1. Kondisi Fisik**

Secara geografis, wilayah Kabupaten Cirebon berada pada posisi 108°19'30"-108°50'03" Bujur Timur (BT) dan 6°30'58"- 7°00'24" Lintang Selatan (LS).

Secara administratif, Kabupaten Cirebon memiliki wilayah seluas 990,36 km<sup>2</sup> yang meliputi 40 kecamatan, terbagi menjadi 412 desa dan 12 kelurahan, 2.700 Rukun Warga (RW), dan 9.377 Rukun Tetangga (RT). Adapun batas-batas administratif Kabupaten Cirebon adalah :

1. Sebelah Utara : Kab. Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa
2. Sebelah Selatan: Kabupaten Kuningan
3. Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka
4. Sebelah Timur : Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes  
(Provinsi Jawa Tengah)

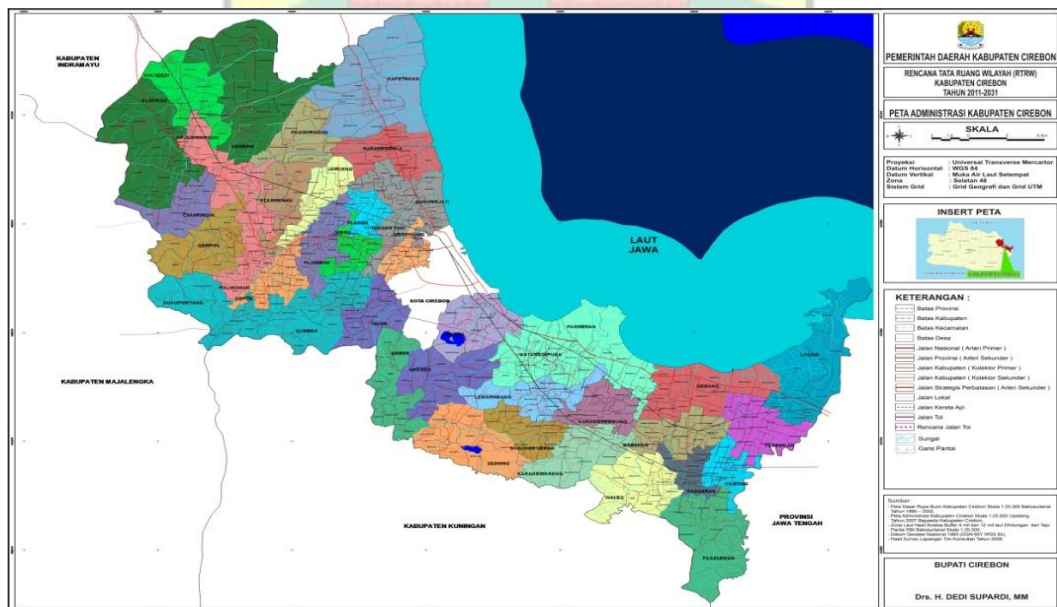
Secara geo-ekonomi, Kabupaten Cirebon memiliki posisi yang strategis (*geo-strategic*) dengan mencermati hal-hal sebagai berikut.

- a) Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Hal ini merupakan potensi bagi pengembangan Kabupaten Cirebon untuk menarik investor ke wilayah ini;
- b) Kabupaten Cirebon berada di pantai Utara Jawa yang merupakan jalur utama distribusi barang dan jasa, dan mobilisasi orang tingkat regional dan nasional;

- c) Kabupaten Cirebon memiliki akses jalur transportasi utama wilayah Pantai Utara Jawa yaitu ruas jalan bebas hambatan (jalan tol) (ruas jalan tol Palimanan-Kanci/Palikanci, dan ruas jalan tol Kanci-Pejagan). Selain itu, Kabupaten Cirebon dilalui oleh jalur kereta api yakni jalur kereta api Cirebon-Jakarta, jalur kereta api Cirebon-Bandung, jalur kereta api lintas Utara Jawa (Cirebon-Semarang-Surabaya), dan jalur kereta api lintas Selatan Jawa (Cirebon-Yogyakarta-Surabaya);
- d) Kabupaten Cirebon menjadi lokasi sumber energi jalur transmisi Sumatera-Jawa-Bali yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Electric Power (CEP) di Kecamatan Astanajapura;
- e) Kabupaten Cirebon menjadi bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) wilayah Cirebon sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

**Gambar 1.1.**

**Peta Administrasi Kabupaten Cirebon**



Secara topografis, wilayah Kabupaten Cirebon memiliki ketinggian antara 0-130 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah kecamatan yang terletak sepanjang jalur Pantura termasuk pada dataran rendah yang memiliki ketinggian antara 0-10 mdpl meliputi 10 kecamatan yaitu Kecamatan Kapetakan, Suranenggala, Gunungjati, Mundu, Astanajapura,

Pangenan, Gebang, Losari, dan Pabedilan. Sementara, 30 kecamatan lainnya berada pada ketinggian antara 11-30 mdpl. Adapun pembagian wilayah berdasarkan ketinggian dibedakan sebagai berikut.

- 1) Wilayah berketinggian antara 0-25 mdpl seluas 64.636 Ha atau 65,31% dari luas Kabupaten Cirebon;
- 2) Wilayah berketinggian antara 25-50 mdpl seluas 1.525,20 Ha atau 10,65% dari luas Kabupaten Cirebon;
- 3) Wilayah berketinggian antara 50-100 mdpl seluas 10.196,40 Ha atau 10,30% dari luas Kabupaten Cirebon;
- 4) Wilayah berketinggian antara 100-200 mdpl seluas 61.150 Ha atau 6,21% dari luas Kabupaten Cirebon;
- 5) Wilayah berketinggian antara 200-300 mdpl seluas 4.275,55 Ha atau 4,32% dari luas Kabupaten Cirebon;
- 6) Wilayah berketinggian 300 mdpl seluas 2.180,20 Ha atau 2,20% dari luas Kabupaten Cirebon;

Berdasarkan konturnya, Kabupaten Cirebon memiliki kemiringan antara 0-40%. Untuk lebih jelasnya, tingkat kemiringan wilayah dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1.**

**Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Cirebon**

No	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0 – 8 %	88.075, 71	88,93
2	>8 – 15 %	2.598, 48	2,62
3	>15 – 25 %	5.152, 05	5,2
4	>25 – 40 %	1.853, 52	1,87
5	>40 %	1356, 24	1,37
<b>Jumlah</b>		<b>99.036</b>	<b>100</b>

*Sumber: Cirebon Dalam Angka, Tahun 2016*

Secara geologis, wilayah Kabupaten Cirebon memiliki delapan jenis struktur tanah, yaitu Aluvial (Qa) seluas 52.224 ha (52,76%), hasil gunung api muda yang tak terurai (Qyu) seluas 33.740 ha (34,10%), breksi kompleks Kromong (Qvk) seluas 1.110 ha (1,12%), batu gamping kompleks Kromong (MI) seluas 202,60 ha, formasi Kaliwungu (Pk) seluas



8.964,20 ha (9,06%), formasi Cijulang (Tpel) seluas 825 ha (0,83%), formasi Kalibiuk (Tpb) seluas 1.345 ha (1,36%), dan hasil gunung api tua yang tak terurai (Qvu) seluas 560 ha (0,63%). Berdasarkan jenis tanahnya, wilayah Kabupaten Cirebon memiliki sembilan jenis tanah yaitu alluvial, regosol, litosol, grumosol, mediteran, latasol, podsolik, regosol, dan glei humus. Secara umum, jenis-jenis tanah tersebut sesuai untuk kegiatan pertanian (sawah dan palawija), dan kegiatan perikanan.

Secara hidrologis, wilayah Kabupaten Cirebon meliputi air tanah dan air permukaan, dimana jumlah air permukaan 1.418,83 juta meter kubik (m<sup>3</sup>). Sebaran air tanah di wilayah Kabupaten Cirebon diklasifikasikan menjadi air tanah asin, air tanah dangkal, air tanah sedang, dan air tanah langka. Adapun berdasarkan jenis, air tanah dibedakan menjadi air tanah dangkal dan air tanah dalam. Sementara, jenis air permukaan meliputi sungai, danau/situ dan mata air. Volume debit air sebagaimana yang tertuang diatas pemanfaatannya meliputi untuk kebutuhan-kebutuhan domestik 6,5 juta m<sup>3</sup>, industri 5,184 juta m<sup>3</sup>, irigasi 1.046 juta m<sup>3</sup>, budi daya perikanan 81,3 juta m<sup>3</sup>.

Secara klimatologis, berdasarkan klasifikasi *Schmidt* dan *Ferguson*, Kabupaten Cirebon beriklim tipe C dan D. Daerah dengan kategori ini mempunyai ciri iklim tropis, suhu antara 24°C sampai 36°C dengan suhu rata-rata 28°C. Kabupaten Cirebon memiliki curah hujan antara 0-3.317 milimeter (mm) dengan rata-rata jumlah curah hujan sebanyak 1.265,15 mm. Curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Dukupuntang (3.317 mm) dan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Suranenggala (136 mm).

Secara kewilayahan, infrastruktur wilayah memiliki peran strategis dalam peningkatan struktur perwilayahan, mendukung distribusi barang, jasa dan mobilitas orang. Untuk mendukung peran tersebut, infrastruktur memerlukan pengembangan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan yang diarahkan pada lima Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Cirebon yaitu PKL

Sumber, PKL Ciledug, PKL Lemahabang, PKL Palimanan dan PKL Arjawinangun.

Infrastruktur wilayah meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, irigasi, listrik, telepon dan sarana lain seperti sarana pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Kebutuhan infrastruktur wilayah tersebut terkait dengan fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, dimana dengan kondisi infrastruktur perbatasan yang baik maka dapat menjadi faktor penarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Cirebon.

## 2. Kondisi Demografis

Kabupaten Cirebon memiliki jumlah penduduk mencapai 2.100.299 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Sumber dengan jumlah penduduk sebanyak 88.701 jiwa, sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Pesaleman dengan jumlah penduduk sebanyak 26.214 orang. Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon menunjukkan penurunan dengan rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tahun 2016-2017 sebesar 0,94% per tahun. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2.**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon**  
**per Kecamatan Tahun 2013-2017**

No	Kecamatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*)
1.	Waled	58.158	59.771	57 885	58.428	52.551
2.	Pasaleman	28.217	28.610	27 465	28.501	26.214
3.	Ciledug	45.644	45.735	46 454	45.508	44.198
4.	Pabuaran	37.280	37.834	38 218	35.919	34.775
5.	Losari	63.266	64.041	61 034	60.687	57.250
6.	Pabedilan	60.970	60.970	56 404	61.314	51.685
7.	Babakan	76.699	73.055	69 154	72.461	64.589
8.	Gebang	64.357	65.363	63 912	65.171	60.899
9.	Karangsembung	37.786	37.538	38 105	37.962	35.375
10.	Karangwareng	31.044	30.607	29 267	30.849	27.563
11.	Lemahabang	54.979	54.678	57 114	55.046	51.616
12.	Susukan Lebak	40.804	40.804	41 026	41.719	39.176

No	Kecamatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*)
13.	Sedong	43.760	44.465	43 397	44.626	39.118
14.	Astanajapura	79.468	79.732	84 297	79.573	73.589
15.	Pangenan	44.897	45.065	49 529	45.090	42.664
16.	Mundu	73.499	74.352	83 766	73.715	70.523
17.	Beber	41.498	43.595	40 108	41.559	40.414
18.	Greged	57.706	57.501	57 609	61.211	53.234
19.	Talun	70.219	71.019	72 709	69.409	64.574
20.	Sumber	86.062	86.605	91 181	88.255	88.701
21.	Dukupuntang	63.145	64.793	68 483	64.887	61.629
22.	Palimanan	62.873	63.420	61 894	62.282	59.783
23.	Plumbon	78.303	76.605	82 186	74.999	75.229
24.	Depok	65.533	66.734	62 992	64.474	61.078
25.	Weru	63.927	64.451	71 749	63.900	66.597
26.	Plered	56.196	56.346	57 561	51.115	51.197
27.	Tengah Tani	40.686	41.553	45 495	39.021	41.529
28.	Kedawung	66.916	67.572	70 204	56.462	57.060
29.	Gunung Jati	85.210	85.537	88 035	75.737	76.353
30.	Kapetakan	59.362	62.212	56 805	57.882	52.412
31.	Suranenggala	47.197	47.416	45 318	44.422	41.257
32.	Klangenan	52.119	50.207	56 541	54.382	49.620
33.	Jamblang	41.636	40.636	38 779	38.801	37.255
34.	Arjawinangun	70.170	71.759	70 151	63.055	65.703
35.	Panguragan	51.356	52.313	47 305	47.215	41.091
36.	Ciwaringin	40.711	41.200	43 533	34.281	35.152
37.	Gempol	47.704	47.993	48 506	46.795	43.638
38.	Susukan	75.640	77.811	68 862	69.779	60.715
39.	Gegesik	81.428	81.822	77 099	77.115	66.101
40.	Kaliwedi	43.086	44.882	39 675	42.394	38.192
<b>Jumlah</b>		2.263.978	2.289.511	2.306.602	2.245.895	2.100.299

Sumber : Statistik Daerah Kecamatan 2013-2014, BPS, Survei IPM Kecamatan, BPS Tahun 2015, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun (DPPKBPPPA tahun 2016), Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2017 Disdukcapil

Rata-rata kepadatan penduduk tahun 2017 di Kabupaten Cirebon sebesar 2.121 jiwa/km<sup>2</sup> artinya dalam 1 km persegi dihuni oleh 2.121 orang. Kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Weru sebesar 7.247 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Pasaleman sebesar 817 jiwa/km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.3.



**Tabel. 1.3**  
**Kepadatan Penduduk Kabupaten Cirebon Per Kecamatan**  
**Tahun 2013–2017 (jiwa/km<sup>2</sup>)**

No	Kecamatan	Luas Wilayah Km <sup>2</sup>	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Waled	28,46	2.043	2.100	2.034	2.053	1.847
2.	Pasaleman	32,11	879	891	855	888	817
3.	Ciledug	13,25	3.445	3.452	3.506	3.435	3.336
4.	Pabuaran	8,95	4.165	4.227	4.270	4.013	3.886
5.	Losari	39,07	1.619	1.639	1.562	1.553	1.466
6.	Pabedilan	24,08	2.532	2.532	2.342	2.546	2.147
7.	Babakan	21,93	3.497	3.331	3.153	3.304	2.946
8.	Gebang	31,68	2.031	2.063	2.017	2.057	1.923
9.	Karangsembung	15,14	2.496	2.479	2.517	2.507	2.337
10.	Karangwareng	23,12	1.343	1.324	1.266	1.334	1.193
11.	Lemahabang	21,49	2.558	2.544	2.658	2.561	2.402
12.	Susukan Lebak	18,74	2.177	2.177	2.189	2.226	2.091
13.	Sedong	31,02	1.411	1.433	1.399	1.439	1.262
14.	Astanajapura	25,47	3.120	3.130	3.310	3.124	2.890
15.	Pangenan	30,54	1.470	1.476	1.622	1.476	1.397
16.	Mundu	25,58	2.873	2.907	3.275	2.882	2.757
17.	Beber	23,25	1.785	1.875	1.725	1.787	1.739
18.	Greged	29,92	1.929	1.922	1.925	2.046	1.780
19.	Talun	25,65	2.738	2.769	2.835	2.706	3.045
20.	Sumber	36,40	2.364	2.379	2.505	2.425	3.459
21.	Dukupuntang	17,18	3.675	3.771	3.986	3.777	1.694
22.	Palimanan	18,19	3.456	3.487	3.403	3.424	3.480
23.	Plumbon	15,55	5.036	4.926	5.285	4.823	4.136
24.	Depok	9,19	7.131	7.262	6.854	7.016	3.928
25.	Weru	11,34	5.637	5.684	6.327	5.635	7.247
26.	Plered	8,97	6.265	6.282	6.417	5.698	4.515
27.	Tengah Tani	9,58	4.247	4.337	4.749	4.073	4.630
28.	Kedawung	60,20	1.112	1.122	1.166	938	5.957
29.	Gunung Jati	22,98	3.708	3.722	3.831	3.296	3.716
30.	Kapetakan	20,57	2.886	3.024	2.762	2.814	871
31.	Suranenggala	17,76	2.657	2.670	2.552	2.501	1.796
32.	Klangenan	24,11	2.162	2.082	2.345	2.256	2.413
33.	Jamblang	20,31	2.050	2.001	1.909	1.910	2.098
34.	Arjawinangun	17,79	3.944	4.034	3.943	3.544	2.726
35.	Panguragan	30,73	1.671	1.702	1.539	1.536	2.024
36.	Ciwaringin	50,10	813	822	869	684	1.976
37.	Gempol	60,38	790	795	803	775	1.420

No	Kecamatan	Luas Wilayah Km <sup>2</sup>	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )				
			2013	2014	2015	2016	2017
38.	Susukan	27,82	2.719	2.797	2.475	2.508	1.212
39.	Gegesik	21,21	3.839	3.858	3.635	3.636	1.095
40.	Kaliwedi	20,55	2.097	2.184	1.931	2.063	1.373
<b>Jumlah</b>		<b>990,36</b>	<b>2.809</b>	<b>2.830</b>	<b>2.844</b>	<b>2.732</b>	<b>2.121</b>

Sumber : Statistik Daerah Kecamatan 2013-2014, BPS, \*) Survei IPM Kecamatan BPS Tahun 2015, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun (DPPKBPPPA tahun 2016), Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2017 Disdukcapil.

Penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2015 sekitar 2.126.179 jiwa yang terdiri dari 1.089.689 jiwa laki-laki (51,25%) dan 1.036.490 jiwa perempuan (48,75%). Sex rasionya adalah sekitar 105 yang berarti terdapat sekitar 105 orang laki-laki diantara 100 perempuan. Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 dan 2017 relatif menurun dibanding 2015. Perbandingan sex ratio pada tahun 2016 sekitar 105 dan tahun 2017 dengan jumlah penduduk Kabupaten Cirebon sekitar 2.100.299 jiwa yang terdiri dari 1.081.257 jiwa laki-laki (51,5%) dan 1.019.042 jiwa perempuan (48,5%), sex rasionya adalah sekitar 106% yang berarti terdapat sekitar 106 orang laki-laki diantara 100 perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Diduga salah satu penyebabnya adalah karena penduduk perempuan di daerah ini lebih banyak keluar daerah untuk sekolah, bekerja dan mencari pekerjaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.4

Tabel. 1.4.  
Penduduk Kabupaten Cirebon menurut Struktur Usia Tahun 2017

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 - 4	72.850	67.415	140.265
2.	5 - 9	85.652	79.591	165.243
3.	10 - 14	85.839	79.995	165.834
4.	15 - 19	90.475	86.844	177.319

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
5.	20 - 24	99.841	92.597	192.438
6.	25 - 29	98.481	86.159	184.640
7.	30 - 34	96.029	87.964	183.993
8.	35 - 39	95.386	91.027	186.413
9.	40 - 44	84.817	82.760	167.577
10.	45 - 49	74.984	71.460	146.444
11.	50 - 54	57.213	57.578	114.791
12.	55 - 59	48.115	47.635	95.750
13.	60 - 64	36.512	34.644	71.156
14.	65 - 69	25.845	23.227	49.072
15.	70 - 74	14.122	14543	28.665
16.	>75	15.096	15.603	30.699
<b>Jumlah</b>		<b>1.081.257</b>	<b>1.019.042</b>	<b>2.100.299</b>

Sumber : Data Disdukcapil Tahun 2017

Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2000, 2010 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Cirebon pada kurun waktu 2000-2010 adalah 1,40 persen per tahun. Sementara pada tahun 2010-2016 pertumbuhan penduduknya adalah sekitar 0,79 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut, oleh banyak pihak dianggap sebagai suatu hal yang merisaukan apalagi bila tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tidak merata juga berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial, terutama bila tidak diimbangi dengan penambahan lapangan kerja. Dengan kata lain apabila pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan penduduk akan menjadi masalah, terlebih bila terdapat



kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk yang positif akan memperluas lahan hunian dan mengurangi lahan usaha bagi penduduk itu sendiri.

Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Cirebon relatif menurun dari tahun sebelumnya menjadi 2.100.299 jiwa, dengan rincian struktur usia produktif dan tidak produktif terdiri dari penduduk usia muda (0-14 tahun) di Kabupaten Cirebon adalah sekitar 471.342 orang, penduduk usia produktif (15-64 tahun) sekitar 1.520.521 orang, dan penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) sekitar 108.436 orang. Angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2017 adalah sebesar 38,13 artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban ekonomi sekitar 38 orang usia tidak produktif

TPAK di Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 mencapai 58,45 %, yang berarti bahwa pada setiap 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sekitar 58 orang di antaranya adalah termasuk angkatan kerja. TPAK tahun 2017 ini turun bila dibandingkan tahun 2016 yakni sekitar 58,21 persen. Semakin tinggi angka TPAK maka semakin besar penyediaan tenaga kerja, dan secara otomatis kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan perekonomian semakin cepat, karena berkaitan dengan seberapa besar produktivitas yang dihasilkan oleh para pekerja tersebut. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sebagai catatan bahwa persentase angkatan kerja yang ditampilkan tidak lain adalah TPAK itu sendiri. Bisa dilihat kondisi ketenagakerjaan pada Tabel. 1.5.

**Tabel. 1.5**

**Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon  
Tahun 2011 - 2017**

Uraian	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	58,04	59,66	59,20	59,55	58,51	58,45	58,21

Uraian	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Penangguran Terbuka (%)	11,51	15,92	14,88	13,32	10,51	9,21	8,80
Bekerja (jiwa)	766.335	754.456	763.934	792.245	813.824	832.719	885.085

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Cirebon, Tahun 2016  
Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2017

### 3. Kondisi Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dapat diukur dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Dari perubahan PDRB tersebut, terjadi peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 9,73% dari angka 35,752,663.3 juta rupiah tahun 2015 menjadi 38,882,897.2 juta rupiah pada tahun 2016.

Selain itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang juga merupakan barometer pertumbuhan ekonomi secara riil pada Tahun 2014 mencapai 27,596,254.8 juta rupiah atau meningkat sebesar 4,90% dari Tahun 2015 sebesar 29,148,228.9 juta rupiah.

Untuk lebih jelasnya mengenai PDRB Kabupaten Cirebon ADHK dan PDRB ADHB dapat dilihat pada Tabel. 1.6 dan Tabel. 1.7.

**Tabel. 1.6**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (Dalam Juta Rupiah)**

PDRB Pengeluaran (Seri 2010)	[Seri 2010] PDRB Seri 2010 menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	Harga Berlaku				
	2012	2013	2014	2015	2016
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	23,839,721.9	26,125,037.2	29,000,694.9	32,186,521.0	35,534,084.3
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	488,589.5	618,317.0	668,772.3	656,703.5	701,271.4
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,055,442.2	2,118,165.6	2,277,848.8	2,691,142.3	2,917,188.7
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	9,256,396.1	10,361,593.3	11,626,865.3	12,700,113.5	13,220,644.2

5. Perubahan Inventori	1,502,135.3	1,384,888.4	1,735,693.5	1,755,517.1	1,665,146.1
6. Net (Ekspor-Impor)	(10,844,458.7)	(11,197,279.9)	(12,730,823.8)	(14,237,334.0)	(15,155,437.4)
<b>7. PRODUK DOMESTIK BRUTO</b>	<b>26,297,826.4</b>	<b>29,410,721.6</b>	<b>32,579,051.0</b>	<b>35,752,663.3</b>	<b>38,882,897.2</b>

**Tabel. 1.7**

**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012 – 2016 (Dalam Juta Rupiah)**

PDRB Pengeluaran (Seri 2010)	[Seri 2010] PDRB Seri 2010 menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Harga Konstan 2010				
	2012	2013	2014	2015	2016
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	21,518,432.6	22,148,222.9	23,182,605.1	24,360,803.3	25,693,497.2
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	463,123.4	536,111.7	554,712.5	523,007.1	551,247.1
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,789,065.5	1,731,633.9	1,789,490.1	1,915,547.7	2,020,249.2
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	8,312,992.6	8,800,459.5	9,090,583.9	9,418,577.5	9,700,862.0
5. Perubahan Inventori	1,415,754.7	1,255,701.4	1,210,627.5	1,082,293.0	1,125,227.9
6. Net (Ekspor-Impor)	(9,641,619.2)	(9,429,874.3)	(9,515,026.9)	(9,703,973.9)	(9,942,854.5)
<b>7. PRODUK DOMESTIK BRUTO</b>	<b>23,857,749.6</b>	<b>25,042,254.9</b>	<b>26,312,992.3</b>	<b>27,596,254.8</b>	<b>29,148,228.9</b>

**4. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan melegisalisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Dengan merujuk pada kedua peraturan di atas Pemerintah Kabupaten Cirebon membentuk organisasi perangkat daerah dengan komposisi 2 Sekretariat, 1 Inspektorat 22 Dinas, 6 Badan dan 1 Kantor, dan 2 Rumah Sakit Daerah dengan rincian sebagai berikut



**Tabel 1.8****SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon**

No.	Nama dinas
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
9.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
10.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
11.	Dinas Kelautan dan Perikanan
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	Dinas Kesehatan
14.	Dinas Ketahanan Pangan
15.	Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum/ Satpol PP
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18.	Dinas Lingkungan Hidup
19.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20.	Dinas Pemadam Kebakaran
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23.	Dinas Pendidikan
24.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
26.	Dinas Perhubungan

27.	Dinas Pertanian
28.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
29.	Dinas Sosial
30.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
31.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waled
32.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun

Selain SKPD di atas, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga membentuk Kecamatan dengan jumlah 40 Kecamatan dan 12 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.9**  
**Kecamatan di Kabupaten Cirebon**

No.	Nama Kecamatan
1	Kecamatan waled
2	Kecamatan ciledug
3	Kecamatan losari
4	Kecamatan pabedilan
5	Kecamatan babakan
6	Kecamatan gebang
7	Kecamatan karangsembung
8	Kecamatan lemahabang
9	Kecamatan susukanlebak
10	Kecamatan sedong
11	Kecamatan astanajapura
12	Kecamatan pangenan
13	Kecamatan mundu
14	Kecamatan beber
15	Kecamatan talun
16	Kecamatan sumber
17	Kecamatan dukupuntang

No.	Nama Kecamatan
18	Kecamatan palimanan
19	Kecamatan plumbon
20	Kecamatan depok
21	Kecamatan weru
22	Kecamatan kedawung
23	Kecamatan gunungjati
24	Kecamatan kapetakan
25	Kecamatan klangenan
26	Kecamatan arjawinangun
27	Kecamatan panguragan
28	Kecamatan ciwaringin
29	Kecamatan susukan
30	Kecamatan gesesik
31	Kecamatan kaliwedi
32	Kecamatan karangwareng
33	Kecamatan tengah tani
34	Kecamatan gempol
35	Kecamatan pasaleman
36	Kecamatan plered
37	Kecamatan pabuaran
38	Kecamatan greged
39	Kecamatan jamblang
40	Kecamatan suranenggala

**Tabel 1.10**

### **Kelurahan di Kabupaten Cirebon**

No.	Nama Kelurahan
1	Kelurahan Sumber
2	Kelurahan Perbutulan
3	Kelurahan Cempaka

No.	Nama Kelurahan
4	Kelurahan Kenanga
5	Kelurahan Kemantren
6	Kelurahan Pamokolan
7	Kelurahan Sendang
8	Kelurahan Kaliwadas
9	Kelurahan Pasalakan
10	Kelurahan Pejambon
11	Kelurahan Babakan
12	Kelurahan Gegunung

#### 1.4. Kondisi Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon berjumlah 15.651 orang, rincian jumlah dan komposisi ASN di Lingkungan Kabupaten Cirebon dalam beberapa Tabel di bawah ini :

Komposisi jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Cirebon dari jenis kelamin, komposisi jumlah berdasarkan jenis kelamin mayoritas berjenis kelamin laki-laki sebesar 52,38% dibanding dengan jumlah perempuan yang sebesar 47,62%. Sebagaimana digambarkan dalam table 2.6 berikut ini.

**Tabel 1.11**

#### Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	8.198
2	Perempuan	7.453
	<b>Total</b>	<b>15.651</b>

Sementara berdasarkan golongan dan ruang ASN, terbanyak dari golongan III dan kemudian golongan IV, besarnya jumlah golongan III dan Golongan IV ini dikarenakan, jumlah dari fungsional guru dan tenaga



medis lebih besar dari jumlah tenaga teknis lainnya dan pejabat dan staf struktural, berikut ini table yang menggambarkan ASN Kabupaten Cirebon dari ruang dan golongan.

**Tabel 1.12**

**Jumlah ASN Berdasarkan Ruang Golongan**

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IA	7
	Golongan IB	6
	Golongan IC	101
	Golongan ID	11
	<b>Total Golongan I</b>	<b>125</b>
2.	Golongan IIA	284
	Golongan IIB	488
	Golongan IIC	857
	Golongan IID	357
	<b>Total Golongan II</b>	<b>1.986</b>
3.	Golongan IIIA	2331
	Golongan IIIB	1481
	Golongan IIIC	1752
	Golongan IIID	2649
	<b>Total Golongan III</b>	<b>8.213</b>
4.	Golongan IVA	3.697
	Golongan IVB	1.518
	Golongan IVC	110
	Golongan IVD	2
	<b>Total Golongan IV</b>	<b>5.327</b>
	<b>Total</b>	<b>15.651</b>

Dilihat dari faktor pendidikan jumlah pendidikan yang dipadukan dengan jenis kelamin, hal ini untuk mengetahui komposisi ASN di Kabupaten Cirebon terkait dengan gender serta jumlah pendidikan yang ditempuh berdasarkan atas jenis kelamin ASN, dari tabel di bawah ini

dapat dibaca bahwa dari sisi komposisi sangat logis dimana jumlah ASN berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan , sehingga sangat masuk akal jika dari segi pendidikan pun akan mengikuti, akan tetapi hal ini tidak menjadi hubungan yang baku antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan, meskipun dari komposisi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan itu.

**Tabel 1.13**

**Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan**

No.	Golongan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	SD	108	1
2.	SMP	255	10
3.	SMA	1.841	751
4.	DI	27	85
5.	DII	1.388	1.798
6.	DIII	526	984
7.	DIV	39	71
8.	S1	3.672	3.596
9.	S2	342	157
10.	S3	-	-
	<b>SubTotal</b>	<b>8.198</b>	<b>7.453</b>
	<b>Total</b>	<b>15.651</b>	

**E. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh**

Lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon, adalah :

- Lingkungan internal
  - a. Komitmen dan tekad bersama seluruh komponen birokrasi Pemerintah Kabupaten Cirebon dan masyarakat untuk



menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);

- b. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah khususnya pelayanan publik;
- c. Kejelasan regulasi, tanggung jawab, dan kewenangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- d. Hubungan jejaring kerja yang terjalin secara harmonis dan sinergis antara eksekutif dan legislatif dilingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon yang mendukung rumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam program-program pembangunan daerah dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Cirebon.

- Lingkungan eksternal

- a. Dukungan masyarakat dalam menciptakan suasana kondusif di wilayah Kabupaten Cirebon sehingga dapat terlaksananya kinerja pemerintah yang baik dan berkesinambungan;
- b. Dinamika regulasi dan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkenaan dengan kelembagaan dan pelimpahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan
- c. Pola koordinasi dan komunikasi yang sinergi dengan berbagai unsur seperti komunitas, dunia akademik, dan dunia usaha dalam membangun Kabupaten Cirebon secara bertanggung jawab;

## **F. Isu Strategis Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2017**

### **1. Isu Strategis**

Berdasarkan telaahan kebijakan pembangunan dan analisis berbagai permasalahan diatas, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan isu strategis sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama:
  - a. Implementasi pendidikan keagamaan secara baik;
  - b. Internalisasi keshalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat
2. Keterjangkauan, kualitas, dan partisipasi pendidikan:
  - a. Keterjangkauan meliputi akses dan pembiayaan pendidikan;
  - b. Kualitas dan kuantitas pendidikan meliputi SDM pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan;
  - c. Partisipasi pendidikan masyarakat meliputi peran serta masyarakat bagi keberlanjutan pendidikan dasar dan menengah
3. Jaminan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan :
  - a. Kesehatan ibu, bayi, dan balita meliputi kematian ibu, bayi, balita; gizi ibu, bayi, dan balita; cakupan imunisasi dan kunjungan ibu hamil;
  - b. Jaminan dan keterjangkauan akses pelayanan kesehatan meliputi keikutsertaan menjadi peserta BPJS;
  - c. Mutu pelayanan kesehatan meliputi SDM medis dan paramedis, sarana dan prasarana kesehatan;
  - d. Promosi, Jejaring, dan partisipasi masyarakat;
  - e. Penyehatan lingkungan meliputi perilaku hidup bersih dan sehat, pengendalian penyakit (menular dan non menular)
4. Ketersediaan dan kemantapan infrastruktur wilayah :
  - a. Kemantapan jembatan dan jalan meliputi jalan kabupaten dan poros desa;

- b. Mempercepat penyediaan infrastruktur dasar meliputi perumahan, sanitasi, dan listrik;
  - c. Keterpaduan pembangunan bidang keciptakaryaan meliputi sanitasi, penataan kawasan kumuh, penataan dan pengembangan bangunan dan lingkungan permukiman;
  - d. Mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan/atau di perbatasan;
  - e. Penataan fasilitas sosial dan fasilitas umum meliputi jalan pemukiman, taman, tempat ibadah, dan ruang terbuka hijau;
  - f. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni dan terjangkau;
  - g. Prasarana air bersih dan sanitasi meliputi saluran pembuangan air limbah domestic, sampah, dan jamban;
  - h. Pemeliharaan irigasi teknis dan setengah teknis;
  - i. Prasarana telekomunikasi dan informasi
5. Ketahanan pangan :
- a. Ketersediaan meliputi produksi, produktivitas pangan, alih fungsi lahan, teknologi;
  - b. Akses dan distribusi pangan meliputi jalan produksi, gudang/lumbung pangan, tata niaga;
  - c. Keanekaragaman/diversifikasi pangan;
  - d. Stabilitas harga pangan;
  - e. Mutu dan keamanan pangan
6. Pengendalian kependudukan :
- a. Distribusi meliputi sebaran dan migrasi/urbanisasi;
  - b. Struktur/komposisi meliputi kelahiran, kematian, perpindahan, pertumbuhan penduduk, dan rasio jenis kelamin
7. Penurunan jumlah penduduk miskin :
- a. Pendapatan meliputi mata pencaharian;
  - b. Jaminan sosial masyarakat miskin;
  - c. Akses terhadap sumber daya sosial, ekonomi, dan politik
8. Reformasi birokrasi :

- a. Penataan kelembagaan pemerintahan;
  - b. Sistem kepegawaian meliputi kapasitas dan profesionalisme pegawai, remunerasi aparatur sipil negara;
  - c. Pelayanan publik;
  - d. Perencanaan pembangunan;
  - e. Penganggaran dan pembiayaan pembangunan;
  - f. Pengendalian, evaluasi, dan pengawasan pembangunan;
  - g. Sarana dan prasarana pemerintahan
9. Peningkatan investasi
- a. Ketersediaan infrastruktur dasar wilayah
  - b. Pelayanan perijinan usaha meliputi ketersediaan sistem pelayanan perijinan berbasis teknologi informasi; mekanisme dan prosedur perijinan, dan kapasitas sumber daya manusia
  - c. Stabilitas wilayah meliputi keamanan dan ketertiban, politik, dan kepastian hukum;
  - d. Promosi potensi dan kelayakan investasi;
  - e. Akses permodalan dan jasa keuangan;
  - f. Penciptaan sentra-sentra ekonomi;
  - g. Pengembangan ekonomi kerakyatan
10. Ketersediaan energi
- a. Akses listrik bagi rumah tangga kurang mampu
  - b. Energi terbarukan
11. Kesempatan dan daya saing ketenagakerjaan
- a. Daya saing tenaga kerja meliputi keterampilan dan produktivitas
  - b. Kesempatan kerja meliputi kewirausahaan/entrepreneurship dan pengangguran
  - c. Penempatan dan perlindungan tenaga kerja
12. Pengelolaan lingkungan hidup :
- a. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi hutan kota dan alun-alun/taman kecamatan
  - b. Perubahan iklim global dan lokal



- c. Bencana alam meliputi adaptasi, mitigasi, dan rehabilitasi bencana
  - d. Konservasi, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya alam
  - e. Pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan
  - f. Pengelolaan limbah
  - g. Implementasi pembangunan berwawasan ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy)
  - h. Penegakkan hukum lingkungan
13. Pembinaan dan pengembangan generasi muda dan olahraga :
- a. Nilai kebangsaan dan kepemimpinan
  - b. Sarana dan prasarana kepemudaan
  - c. Budaya berolahraga
  - d. Sarana dan prasarana olahraga
14. Pelestarian dan pengembangan seni, budaya, dan pariwisata :
- a. Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya
  - b. Destinasi wisata
  - c. Sarana dan prasarana seni dan budaya

## **2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 menyangkut aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek pemerintahan, dan aspek fisik dan prasarana wilayah. Berdasarkan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon transisi tahun 2017, berbagai hal dirumuskan untuk mengatasi isu strategis tahun 2017. Adapun prioritas pembangunan tahun 2016 yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
2. Meningkatkan keterjangkauan, kualitas, dan partisipasi pendidikan



3. Meningkatkan jaminan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan
4. Meningkatkan ketersediaan dan kemantapan infrastruktur wilayah
5. Meningkatkan ketahanan pangan
6. Meningkatkan pengendalian kependudukan
7. Percepatan penurunan jumlah penduduk miskin
8. Percepatan reformasi birokrasi
9. Peningkatan investasi
10. Meningkatkan ketersediaan dan keberlanjutan energi
11. Meningkatkan kesempatan dan daya saing ketenagakerjaan
12. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup
13. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan generasi muda
14. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni, budaya, dan pariwisata

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Kabupaten Cirebon diuraikan sebagai berikut.

### **BAB. I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum daerah, struktur organisasi, lingkungan strategis, isu strategis yang berpengaruh, prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon

## **BAB. II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan visi dan misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah, indikator kinerja utama, penetapan perjanjian kinerja.

## **BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menguraikan kerangka pengukuran kinerja, pengukuran dan analisis kinerja. Pencapaian kinerja keuangan daerah.

## **BAB. IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan dan rencana tindak lanjut



# 2

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perencanaan Strategis

##### 1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan visi dan misi sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019. Adapun penjelasan secara rincinyasebagai berikut.

Visi Kabupaten Cirebon adalah **“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera”**.

Untuk memperjelas sasaran yang hendak diwujudkan, pengertian terhadap rumusan visi sebagai batasan operasionalnya, yaitu:

- |        |   |
|--------|---|
| Agamis | adalah suatu kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada pengamalan nilai-nilai agama menuju tatanan masyarakat dan aparatur pemerintah yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia;  |
| Maju   | adalah suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing nasional dan global berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan, dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan sumber daya yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik, berprestasi, dan berdaya guna; |
| Adil   | adalah suatu kondisi pembangunan daerah yang menjadi bagian dari satu kesatuan pembangunan Jawa Barat dan Nasional;   |

Sinergi	adalah suatu kondisi pembangunan daerah yang menjadi bagian dari satu kesatuan pembangunan Jawa Barat dan Nasional;
Sejahtera	adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan bathin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai, dan tenteram.

Untuk mencapai visi tersebut, kepala daerah menyusun misi-misi dengan rumusan sebagai berikut.

- Misi pertama,** Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik;
- Misi Kedua,** Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu, dan berketerampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan;
- Misi Ketiga,** Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia;
- Misi Keempat,** Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik, dan komuniti);
- Misi Kelima,** Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai, dan tenteram;
- Misi Keenam,** Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

## 2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Cirebon, tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun kedepan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut.



**Tabel 2.1****Tujuan dan Sasaran**

<b>No.</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
1	Membentuk sumber daya manusia yang memiliki integritas (jati diri), sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai agama, jujur, dan bertakwa	Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama, keshalehan sosial masyarakat, dan toleransi antar dan internal umat beragama
2	Meningkatkan derajat SDM yang sehat, berbudaya, berilmu, berketerampilan, dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua</li><li>2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat</li><li>3. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya kerja, berketerampilan dan berjiwa kewirausahaan</li><li>4. Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya</li><li>5. Terwujudnya kemandirian dan peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga</li></ol>
3	Meningkatkan pemerataan pembangunan sektoral dan kewilayahan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan koneksitas antar wilayah</li><li>2. Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai</li><li>3. Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri, dan lestari</li></ol>
4	Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
5	Meningkatkan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya perekonomian masyarakat</li><li>2. Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas</li><li>3. Terpenuhinya akses seluruh masyarakat terhadap infrastruktur permukiman layak</li></ol>
6	Mewujudkan reformasi birokrasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terwujudnya pelayanan publik yang prima</li><li>2. Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah</li><li>3. Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih</li></ol>

Adapun hubungan keterkaitan antara visi misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat dilihat dalam tabel 2.2. dibawah ini.

**Tabel 2.2**

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera		
1	Meningkatkan kualitas SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik	Membentuk sumber daya manusia yang memiliki integritas (jati diri), sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai agama, jujur dan bertakwa	Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama, keshalehan sosial masyarakat, dan toleransi antar dan intern umat beragama
2	Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu, dan berketrampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan	Meningkatkan derajat SDM yang sehat, berbudaya, berilmu, berketerampilan dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua</li> <li>2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat</li> <li>3. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berketrampilan dan berjiwa kewirausahaan</li> <li>4. Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya</li> <li>5. Terwujudnya kemandirian dan peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga</li> </ol>
3	Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang	Meningkatkan pemerataan pembangunan sektoral dan kewilayahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan koneksitas antar wilayah</li> <li>2. Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai</li> </ol>

	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
	tersedia		3. Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari
4	Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik, dan komuniti)	Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
5	Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram	Meningkatkan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat</li> <li>2. Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas</li> <li>3. Terpenuhinya akses seluruh masyarakat terhadap infrastruktur permukiman layak</li> </ol>
6	Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	Mewujudkan reformasi sistem birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya pelayanan publik yang prima</li> <li>2. Meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah</li> <li>3. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik dan bersih</li> </ol>

## **B. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan 15 sasaran strategis yang mencakup 73 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Cirebon Tahun 2016. Adapun rincian IKU tersebut diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 2.3**

**Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Cirebon**

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	
1	Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama	a	Angka melek huruf Al-Quran lulusan SD/MD
		b	Angka Melek huruf Al Quran lulusan SMP
		c	Angka Melek huruf Al Quran lulusan SMA
		d	Angka Melek huruf Al Quran lulusan SMK
		e	Jumlah siswa yang hafal juz 'amma pada pendidikan SLTP dan SLTA
		f	Jumlah DKM yang menyelenggarakan kegiatan ba'da maghrib mengaji
		g	Jumlah penghafal Quran
		h	Prestasi lomba keagamaan tingkat provinsi Jawa Barat
		i	Jumlah kasus konflik yang bernuansa agama (IKU)
		2	Terwujudnya pelayanan pendidikan untuk semua
b	Angka Melek Huruf (AMH) pada penduduk usia 15 tahun keatas (pp6)		
c	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)		
d	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	- SD/MI		
	- SMP/MTs		
	- SMA/MA		
e	Angka Partisipasi Murni (APM)		
	- SD/MI		
	- SMP/MTs		
	- SMA/MA		
	- SMK		
f	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jml penduduk per usia tingkatan sekolah		
	- SD		
	- SMP		
	- SMA dan SMK		
3	Meningkatnya kualitas	a	Angka Harapan Hidup (AHH)
		b	ratio Kematian Ibu



Sasaran		Indikator Kinerja Utama	
	kesehatan masyarakat	c	ratio Kematian Bayi
		d	Balita gizi buruk (BB/TB)
		e	cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar
		g	Rasio rumah sakit per satuan penduduk
		h	Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk
		i	Jml puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan
		k	Rasio dokter terhadap penduduk
		l	Rasio paramedis terhadap penduduk
		m	presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan
		n	Jumlah Posyandu Purnama
4	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berketrampilan, dan berjiwa kewirausahaan	a	Jumlah kawasan seni
		b	Jumlah pertunjukan/pagelaran/festival budaya tingkat nasional (iku)
		c	Cakupan peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (spm) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi</li> <li>• Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan kewirausahaan</li> <li>• Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan</li> <li>• Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)</li> <li>• Besaran Pekerja/buruh yang menjadi program jamsostek.</li> <li>• Besaran Pemeriksaan Perusahaan</li> <li>• Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan.</li> </ul>
		d	Jumlah wirausahawan baru
		e	Angka pengangguran Terbuka
5	Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya	a	Meningkatnya kunjungan wisatawan
6	Terwujudnya peningkatan peran pemuda dan prestasi Olah raga	a	prestasi olahraga di tingkat Provinsi Jawa Barat
7	Peningkatan	a	Jumlah panjang jalan kabupaten dalam

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	
	koneksitas antar wilayah		kondisi baik
		b	Jumlah panjang ruas jalan poros desa dalam kondisi baik
8	Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	a	jaringan irigasi:
			- panjang saluran induk
			- panjang saluran sekunder
			- Bangunan jaringan irigasi
		c	jumlah rumah tangga berakses air minum untuk keperluan sehari-hari
		d	jumlah daerah rawan banjir
		f	prosentase pengangkutan sampah
		g	Persentase penduduk yg terlayani sistem jaringan drainase Skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun
		h	Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan persampahan)
		i	Cakupan ketersediaan rumah layak huni
j	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (pos jaga)		
9	Terwujudnya Cirebon yang bersih, Asri dan lestari	a	Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri
		b	Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		c	Prosentase kawasan lindung
		d	Penghargaan Adipura
		e	Jumlah sungai yang memenuhi kualitas baku mutu air
		f	Jumlah industri yang memenuhi kualitas baku mutu udara
		g	Jumlah pengaduan kasus dugaan terjadinya pencemaran lingkungan
10	Terwujudnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	a	Jumlah komunitas
		b	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
		c	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan
11	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	a	Nilai PDRB
		b	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
		c	PDRB per kapita
		d	Tingkat inflasi
		e	Jumlah daerah rawan pangan
		f	Nilai investasi
		g	Prosentase Koperasi aktif

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	
		h	Jumlah lokasi wisata kuliner di kecamatan
12	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	a	Menurunnya Jumlah penduduk miskin
		b	Meningkatnya cakupan listrik bagi penduduk
13	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	a	Indeks Kepuasan Masyarakat
		b	Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan SOP dan SPM
		c	Kecamatan yang menjalankan Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)
14	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	a	Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai
		b	Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi/ latar pendidikan
15	Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih	a	Rata-rata capaian kinerja SKPD
		b	Penilaian RAD Pencegahan Penanggulangan Korupsi (PPK)
		c	Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal
		d	Peningkatan Pendapatan asli daerah

### C. Rencana Kerja Tahunan

Perencanaan Kinerja tahunan adalah Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2017.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif



dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

#### **D. Perjanjian Kinerja Tahun 2017**

Perjanjian kinerja merupakan amanat peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pola Kerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah bentuk pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Perjanjian kinerja bermaksud untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (insentif dan disinsentif).

Dengan kata lain, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur;



- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah membuat Perjanjian kinerja tahun 2016 secara berjenjang sesuai dengan kewenangan, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja tahun 2017 ini disusun berdasarkan pada rencana kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan meliputi 26 urusan wajib pemerintahan dan 8 urusan pilihan dengan sasaran sebanyak 15 (lima belas) sasaran strategis yang diukur dengan 73 (tujuh puluh tiga) indikator.

Berdasarkan alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran di atas, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp. 3.855.244.761.111,73 sebagaimana tercantum dalam APBD Perubahan Anggaran Tahun 2017. Anggaran sebesar itu digunakan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 2.116.711.161.551,73 atau 54,91% dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 1.977.088.287.360,00 atau 45,1%.

Secara ringkas, gambaran keterkaitan sasaran, indikator kinerja dan target tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2017**  
**Kabupaten Cirebon**

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	
				Nilai	Satuan
1	Meningkatkan SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik	Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama	a. Angka melek huruf al-quran lulusan SD/MD	54	%
			b. Angka melek huruf al-quran lulusan SMP	61	%
			c. Angka melek huruf al-quran lulusan SMA	66	%
			d. Angka melek huruf al-quran	66	%

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	
				Nilai	Satuan
			lulusan SMK		
			e. Jumlah siswa yang hafal jus'amma pada pendidikan SMP dan SMA	5	%
			f. Jumlah DKM yang menyelenggarakan kegiatan ba'da magrib mengaji	424	DKM
			g. Jumlah penghafal quran	1.005	orang
			h. Prestasi lomba keagamaan tingkat propinsi jawa barat	5	-
			i. Jumlah kasus konflik yang bernuansa agama	5	kasus
2	Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu dan berketrampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan.	1. Terwujudnya pelayanan pendidikan untuk semua	a. Peningkatan indeks pendidikan	83,00 - 84,27	%
			b. Angka Melek Huruf (AMH) pada penduduk usia 15 tahun keatas	95	%
			c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,69	tahun
			d. Angka Partisipasi Kasar (APK)		
			- SD/MI	122,00	%
			- SMP/MTs	110,21	%
			- SMA/MA	80,05	%
			e. Angka Partisipasi Murni (APM)		
			- SD/MI	99,94	%
			- SMP/MTs	90,10	%
			- SMA/MA	61,80	%
			- SMK	47,95	%
			f. Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per usia tingkatan sekolah		
			- SD	49	%
			- SMP	19	%
		- SMA/SMK	21	%	
			2. Meningkatkan kualitas	a. Angka Harapan Huruf (AHH)	66,25
	b. Ratio kematian ibu	85,38		point	

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	
				Nilai	Satuan
		kesehatan masyarakat	c. Ratio kematian bayi	3,96	point
			d. Balita gizi buruk	0,85	%
			e. Cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar	1.345.865	orang
			f. Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,054	%
			g. Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	0,055	%
			h. Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan	57	unit
			i. Rasio dokter terhadap penduduk	1,139	%
			j. Rasio paramedis terhadap penduduk	1,516	%
			k. Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	1.345.000	%
			l. Jumlah Posyandu Purnama	615	unit
	3. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berketrampilan, dan berjiwa kewirausahaan		a. Jumlah kawasan seni	1	kawasan
			b. Jumlah pertunjukan/pagelaran/festival budaya tingkat nasional	1	kali
			c. Cakupan peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (SPM)	65	%
		- Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi	65	%	

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	
				Nilai	Satuan
			- Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan kewirausahaan	65	%
			- Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	45	%
			- Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	60	%
			- Besaran Pekerja/buruh yang menjadi program jamsostek.	50	%
			- Besaran Pemeriksaan Perusahaan	50	%
			- Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan.	55	%
			d. Jumlah wirausahawan baru	100	orang
			e. Angka pengangguran terbuka	9,1	%
		4. Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya	a. Meningkatnya kunjungan wisatawan	10	%
		5. Terwujudnya peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga	a. Prestasi olah raga di tingkat provinsi Jawa Barat	9	Peringkat
	3.Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang	1. Peningkatan koneksitas antar wilayah	a. Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	594,44	Km
			b. Jumlah panjang ruas jalan poros desa dalam kondisi baik	419,91	Km
		2.Terwujudny	a. Jaringan irigasi		



No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	
				Nilai	Satuan
	tersedia	a. pembangunan prasarana wilayah yang memadai	- Panjang saluran induk	68,548	Km
			- Panjang saluran sekunder	35,065	Km
			- Bangunan jaringan irigasi	70	%
			b. Jumlah rumah tangga berakses air minum untuk keperluan sehari-hari	118.620	rumah tangga
			c. Jumlah daerah rawan banjir	4	Kecamatan
			d. Prosentase pengangkutan sampah	42	%
			e. Persentase penduduk yg terlayani sistem jaringan drainase Skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	40	%
			f. Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan persampahan)	33	%
			g. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	75	Persen
		h. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (pos jaga)	12	Pos jaga	
		3. Terwujudnya Cirebon yang bersih, Asri dan lestari	a. Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri	8	Kelompok
			b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	20	Persen
			c. Porosentasi kawasan lindung	30	Persen
			d. Penghargaan Adipura	1	kali
			e. Juhmlah sungai yang memenuhi kualitas baku mutu air	5	sungai

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017		
				Nilai	Satuan	
			f. Jumlah industri yang memenuhi kualias baku mutu udara	15	industri	
			g. Jumlah pengaduan kasus dugaan terjadinya pencemaran lingkungan	12	pengaduan	
	4. Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik dan komuniti)	1. Terwujudnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	a. Jumlah komunitas	85	komunitas	
			b. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	85	kelompok	
			c. Jumlah lembaga ekonomi pedesaan	254	lembaga	
	5. Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram	1. Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	a. Nilai PDRB	11.559.249	Rp (dlm juta)	
			b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,45	%	
			c. PDRB per kapita	17.811.979	Rp	
			d. Tingkat Inflasi	3,5-4,5	%	
			e. Jumlah Daerah rawan pangan	9	desa	
			f. Nilai Investasi	1.128.347	Rp (dlm juta)	
			g. Prosentase Koperasi aktif	94	%	
			h. Jumlah lokasi wisata kuliner di kecamatan	8	lokasi	
			2. Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	a. Menurunnya jumlah penduduk miskin	12,59	%
				b. meningkatnya cakupan listrik bagi penduduk	100	%
	6. Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem	1. Terwujudnya pelayanan publik yang prima	a. Indeks Kepuasan Masyarakat	4	indeks	
			b. Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan SOP dan SPM	7	unit	
			c. Kecamatan yang menjalankan Pelayanan	20	kecamatan	

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	
				Nilai	Satuan
	berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)		administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)		
		2. Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	a. Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai	3,1	%
			b. Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi/ latar pendidikan	95	%
		3. Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih	a. Rata-rata capaian kinerja SKPD	60-70	%
			b. Penilaian RAD Pencegahan Penanggulangan Korupsi (PPK)	Baik	Angka/huruf
			c. Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal	3	%
			d. Peningkatan Pendapatan asli daerah	15	%

Adapun anggaran Belanja Langsung Urusan Tahun 2017 yang disediakan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 1.492.340.105.447 yang digunakan untuk pelaksanaan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan pada 32 SKPD dengan rincian selengkapnya dapat dilihat pada lampiran I .

#### **E. Rencana Aksi Daerah (RAD)**

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyusun rencana aksi daerah penetapan kinerja sebagaimana diuraikan pada lampiran.

# 3

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pemerintah Kabupaten Cirebon selaku pengemban amanah masyarakat Cirebon melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon 2014-2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.



## **A. Akuntabilitas Kinerja**

### **1. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator tujuan dan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran atas pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Kategori Capaian**

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % sd. 100 %	Baik (B)
3	55 % sd. 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2017 berdasarkan pada tingkat pencapaian indikator sasaran dan menggambarkan tingkat capaian pada program/kegiatan. Secara kuantitatif untuk menghitung capaian target indikator kinerja, rumus yang digunakan adalah :

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi pencapaian kinerja. Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Capaian Kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja. Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Capaian Kinerja} = (\text{Rencana} - (\text{Rencana} - \text{Realisasi})) / \text{Rencana} \times 100\%$$

Secara umum Pemerintah Kabupaten Cirebon telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014–2019.

Dalam RPJMD terdapat 6 Misi, 7 Tujuan dan 15 (lima belas) sasaran, dengan 73 (tujuh puluh tiga) indikator sasaran terdiri dari

- Misi I terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 9 indikator kinerja,
- Misi II terdapat 1 tujuan, 5 sasaran dan 25 indikator kinerja,

- Misi III terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 17 indikator kinerja,
- Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator kinerja
- Misi V terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 10 indikator kinerja
- Misi VI terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 9 indikator kinerja.

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Indikator Sasaran/IKU**

No.	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Indikator		
			Jumlah sasaran	Indikator Sasaran	Pencapaian Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6
1	Misi 1	1	1	9	BS=8, B=1, C=0, K=0
2	Misi 2	1	5	25	BS=4, B=17, C=1, K=1, Indikator pindah ke Provinsi =2
3	Misi 3	1	3	17	BS=11, B=2, C=2, K=2
4	Misi 4	1	1	3	BS=3, B=0, C=0, K=0
5	Misi 5	1	2	10	BS=5, B=4, C=0, K=1
6	Misi 6	1	3	9	BS=4, B=2, C=1, K=2
<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>	<b>15</b>	<b>73</b>	BS=35, B=26, C=4, K=6, 2 IKU pindah ke Provinsi

Berikut ini adalah tabel jumlah sasaran katagori dan persentase capaian kinerja per misi yang ada

No	Katagori	Jumlah	%
Misi I			
1	Baik Sekali	8	88.89
2	Baik	1	11.11
3	Cukup	0	0.00
4	Kurang	0	0.00
	Total	9	100
Misi II			
1	Baik Sekali	4	16.00
2	Baik	17	68.00
3	Cukup	1	4.00
4	Kurang	1	4.00
5	Kewenangan Pindah	2	8.00
	Total	25	100.00

No	Katagori	Jumlah	%
Misi III			
1	Baik Sekali	11	64.71
2	Baik	2	11.76
3	Cukup	2	11.76
4	Kurang	2	11.76
	Total	17	100
Misi IV			
1	Baik Sekali	3	100.00
2	Baik	0	0.00
3	Cukup	0	0.00
4	Kurang	0	0.00
	Total	3	100
Misi V			
1	Baik Sekali	5	50.00
2	Baik	4	40.00
3	Cukup	0	0.00
4	Kurang	1	10.00
	Total	10	100
Misi VI			
1	Baik Sekali	4	44.44
2	Baik	2	22.22
3	Cukup	1	11.11
4	Kurang	2	22.22
	Total	9	100

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 15 sasaran yang mencakup 73 indikator sasaran, diketahui bahwa 35 indikator sasaran atau 49,3% Baik Sekali, 26 indikator sasaran atau 36,62 % Baik, 4 indikator sasaran atau 5,63% Cukup, 6 indikator sasaran atau 8,45% kurang dan 2 indikator sasaran kewenangannya pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **110,99%** atau bermakna **Baik Sekali**. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2017 **Baik Sekali**.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :



**Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik**

Untuk merealisasikan misi kesatu, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan sasaran strategis yakni meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama. Kehidupan beragama, kesolehan sosial, dan toleransi ditetapkan menjadi sasaran strategis mengingat bahwa Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah yang menjadi sentra pengembangan agama Islam di Indonesia. Daerah ini memiliki penduduk dengan berbagai macam ajaran agama/keyakinan, ada Islam, Kristen, Hindu, dan Budha. Aspek agama menjadi kekuatan dasar dan *driving force* dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan kesholehan sosial dan sikap toleransi, keberanekaragaman agama menjadi potensi pemersatu pembangunan. Namun demikian, pada sisi lain, kondisi ini memiliki potensi kerawanan sosial dan konflik horizontal berbasis suku, agama dan ras (sara) jika tidak dikelola dengan baik. Aspek toleransi untuk hidup bersanding secara damai menjadi hal penting untuk dikomunikasikan dengan berbagai komponen masyarakat agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan secara kondusif. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon memandang hal ini menjadi strategis bagi kondusivitas wilayah.

Untuk memotret pencapaian realisasi misi 1 ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan 9 indikator sasaran.

**Tabel 3.3**

**Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Aktivitas Kehidupan Beragama, Keshalehan Sosial Masyarakat dan Toleransi antar dan Intern Umat Beragama.**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	%	Target 2017	Realisasi 2017	%
1	Angka Melek Huruf Alquran Lulusan SD/MI	%	46	43,67	95	54	54.78	101.44
2	Angka Melek Huruf Alquran Lulusan SMP/MTs	%	54	56,85	105	61	61.89	101.46
3	Angka Melek Huruf	%	59	52,37	89	66	66.96	101.46

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	%	Target 2017	Realisasi 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Alquran Lulusan SMA/MA							
4	Angka Melek Huruf Alquran Lulusan SMK	%	59	60,25	102	66	66.96	101.46
5	Jumlah Siswa Yang Hafal Juz Amma pada Pendidikan SLTP dan SLTA	%	5	5	100	5	5	100.00
6	Jumlah DKM yang menyelenggarakan kegiatan Ba'da Maghrib Mengaji	%	424	424	100	424	753	177.6
7	Jumlah Penghapal Alquran	Orang	914	167	18	831	173	20.82
8	Prestasi Lomba Keagamaan Tingkat Provinsi Jawa Barat	Peringkat	lima besar	13 besar	38	5	14	80
9	Jumlah Kasus Konflik Yang Bernuansa Agama	Kasus	5	0	0	5	0	200
<b>Rata-Rata</b>					71.89			109.36

Dari tabel di atas, untuk indikator kinerja Sasaran Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama, keshalehan sosial masyarakat dan toleransi antar dan intern umat beragama, terdapat 9 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 109,36% dengan katagori **Baik Sekali** dimana lebih tinggi dari rata-rata capaian tahun 2016 yang sebesar 71,89%. Pencapaian target kinerja pada Tahun 2017 ini karena beberapa hal berikut ini :

1. Budaya religius masyarakat Kabupaten Cirebon dalam menerapkan dan mempelajari aspek-aspek keagamaan;
2. Peran tokoh agama yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan seperti Nahdhatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan lembaga pendidikan keagamaan yang tidak berafiliasi kepada organisasi tersebut seperti Al-Bahjah dan lembaga pondok pesantren modern lainnya.
3. Adanya sinergitas dan kerjasama yang memadai dengan intansi dan lembaga swadaya masyarakat dalam menginisiasi dan

mengintervensi program dan kegiatan yang menjadi indikator pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Dari tabel di atas juga dapat diketahui ada dua indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu indikator nomor 7 dan nomor 8, hal ini dikarenakan oleh

1. Sebagian besar lembaga keagamaan seperti majelis taklim, madrasah, kelompok pengajian dan pondok pesantren mengajarkan ilmu agama secara umum, sangat sedikit yang secara khusus pada pengkajian dan penghafal al-qur'an (tahfidz);
2. keterbatasan kemampuan untuk memantau dan menginisiasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan indikator kinerja pada dua indikator di atas;
3. Untuk meningkatkan angka melek huruf al qur'an para siswa perlu untuk diselenggarakan kurikulum ekstrakurikuler baca tulis al qur'an di seluruh satuan pendidikan dan diujikan diakhir masa pendidikan untuk mendapatkan sertifikat/ijazah kelulusan baca tulis al qur'an untuk dijadikan salah satu syarat untuk mendapatkan ijazah kelulusan dan nilai hasil UAN dan UAS.

Untuk mendorong pencapaian target yang belum tercapai, Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan sinergi dan peningkatan partisipasi lembaga-lembaga pendidikan berbasis keagamaan, serta mengintervensi dan menginisiasi program dan kegiatan untuk lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, majelis taklim, kelompok-kelompok pengajian, dan penerapan peraturan daerah tentang Madrasah Takmilyah Diniyah Awaliyah (MDTA) secara lebih tegas.

**Misi Kedua : Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu, dan berketerampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan.**



**Tabel 3.4**

**Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	%	Target 2017	Realisasi 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Indeks Pendidikan	%	81,67 - 82,93	54,88	66,17	83.00-84.27	54.88	66.12
2	Angka Melek Huruf (AMH) pada Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	%	94,63	94,77	100,14	95	95	100
3	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,52	6,41	85,24	7.69	7.90	102.73
4	Angka Partisipasi Kasar <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SD/MI</li> <li>▪ SMP/MTs</li> <li>▪ SMA/MA</li> </ul>	%	118 110.31 80.02	107.33 90.66 75.39	90.96 82.19 94.21	122.00 110.21 80.05	109.31 97.18 75.90	89.6 88.18 94.81
5	Angka Partisipasi Murni <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SD/MI</li> <li>▪ SMP/MTs</li> <li>▪ SMA/MA</li> <li>▪ SMK</li> </ul>	%	99.93 89.9 61.32 47.45	96.47 78.05 37.39 71.41	96.54 86.82 60.98 150.50	99.94 90.10 61.80 47.95	96.28 74.81 52.54 71.41	96.38 96.34 85.02 148.93
6	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Jumlah Penduduk per Usia Tingkatan Sekolah <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SD/MI</li> <li>▪ SMP/MTs</li> <li>▪ SMA/MA</li> </ul>	%	49 18 20	49 18 20	100 100 100	49 19 21	49 18 20	100 94.74 95.24
<b>Rata-Rata</b>						74.02		96.78

Tabel 3.4 di atas menggambarkan capaian atas sasaran Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua, dari tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian atas semua indikator kinerja yang masuk dalam sasaran ini adalah 96,78% atau masuk dalam katagori **Baik**, capaian ini lebih besar dari capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 yang memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 74,02%. Capaian indikator kinerja tertinggi diraih oleh Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mencapai 102.73 % (Baik Sekali), dan Indikator APM SMK yang mencapai 148,93 (baik sekali) tetapi lebih kecil dari capaian tahun sebelumnya.

Ketidaktercapaian indikator kinerja pada sasaran ini dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut ini :

1. Banyaknya animo siswa Kabupaten Cirebon yang melanjutkan sekolah ke Kota Cirebon dan kabupaten atau kota lainnya.



2. Rawan *Drop Out* (DO) SD dan SMP yang lokasi rumah siswa jauh dari sekolah terutama dipedesaan dan Angka putus sekolah dan mengulang sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP masih relatif tinggi;
3. Rasio guru dan murid belum mencapai kondisi yang ideal. Rasio antara guru dan murid di semua jenjang pendidikan mengalami fluktuasi dimana jumlah pertambahan murid tidak seimbang dengan pertambahan jumlah guru serta persebaran guru di Kabupaten Cirebon belum merata, apalagi ditambah dengan setiap tahunnya banyak guru yang pensiun namun tidak diikuti dengan penerimaan formasi CPNS guru;
4. Kualifikasi guru SD, SLB dan SMP masih kurang (guru SD dan SLB dibawah D-II, Guru SMP dibawah D-III), dan permasalahan pada pola perkembangan karier guru dalam pelaksanaan materi, rotasi maupun promosi;
5. Indeks pendidikan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini karena rendahnya rata-rata lama sekolah yang disebabkan banyak siswa pada jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami putus sekolah dan rawan *drop out*;
6. Sarana prasarana belajar belum memadai, pelaksanaan materi lokal belum mantap serta serta Sistem pelaporan belum berjalan sebagaimana mestinya;
7. Jumlah Taman Kanak – Kanak masih kurang dan persebarannya tidak merata; dan
8. Belum tertampungnya siswa penyandang disabilitas di lembaga pendidikan luar biasa.

Solusi ntuk menghilangkan penyebab ketidaktercapaian target kinerja di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menampung siswa penyandang disabilitas perlu melakukan pendataan siswa penyandang disabilitas untuk mengetahui jumlah siswa penyandang disabilitas, memaksimalkan sekolah luar biasa yang ada, dan membentuk sekolah inklusi di tingkat kecamatan;
2. Untuk mengantisipasi banyaknya animo siswa Kabupaten Cirebon yang melanjutkan sekolah ke Kota Cirebon perlu melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasana sekolah yang memiliki standar internasional dan nasional, perlu meningkatkan kapasitas, kualitas dan kreativitas kompetensi para tenaga pendidik dalam hal pemberian materi pembelajaran dan pelatihan, serta penyusunan kurikulum pembelajaran atau mutu pembelajaran yang dapat merangsang motivasi belajar, kreativitas, dan perilaku yang baik atas dasar agama, sosial dan budaya para peserta didik sehingga mutu sekolah di Kabupaten Cirebon bisa bersaing dengan sekolah di luar Kabupaten Cirebon;
3. Untuk pemerataan distribusi guru di wilayah Kabupaten Cirebon perlu dilakukan upaya pemerataan guru dengan dilakukannya pendataan dengan sistem *on line* melalui aplikasi Dapodik;
4. Meningkatkan motivasi siswa miskin melalui peningkatan pelayanan (bantuan untuk siswa miskin dan berprestasi) dalam rangka mengurangi jumlah siswa putus sekolah;
5. Meningkatkan motivasi guru melalui peningkatan pelayanan dalam rangka meningkatkan kemampuan kompetensi guru ke jenjang pendidikan lebih tinggi;
6. Untuk perluasan memperoleh kesempatan belajar dilakukan melalui penajaman kurikulum/pokok bahasan yang dapat memberikan keleluasaan untuk dikembangkan sesuai dengan

kondisi lingkungan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);

7. Perlu dilakukan revitalisasi rehabilitasi dan refungsionalisasi gedung sekolah;
8. Untuk perluasan memperoleh kesempatan pendidikan, masyarakat perlu diikutsertakan dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan termasuk dalam penyusunan program/kurikulum
9. Perlu dilakukan pengangkatan guru PNS baru dan Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan;
10. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
11. Meningkatkan profesionalisme guru agar mampu menjabarkan kurikulum dan rumusan tujuan yang lebih tajam/operasional, materi yang tepat (esensi) sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta kondisi lingkungan;
12. Meningkatkan kemampuan para guru untuk membuat dan memanfaatkan sumber belajar dan alat peraga/pendidikan yang ada dilingkungan sekitar, kecuali alat - alat yang sukar dibuat, perlu disediakan oleh pemerintah;
13. Menyusun dan melaksanakan standarisasi sarana dan prasarana serta memasyarakatkan, memelihara dan memanfaatkannya;
14. Perluasan dan penambahan program Paket A, Paket B dan Paket C;



15. Meningkatkan fungsi institusi dan pengisian lowongan kerja kepala sekolah, kepala urusan tata usaha di sekolah; dan Memantapkan pendekatan *School Based Management* dan *Community Based Management* melalui pemberdayaan institusi.

**Tabel 3.5**  
**Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	%	Target 2017	Realisasi 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	66.12	71.41	108.80	66.25	66.25	100
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Point	90.61	100.42	110.83	85.38	84.01	101.61
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	Point	4.06	4.38	107.88	3.96	3.99	99.24
4	Balita gizi buruk (BB/TB)	%	0.97	1.09	112.37	0.85	0.13	184.71
5	cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar	orang	1.345.865	1.345.865	100	1.345.865	1.365.085	101.43
6	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	%	0.054	0.054	100	0.054	0.054	100
7	Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	%	0.055	0.055	100	0.055	0.080	145.46
8	Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan	Unit	57	57	100	57	57	100
9	Rasio dokter terhadap penduduk	%	1.14	1.14	100	0.139	0,216	155.4
10	Rasio paramedis terhadap penduduk	%	1.485	1.485	100	1.516	1.682	110.73
11	presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	Orang	1.345.000	1.345.000	100	1.345.000	1.345.000	100
12	Jumlah Posyandu Purnama	Unit	538	538	100	615	999	162.44
<b>Rata-Rata</b>					103.32			121.75

Tabel di atas menggambarkan capaian indikator kinerja untuk sasaran Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, rata-rata capaian indikator kinerja tahun 2017 adalah 121,75% yang masuk dalam katagori **Baik Sekali**, dan melebihi capaian tahun 2016 yang sebesar 103,32%. Indikator kinerja yang belum melampaui target adalah Angka Kematian Bayi (AKB) yang memiliki selisih 0,03 dari target. Dan secara umum indikator kinerja pada sasaran ini pada katagori sangat baik.



Keberhasilan atas capaian indikator kinerja di atas, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga masih memiliki permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Tidak tercapainya target angka kematian bayi pada tahun 2017 disebabkan karena kurangnya kompetensi petugas dalam kegawatdaruratan neonatal di puskesmas, sehingga perlu upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
2. Kurangnya tenaga medis dan paramedis sehingga kurang optimalnya pelayanan kesehatan di puskesmas, sehingga perlu adanya penerimaan CPNS untuk formasi tenaga medis dan paramedis.

Untuk menghilangkan penyebab atas permasalahan di atas, beberapa langkah dan solusi yang diambil diantaranya :

1. Menyusun formasi dan analisis kebutuhan serta pemenuhan atas kekurangan ASN untuk tenaga medis dan para medis di lingkungan Kabupaten Cirebon;
2. Perbaiki, pemeliharaan, peningkatan mutu, kualitas dan jumlah sarana dan prasana kesehatan baik yang bersifat dasar maupun penunjang;
3. Pelayanan kesehatan masyarakat yang berbasis posyandu terus dikembangkan melalui peran serta masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan bersih demi mewujudkan gerakan masyarakat yang mengarah pada sikap dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
4. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan langkah ampuh untuk menangkal penyakit. Namun dalam praktiknya, penerapan PHBS yang kesannya sederhana tidak selalu mudah dilakukan. Terutama bagi

mereka yang tidak terbiasa. Dalam hal ini, pendidikan dari keluarga sangat dibutuhkan;

5. Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif mengambil bagian dalam penyelenggaraan peningkatan kesehatan masyarakat. Sedangkan pemerintah terus memberikan fasilitas, membina, mendorong serta menggerakkan swadaya masyarakat di Bidang Kesehatan agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

**Tabel 3.6**

**Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya, Berketerampilan dan Berjiwa Kewirausahaan**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	%	Target 2017	Realisasi 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah kawasan seni	Kawasan	0	0	0	1	1	100
2	Jumlah pertunjukan/pagelaran/festival budaya tingkat nasional	Kali	1	1	100	1	1	100
3	Cakupan peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (spm)							
	• Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi	%	60	48	80	65	55.56	85.48
	• Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan kewirausahaan	%	60	78.49	130.82	65	81.63	125.58
	• Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	40	64.83	162.08	45	49.08	109.07
	• Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	50	89.91	179.82	60	40.63	67.72
	• Besaran Pekerja/buruh yang menjadi program jamsostek.	%	50	64.66	129.32	50	65.05	130.1
	• Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	45	51.27	113.93	50	Pindah Ke Provinsi	0
	• Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan.	%	50	53.01	106.02	55	Pindah Ke Provinsi	0
	• Jumlah wirausahawan baru	Orang	100	100	100	100	320	320
	• Angka pengangguran terbuka	%	9.3	10.37	111.51	9.1	9.12	100.22
<b>Rata-Rata</b>						110.32		126.46

Dari tabel 3.6 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja tahun 2017 untuk sasaran terwujudnya masyarakat yang

berbudaya, berketerampilan dan berjiwa kewirausahaan adalah sebesar 126,46 (**Baik Sekali**), lebih besar dari capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 110.32%.

Pada tahun 2017 ada dua indikator kinerja yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Besaran Pemeriksaan Perusahaan dan Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan.

Pada sasaran terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berketerampilan dan berjiwa kewirausahaan ada dua indikator kinerja yang belum melampaui target yang telah ditetapkan yaitu Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi dan Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB). Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2017 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Permasalahan yang dihadapi pada program peningkatan kesempatan kerja adalah tingginya tingkat pertumbuhan angkatan kerja baru dan arus migrasi masuk sehingga mengakibatkan tidak semua pencari kerja memperoleh pekerjaan dan rendahnya tingkat pendidikan formal mayoritas angkatan kerja di Kabupaten Cirebon sehingga berpengaruh pada produktivitas dan nilai tambah pekerja;
2. Program pendidikan dan pelatihan (training) teknis kompetensi ketenagakerjaan belum sepenuhnya cocok dengan kebutuhan perusahaan, serta masih terkendalanya pelaksanaan kegiatan training menyangkut kurikulum, kebutuhan teknis/instruktur dan anggaran berbanding jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Cirebon.
3. Belum optimalnya program-program yang dapat menginisiasi pembentukan semangat *entrepreneurship* para pada para pekerja dan kalangan remaja dan pemuda;
4. Dalam upaya pengembangan lembaga ketenagakerjaan masih belum optimalnya mekanisme kerja kelembagaan



ketenagakerjaan yaitu Tripartit, Dewan Pengupahan dan Serikat Pekerja/Buruh; dan

5. Sengketa atau perselisihan yang terjadi seringkali tidak memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja melalui mekanisme perjanjian bersama.

Dari permasalahan yang ada berikut ini adalah alternative solusi yang bias ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu :

1. Melakukan kegiatan *job canvassing*, *job fair* dan sosialisasi kepada masyarakat.
2. Perlu adanya sertifikasi kompetensi.
3. Upaya yang perlu dilaksanakan secara langsung oleh Dinas adalah perlu adanya pelatihan *Mobile Training Unit* (MTU) dan pelatihan berbasis kompetensi, serta secara tidak langsung berupa *up grading* pengelolaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) melalui bimbingan teknis kepada Akreditur dan akreditasi LPK itu sendiri. TKI yang telah selesai masa kontrak kerjanya dan kembali ke daerah asal atau purna TKI sering kehilangan sumber pendapatan karena tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Dengan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi purna TKI, setiap peserta dibekali pengetahuan memanfaatkan peluang berwirausaha agar mampu mandiri secara finansial.
4. Solusi yang dilaksanakan adalah memperluas akses informasi pasar kerja, baik kepada penyedia kerja maupun pencari kerja. Selain itu sebagai upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas, Disnakertrans perlu melaksanakan pelatihan bagi tenaga kerja penyandang cacat agar mampu bekerja dengan toleransi kecacatan tertentu.
5. Perlu upaya untuk membuat Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Cirebon.



6. Upaya perbaikan kondisi lembaga ketenagakerjaan yang dilakukan adalah melalui pembinaan terhadap lembaga ketenagakerjaan serta penciptaan hubungan harmonis di antara kelembagaan ketenagakerjaan.
7. Upaya fasilitasi pejabat fungsional pengawas Kenagakerjaan yang ada untuk melaksanakan kegiatan pemilihan pekerja teladan dan penilaian perusahaan terbaik mempekerjakan tenaga kerja perempuan.
8. Perlu meningkatkan pembinaan, koordinasi dan sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja melalui bimbingan teknis, sosialisasi dan seminar tentang ketenagakerjaan.
9. Perlu penambahan pelatihan terhadap pencari kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan wirausaha.
10. Penguatan Balai Latihan Kerja sebagai pusat pelatihan yang lengkap, modern dan inovatif yang mampu mencetak tenaga kerja terampil.

**Tabel 3.7**

**Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai Daerah Wisata Berbasis Budaya**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	%	Target 2017	Realisasi 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	%	10	58.89	588.9	10	14.57	145.57
Rata-Rata					588.9			145.57

Sasaran Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya yang memiliki satu indikator kinerja memiliki capaian kinerja 145.57% (Baik Sekali), capaian ini melebihi target 2017 yang hanya 10%, sedangkan capaian kinerjanya mencapai 145,57%. Capaian tahun ini juga lebih kecil dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 588,9%. Meskipun berhasil melampaui target kinerja dengan sangat baik karena adanya pergeseran destinasi wisata dari Kota Bandung ke Daerah Cirebon serta karena akses jalan tol palikanci yang mendukung aksesibilitas untuk mengunjungi Kabupaten Cirebon serta memudah

mobilitas wisatawan dalam melakukan perjalanan. Namun demikian, terkait dengan masalah ini ada permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon diantaranya adalah :

1. Kurangnya kreativitas manajemen kepariwisataan dalam mengkreasikan program dan even pariwisata di Kabupaten Cirebon;
2. Masih rendahnya dukungan dari pihak pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat terhadap even wisata, budaya dan kesenian yang dilaksanakan di Kabupaten Cirebon.

Menghadapi permasalahan di atas, alternatif pemecahan masalah yang ada adalah sebagai berikut :

1. Mensinergikan dan mengadaptasi kalender even pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Cirebon dengan kalender wisata instansi, badan atau lembaga lain misalnya Kementerian Pariwisata;
2. Mempromosikan kegiatan-kegiatan kepariwisataan, budaya dan kesenian yang ada di Kabupaten Cirebon secara lebih terkordinasi dan lebih massif dalam media informasi yang ada.

**Tabel 3.8**

**Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Kemandirian Peningkatan Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	%	Target 2017	Realisasi 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prestasi olahraga di tingkat Provinsi Jawa Barat	peringkat	9	9	100	14	18	71.43
<b>Rata-rata</b>					100			71.43

Pencapaian rata-rata atas sasaran terwujudnya kemandirian peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga pada tahun 2017 sebesar 71,43 (**cukup**), pencapaian tahun ini lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu yang mencapai 100% dari target. Ukuran peringkat

dalam olahraga adalah untuk even olahraga tingkat Provinsi Jawa Barat yaitu berupa Pekan Olahraga Daerah (PORDA) dan lainnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Cirebon adalah :

1. Terbatasnya utusan pemuda pelopor;
2. Belum adanya pola rekrutmen, pembinaan dan pencarian bibit (*talent scouting*) untuk pembinaan atlet usia dini serta adanya ancaman direkrutnya bibit atlet berbakat Kabupaten Cirebon oleh daerah lain;
3. Masih kurangnya sarana dan prasana yang representatif dan masih kurangnya instruktur untuk cabang olahraga prestasi;
4. Kurangnya komitmen penyedia jasa perbaikan dan pembangunan sarpras olahraga.

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas berikut ini adalah solusi yang ada :

1. Melakukan koordinasi ke seluruh kecamatan agar mengirimkan utusan pemuda pelopor.
2. Membentuk dan membina instruktur cabang olahraga prestasi.
3. Pemberian penghargaan (*reward*) kepada bibit atlet berbakat Kabupaten Cirebon serta melakukan pembinaan secara berkelanjutan.

**Misi Ketiga : Mendorong Pemerataan Pembangunan Tematik/Sektoral dan Kewilayahan Berdasarkan Potensi yang Tersedia**

**Tabel 3.9**

**Target dan Capaian Indikator Sasaran Peningkatan Koneksitas antar Wilayah**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	%	Target 2017	Realisasi 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	551.44	531.57	96.40	594.44	548.49	92.27



No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	%	Target 2017	Realisasi 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Jumlah panjang ruas jalan poros desa dalam kondisi baik	Km	389.91	394.83	101.26	419.91	430.46	102.51
<b>Rata-Rata</b>					98.83			97.39

Koneksitas antar wilayah menjadi salah satu bagian penting untuk kelancaran distribusi barang, jasa dan mobilisasi orang. Koneksitas wilayah akan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Berdasarkan rata-rata hasil pencapaian target indikator kinerja tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah panjang jalan Kabupaten Cirebon dalam kondisi mantap mencapai 92,27% (**Baik**).

Hasil pencapaian ini masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Sementara, hasil ini lebih kecil dari rata-rata capaian tahun 2016 sebesar 98,83% (**baik**). Ketidaktercapaian target kinerja tahun 2017 disebabkan oleh beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah :

1. Pertumbuhan prosentase kendaraan yang kurang terkendali dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan dan kompetisi global;
2. Masih Kurangnya Kesadaran para pengguna jalan terutama kendaraan berat yang melebihi tonase yang mengakibatkan cepatnya tingkat kerusakan jalan;
3. Luas wilayah dan banyaknya ruas jalan yang tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon;
4. Adanya di wilayah tertentu yang kondisi tanah dasarnya labil; dan
5. Kebiasaan buruk masyarakat yang membuang limbah cair ke area jalan.

Untuk mengatasi masalah ini ada beberapa pemecahan masalah atau solusi adalah



1. Mengoptimalkan Potensi yang ada untuk infrastruktur jalan yang pada setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan penajaman Data skala prioritas penanganan jalan dan melakukan peningkatan jalan dan pemeliharaan periodik jalan secara berkesinambungan;
2. Melakukan Koordinasi dengan Dinas/Instansi Terkait;
3. Mengoptimalkan Unit Pelayanan Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dinas untuk mengatasi Luas wilayah dan banyaknya ruas jalan yang tersebar diwilayah Kabupaten Cirebon; dan
4. Memanfaatkan teknologi kontruksi yang ada seperti penggunaan teknologi betonisasi (*rigid pavement*) pada ruas-ruas jalan tertentu.

**Tabel 3.10**

**Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Pembangunan Prasarana Wilayah yang Memadai**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	%	Target 2017	Realisasi 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jaringan Irigasi							
	• Panjang Saluran Induk	Km	63.772	60.653	95.11	68.548	148.813	217.09
	• Panjang Saluran Sekunder	Km	32.866	3.644	93.24	35.065	22.972	65.51
	• Bangunan Jaringan Irigasi	Km	60	58	133.14	70	77	110
2	Jumlah rumah tangga berakses air minum untuk keperluan sehari-hari	Rumah tangga	102.1	135.935	133.14	118.620	477.365	402
3	Jumlah daerah rawan banjir	Kec.	6	6	100	4	6	50
4	Persentase pengangkutan sampah	%	37	21	56.76	42	37.00	88.1
5	Persentase penduduk yg terlayani sistem jaringan drainase Skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	%	35	52.88	151.09	40	39.00	97.5
6	Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan persampahan)	%	36	22	61.11	33	22.00	66.67
7	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	71	73	102.82	75	96.05	128.07
8	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (pos jaga)	Pos jaga	10	9	90.00	12	12	100
<b>Rata-Rata</b>						101.64		142.54

Dari hasil pencapaian indikator kinerja di atas, rata-rata capaian indikator kinerja Sasaran Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai adalah sebesar 142,54% (**baik sekali**) sehingga pencapaian ini melebihi capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 101,64%, sementara untuk pencapaian terkecil adalah indikator pengurangan sampah perkotaan, hal ini menjadi perhatian pihak Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Meskipun secara rata-rata pencapaian indikator kinerja ini sangat baik, di bawah ini adalah permasalahan dan solusi yang dihadapi :

1. Menurunnya fungsi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap, sehingga diperlukan perencanaan SDA secara terpadu dan berkelanjutan yang sesuai dengan tingkat kerusakan serta melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap;
2. Kurangnya informasi dalam data base irigasi, maka perlu diadakan pembuatan data base secara menyeluruh dan update data base secara kontinyu;
3. Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah, sehingga diperlukan upaya konservasi SDA dengan mengadakan penanaman pohon disekitar wilayah aliran sungai;
4. Kurangnya pemahaman SDM dalam penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Operasional dan Pemeliharaan (AKNOP), sehingga perlu dilakukan pendidikan dan bimbingan teknis terhadap juru dan petugas pintu air;
5. Meningkatnya daya rusak air, maka perlu dilakukan upaya preventif/ pencegahan dengan mengadakan konservasi SDA; mengadakan pembangunan cekdam dan bendung yang dapat mengendalikan serta mengatur aliran sungai untuk kepentingan irigasi; dan mewujudkan pengadaan bahan banjir seperti sand bag dan kawat bronjong untuk antisipasi penanganan darurat

- pada daerah irigasi yang terkena banjir serta upaya represive/penanganan dengan mengadakan pembangunan tebing saluran dan sarana dan prasarana pada saluran yang longsor akibat bencana maupun pembangunan saluran pembuang guna mengatasi genangan banjir;
6. Masih rendahnya partisipasi himpunan petani pemakai air terhadap pemeliharaan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapannya, maka perlu dilakukan pembinaan kelembagaan himpunan petani pemakai air agar memiliki kepedulian untuk memelihara jaringan irigasi serta kemampuan teknis untuk melakukan perbaikan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapannya;
  7. Dengan terjadinya anomali cuaca, maka perlu dilakukan review Rencana Tata Tanam Global serta optimalisasi pemanfaatan embung yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon;
  8. Terbatasnya sarana dan prasarana angkutan sampah dalam melayani wilayah pelayanan kebersihan yang cukup luas sehingga perlu adanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan dan Persampahan;
  9. Luasnya cakupan daerah pelayanan pengangkutan persampahan (kebersihan), sehingga perlu mengoptimalkan sumber daya yang ada (sarana dan prasarana, SDM dan anggaran) serta mendorong terciptanya upaya pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat (TPST 3R, Bank Sampah, Komposter Multy Drum).
  10. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya (3R; *reuse, reduce and recyle*), sehingga perlu didorong dan difasilitasi terbentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola sampah sebagai kader lingkungan di masyarakat.
  11. Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya, maka perlu mengoptimalkan kegiatan



sosialisasi/*sharing*/diskusi tentang pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat sehingga terbentuk paradigma baru tentang pengelolaan sampah sebagai amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

12. Masih kurang pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan kondisi rumah dan lingkungan yang rawan bencana kebakaran dan hubungan singkat listrik.

**Tabel 3.11**  
**Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Cirebon yang Bersih, Asri dan Lestari**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	%	Target 2017	Realisasi 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri	Kelompok	8	9	112,5	8	8	100
2	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kec.	10	5	50	20	20	100
3	Prosentase kawasan lindung	%	30	2,43	0,38	30	2,43	8,1
4	Penghargaan Adipura	Kali	1	0	0	1	1	100
5	Jumlah sungai yang memenuhi kualitas baku mutu air	Sungai	5	4	80	5	5	100
6	Jumlah industri yang memenuhi kualitas baku mutu udara	Industri	10	8	80	15	15	100
7	Jumlah pengaduan kasus dugaan terjadinya pencemaran lingkungan	Aduan	12	12	100	12	12	100
<b>Rata-Rata</b>					60,41			86,67

Capaian rata-rata atas sasaran terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari tahun 2017 adalah sebesar 86,67% (**baik**) capaian ini lebih baik dari tahun 2016 yaitu 60,41%, meskipun masih di bawah target kinerja 2017, dan capaian terkecil didapat oleh indikator prosentase kawasan hutan lindung yang hanya mencapai 8,1% (**kurang**).

Permasalahan dan solusi berkaitan dengan sasaran terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari adalah :

1. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan, upaya yang dilakukan dengan sosialisasi dan



pembinaan secara terus menerus dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan lingkungan.

2. Masih kurangnya sarana pengelolaan sampah, maka ke depan diharapkan adanya penambahan sarana pengelolaan sampah.
3. Para pelaku usaha dan masyarakat masih belum sepenuhnya mengerti tentang kewajiban memiliki dokumen lingkungan, maka perlu ditingkatkan upaya sosialisasi kepada pihak yang berkompeten.
4. Tingginya kerusakan lingkungan sehingga jumlah lahan yang perlu dikonservasi sangat luas, hal ini tidak sebanding dengan jumlah pengadaan bibit yang ada, upaya yang dilakukan dengan kegiatan konservasi secara berkelanjutan.
5. Pelaksanaan penanaman pohon tergantung pada musim penghujan dan letak lokasi sumber mata air mayoritas jauh, maka penanaman dilakukan pada musim hujan menghindari resiko mati dan bantuan bibitnya (ukuran bibit) disesuaikan dengan jenis dan lokasi.
6. Peran serta kesadaran dari dunia usaha masih rendah dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam hal pelaksanaan penanaman pohon, manfaat dan kegunaannya, maka dilakukan kerjasama dengan masyarakat melalui perangkat desa dan dunia usaha untuk melaksanakan penanaman pohon sehingga diharapkan semua pihak ikut berperan dan merasa memiliki serta bertanggungjawab.
7. Informasi yang meliputi seluruh data yang terkait dengan kondisi lingkungan hidup belum sepenuhnya terpenuhi secara lengkap baik dari Kecamatan ataupun dari SKPD terkait, sehingga perlu diadakannya koordinasi yang lebih intensif terkait dengan pengumpulan informasi data dari pihak Kecamatan maupun SKPD terkait dalam mendukung

tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Cirebon.

8. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap RTH serta kurangnya lahan sebagai RTH di perkotaan, maka perlu adanya regulasi tentang RTH di perkotaan dan pembinaan dan himbauan tentang RTH.

**Misi Keempat : Menciptakan Sinergi Pembangunan Secara Menyeluruh Antar Berbagai Pemangku Kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha, Akademik Dan Komunitas)**

**Tabel 3.12**  
**Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	%	Target 2017	Realisasi 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah komunitas	Komunitas	75	122	162.67	85	122	162.67
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	75	206	274.67	85	206	274.67
3	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan	Lembaga	84	112	133.33	254	112	133.33
Rata-Rata					190.22			190.22

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebesar 190,22 (**baik sekali**). Hal ini disebabkan revitalisasi dan peran serta PKK, pendamping desa, dan pembentukan komunitas dalam masyarakat.

Meskipun pencapaian target pada sasaran ini telah tercapai akan tetapi masih ada permasalahan yang dihadapi dalam kelembagan/institusional desa, diantaranya adalah :

1. Masih belum terpenuhinya komitmen dan kesepakatan bersama antara kepala desa dan perangkat desa untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga perlu untuk meningkatkan kapasitas individu maupun organisasi;

2. Belum berubahnya etos dan kedisiplinan kerja perangkat desa, sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan secara terus menerus dan sistematis dalam mengangkat kapasitas sekretaris desa khususnya tentang perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, penyusunan kebijakan desa, kepemimpinan desa, manajemen pelayanan desa dan pengambilan keputusan, serta diperlukan pengawasan secara melekat dari pihak kecamatan;
3. Pengurus LPMD/K masih belum maksimal memahami tugas pokok dan fungsinya, sehingga perlu dilakukan pembekalan dan pelatihan bagi pengurus LPMD/K;
4. Belum terbentuknya lembaga ekonomi secara menyeluruh di tiap-tiap desa yang berguna untuk meningkatkan PADes, sehingga perlu pendirian BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa;
5. Masih kurang optimalnya sumber daya manusia dalam pengurusan dan pengelolaan pasar desa, sehingga perlu adanya pelatihan bagi pengurus pasar desa;

**Misi Kelima : Mewujudkan Standar Hidup Layak Masyarakat Melalui Pemenuhan Hak-Hak Dasar Terutama Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Penciptaan Rasa Aman, Damai dan Tenteram.**

**Tabel 3.13**

**Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kondisi Perekonomian Masyarakat**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	%	Target 2017	Realisasi 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai PDRB	Rp (000)	10.972.236	28.821.657	262.68	11.559.249	29.148.228	252.16
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5.4	4.68	86.67	5.45	5.62	103.12
3	PDRB per kapita	Rp	16.210.302	16.470.366	101.60	17.811.979	18.287.696	102.67
4	Tingkat inflasi	%	3.5-4.5	4.15	92.22	3.5-4.5	4.15	92.22
5	Jumlah daerah rawan pangan	Desa	10	9	90.00	9	9	100
6	Nilai investasi	Rp (Juta)	981.171	698.246	71.16	1.128.347	846.160	75
7	Persentase koperasi aktif	%	91	89.67	98.54	94	89.67	100



No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	%	Target 2017	Realisasi 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Jumlah lokasi wisata kuliner di kecamatan	Lokasi	8	4	50.00	8	4	50
<b>Rata-Rata</b>					106.61			109.4

Dari tabel di atas tergambar kondisi indikator makro perekonomian Kabupaten Cirebon, indikator kinerja di atas merupakan indikator untuk sasaran terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat, dari tabel di atas secara umum kondisi perekonomian kabupaten Cirebon mengalami peningkatan, hal ini terindikasi dari capaian kinerja tahun 2017 yang memiliki rata-rata 109,4% (Baik Sekali), lebih baik dari capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 106.61%.

Ada tiga indikator kinerja yang masih belum mencapai target 2017, yaitu tingkat inflasi, nilai investasi dan jumlah lokasi wisata kuliner, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan intansi baik daerah maupun pusat.

Beberapa permasalahan dan solusi antara lain :

1. Pelaksanaan pameran promosi investasi dan pariwisata belum didukung oleh sumber daya manusia yang professional serta belum terintegrasi dengan even investasi dan pariwisata dalam skala yang lebih besar;
2. Tingkat inflasi masih dipengaruhi oleh factor-faktor yang berasal dari luar daerah, dan beberapa komoditas memang sangat dipengaruhi oleh faktor ini, oleh sebab itu Tim Pengendali Inflasi Daerah belum berjalan secara optimal dan diperlukan sumber data perubahan jumlah dan harga komoditas pemengaruh nilai inflasi yang paling signifikan;
3. Lokasi produk unggulan daerah yang menjadi potensi ekonomi tersebar di 40 kecamatan, sehingga dalam pelaksanaan perlu dilakukan penjadwalan secara tertib.



4. Masih minimnya perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), sehingga perlu ditingkatkan koordinasi yang optimal dengan instansi terkait.

**Tabel 3.14**

**Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Lebih Berkualitas**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	%	Target 2017	Realisasi 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menurunnya Jumlah penduduk miskin	%	13.06	14.41	89.66	12.59	13.49	92.85
2	Meningkatnya cakupan listrik bagi penduduk	%	100	85.20	85.20	100	85.20	85.2
<b>Rata-Rata</b>					87.43			89,03

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja untuk sasaran terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas menunjukkan kenaikan sebesar 89.03 (**Baik**), lebih baik dari capaian tahun 2016 yang sebesar 87.43%.

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja sasaran terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas ini adalah :

1. Permasalahan struktur, artinya bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon masih belum optimal dan menunjukkan hasil capaian yang menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, hal ini dikarenakan kemungkinan adanya kelemahan dalam proses perencanaan dan keterbatasan sumber daya/anggaran untuk bisa menginisiasi dan mengintervensi program dan kegiatan yang mampu menurunkan angka kemiskinan yang signifikan.
2. Kemiskinan juga berhubungan dengan tingkat pendidikan masyarakat sehingga diperlukan program dan kegiatan kolaboratif yang mampu menekan angka kemiskinan;

3. Selain itu, masalah kemiskinan juga berhubungan dengan laju pertumbuhan penduduk dan jumlah angkatan kerja, tingkat pengangguran di daerah, maka perlu sinergitas antar beberapa stakeholder dan pengambil keputusan untuk bekerja sama lintas sektoral sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan.

Berkaitan dengan masalah di atas ada beberapa solusi yaitu :

1. Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar;
2. Memberikan subsidi pada kebutuhan pokok manusia, sehingga setiap masyarakat bisa menikmati makanan yang berkualitas. Hal ini berdampak pada meningkatnya angka kesehatan masyarakat;
3. Meminimalisasi maladministrasi dan praktek administrasi public yang tidak sehat, karena kedua hal tersebut merupakan penyebab layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga negara sebagaimana mestinya;
4. Mendorong program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan filantropi seperti zakat infaq dan shodaqoh untuk menumbuhkan pemerataan kesejahteraan di antara masyarakat dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin. Potensi zakat di Indonesia, ditengarai mencapai angka 1 triliun setiap tahunnya. Dan jika bisa dikelola dengan baik akan menjadi potensi besar bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat;
5. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras.

6. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar;
7. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin :
  - a. Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah;
  - b. Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus;
  - c. Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat;
8. Selain yang diatas terdapat 4 strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:
  - a. Menyempurnakan program perlindungan social;
  - b. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar;
  - c. Pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. Pembangunan yang inklusif.

**Misi Keenam : Mewujudkan Tatanan Masyarakat dan Reformasi Sistem Birokrasi Menuju Sistem Berbangsa dan Bernegara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)**

**Tabel 3.15**

**Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	%	Target 2017	Realisasi 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.88	3.00	77.82	4.00	3.88	97
2	Jumlah unit pelayanan	Unit	6	6	100	7	7	100



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	%	Target 2017	Realisasi 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	yang melaksanakan SOP dan SPM							
3	Kecamatan yang menjalankan Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)	Kec.	10	10	100	20	10	50
<b>Rata-Rata</b>					92.61			82.33

Pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya pelayanan publik yang prima sebagaimana tercantum pada tabel di atas, belum sepenuhnya mencapai target kinerja yang ditetapkan, rata-rata capaian kinerja yang dicapai adalah 82.33% (**Baik**), hal ini lebih rendah dari capaian kinerja tahun 2016 yang menunjukkan angka 92.61% (**Baik**), capaian terkecil dicapai oleh Indikator Kinerja Kecamatan yang menjalankan Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (PATEN) yang mencapai 50% (Kurang), hal ini disebabkan oleh target yang ditetapkan berjumlah dua kali lipat dari target tahun sebelumnya, akan tetapi realisasi capaian kerjanya masih sama dengan tahun sebelumnya.

Berkaitan dengan kondisi di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh ASN kabupaten Cirebon, sehingga nilai IKM yang dicapai masih belum mencapai target yang ditetapkan;
2. Beberapa SKPD masih belum mengacu pada Standar Pelayanan Minimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga beberapa jenis pelayanan masih belum memenuhi prasyarat minimal yang harus dicapai;
3. Program PATEN yang harus diterapkan di tiap kecamatan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sehingga diperlukan alokasi anggaran yang lebih besar untuk menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang bertugas untuk memberikan pelayanan, sementara di satu sisi keterbatasan



anggaran dan sumber daya manusia menjadikan program ini belum berjalan secara optimal;

4. Budaya masyarakat yang guyub dan gotong royong seringkali tidak sesuai dengan budaya profesionalisme ASN, masyarakat seringkali mengungkapkan cara terima kasih yang kadang belum sesuai dengan peraturan dan kode etik ASN.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, berikut ini adalah beberapa solusi yang ditawarkan yaitu :

1. Optimilisasi dan revitalisasi pelayanan publik pada masyarakat melalui program dan kegiatan yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
2. Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan *standard operating procedure* (SOP) bagi setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon baik yang memiliki fungsi pelayanan mikro dan makro, langsung dan tidak langsung kepada masyarakat;
3. Pelayanan PATEN diharapkan diprioritaskan dalam proses perencanaan dan penganggaran di tahun-tahun yang akan datang, sehingga diharapkan lebih dari separuh jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon telah menerapkan Paten.

**Tabel 3.16**

**Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	%	Target 2017	Realisasi 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai	%	2.4	2.8	116.67	3.10	3.00	96.77
2	Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi/ latar pendidikan	%	85	90	101.41	95	69	72.63
Rata- Rata					109.04			84.70

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja sasaran meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah, mencapai rata-rata 84.70% (**Baik**), lebih kecil dari capaian tahun 2016 yang sebesar 109.04% (**Baik Sekali**).

Ketidaktercapaian indikator kinerja Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai disebabkan oleh belum mencukupinya anggaran untuk pendidikan formal strata 2 (S2), sehingga jumlah peserta tugas belajar jenjang pendidikan pascasarjana mengalami penurunan, ketidaktercapaian rasio ini juga disebabkan jumlah ASN yang berpendidikan S2 memasuki batas usia pensiun (BUP) dan moratorium pengadaan PNS di Kabupaten Cirebon.

Sementara untuk indikator kedua pada sasaran di atas yaitu indikator Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi/ latar pendidikan disebabkan oleh kesenjangan antara kompetensi yang dipersyaratkan dengan jumlah ASN yang masih jauh dari mencukupi dan belum pada jumlah yang ideal. Permasalahan ini juga disebabkan oleh lebih banyak jumlah kotak jabatan daripada jumlah PNS yang ada, sehingga penempatan masih belum sesuai dengan kompetensi yang ada.

Atas kedua permasalahan di atas, beberapa solusi yang bisa ditawarkan :

1. Meningkatkan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk meningkatkan jenjang pendidikan formal bagi ASN Kabupaten Cirebon sesuai dengan target dan sasaran yang ada pada RPJMD 2014-2019;
2. Melakukan profiling, pemetaan dan evaluasi berkenaan dengan kompetensi yang dibutuhkan dan kompetensi yang dimiliki pegawai, kesenjangan (*gap*) yang ada nantinya dijadikan bahan dalam penyusunan analisis kebutuhan diklat.
3. Mengajukan usulan rekrutmen atau pengadaan PNS untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga jumlah ASN yang

ada mendekati angka ideal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas administratif dan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.

**Tabel 3.17**

**Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	%	Target 2017	Realisasi 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rata-rata capaian kinerja SKPD	%	55.6	55	98.92	60-70	65	108.33
2	Penilaian RAD Pencegahan Penanggulangan Korupsi (PPK)	Angka/Huruf	51-75	75/Baik	100	51-75	75	100.00
3	Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal	%	3	0	0	4	0	0
4	Peningkatan Pendapatan asli daerah	%	15	9.52	63.47	15	35.41	236.07
<b>Rata-Rata</b>					65.6			111.1

Peningkatan rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya tata pemerintahan yang baik dan bersih seperti pada tabel di atas adalah 111.1% (Baik Sekali), realisasi capaian kinerja tahun ini lebih baik dari tahun 2016 yaitu 65.6% (**Cukup**).

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan tata pemerintah yang baik dan bersih adalah

1. Masih rendahnya disiplin dan kinerja pegawai, antara lain, disebabkan oleh masih lemahnya fungsi pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintahan, belum sepenuhnya diterapkan sistem karier berdasarkan prestasi kerja, gaji yang belum memadai untuk hidup layak;
2. Pendidikan dan pelatihan (diklat) belum sepenuhnya dapat meningkatkan mutu kinerja;
3. Belum diterapkannya standar mutu pelayanan publik secara konsisten, belum memadainya sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*) dalam pemberian pelayanan, dan belum sepenuhnya diterapkan akuntabilitas kinerja;



4. ASN Kabupaten Cirebon masih belum dapat memenuhi harapan masyarakat dalam dapat memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, transparan, dan tidak diskriminatif;
5. Masih adanya struktur organisasi instansi pemerintahan yang masih cenderung kaya struktur dan miskin fungsi. Artinya, pembentukan unit-unit kerja struktural cenderung kurang proporsional dan efisien, serta kurang memberi peluang diterapkannya jabatan-jabatan fungsional yang relevan;
6. Masih lemahnya sinkronisasi tata hubungan kerja antara kementerian/ lembaga dan instansi pemerintah daerah, lemahnya sistem dan prosedur dalam melaksanakan manajemen instansi pemerintahan, serta masih lemahnya pengelolaan dokumen dan kearsipan negara;
7. Semua permasalahan tersebut terutama disebabkan oleh belum dilaksanakannya fungsi-fungsi manajemen di lingkungan instansi pemerintahan secara benar dan konsisten.

Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan diupayakan bersifat terobosan dan melanjutkan hal-hal yang relevan yang telah dilakukan.

1. Meminimalisasi praktek maladministrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui:
  - a. penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan kegiatan instansi pemerintahan;
  - b. pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. peningkatan efektivitas pengawasan melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat serta tindak lanjut atas hasil pengawasan;
  - d. pembangunan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif, dan bertanggung jawab;



- e. peningkatan pemberdayaan dan sinergi penyelenggara negara, dunia usaha, dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah melalui :
    - a. penataan kembali kelembagaan pemerintahan daerah agar dapat berfungsi secara lebih efektif dan responsif dengan struktur yang lebih proporsional dan efisien;
    - b. peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan, termasuk prosedur kerja pada tingkatan dan kegiatan instansi pemerintahan daerah;
    - c. penataan dan peningkatan kapasitas pegawai agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Cirebon;
    - d. peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi; dalam hal ini, terus dilakukan upaya peningkatan gaji pegawai secara proporsional, adil, dan layak;
    - e. optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan *e-government* dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.
  3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon, antara lain, melalui:
    - a. peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan dasar, pelayanan umum, dan pelayanan unggulan;
    - b. peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan mengawasi pelaksanaan aparatur pemerintahan, termasuk kinerja pelayanan publik;

peningkatan transparansi, partisipasi, dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

## **2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Sampai dengan Akhir Periode RPJMD**

Kemajuan pencapaian target jangka menengah adalah kemajuan pencapaian target kinerja tiap-tiap indikator kinerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD, sedangkan Capaian Kinerja jangka menengah adalah tahapan membandingkan antara Realisasi **sampai dengan** Tahun 2017 dibandingkan target lima tahunan.

Capaian kinerja jangka menengah yang merupakan tingkat kemajuan pencapaian target jangka menengah sebagai berikut:



No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian Kinerja 2016			% Capaian Kinerja 2017			% Capaian Kinerja RPJMD		
					Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja 2017	Target RPJMD 2014-2019	Realisasi s/d 2017	% Capaian Kinerja RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I	Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama	a. angka Melek Huruf Al-Quran lulusan SD/MD	%	46	43.67	95	54	54.78	101.44	300	140.05	46.68
			b. angka Melek Huruf Al-Quran lulusan SMP	%	54	56.85	105	61	61.89	101.46	345	170.44	49.4
			c. angka Melek Huruf Al-Quran lulusan SMA	%	59	52.37	89	66	66.96	101.46	375	177.5	47.33
			d. angka Melek Huruf Al-Quran lulusan SMK	%	59	60.25	102	66	66.96	101.46	375	174.21	46.46
			e. jumlah siswa yang hafal jus'amma pada pendidikan SLTP dan SLTA	%	5	5	100	5	5	100	25	15	60
			f. jumlah DKM yang menyelenggarakan kegiatan ba'da magrib mengaji	DKM	424	424	100	424	753	177.6	424	1177	277.6
			g. jumlah penghafal Quran	orang	914	167	18	831	173	20.82	5071	991	19.54
			h. prestasi lomba keagamaan tingkat Propinsi Jawa Barat	peringkat	lima besar	13 besar	38	5	14	80	lima besar	15 besar	15 besar
			i. jumlah kasus konflik yang bernuansa agama	kasus	5	0	0	5	0	200	6	2	33.33
			2	II	1. Terwujudnya pelayanan pendidikan untuk semua	a. peningkatan indeks pendidikan	%	81.67 - 82.93	54.88	66.17	83.00-84.27	54.88	66.12
b. Angka Melek Huruf (AMH) pada penduduk usia 15 tahun keatas	%	94.63				94.77	100.14	95	95	100	94.26	189.42	200.96
c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	7.52				6.41	85.24	7.69	7.9	102.73	7.35	14.29	194.42
d. Angka Partisipasi Kasar (APK)													
- SD/MI	%	118				107.33	90.96	122	109.31	89.6	114	216.64	190.04
- SMP/MTs	%	110.31				90.66	82.19	110.21	97.18	88.18	110.41	190.53	172.57
- SMA/MA	%	80.02				75.39	94.21	80.05	75.9	94.81	79.54	172.41	216.76
e. Angka Partisipasi Murni (APM)													
- SD/MI	%	99.93				96.47	96.54	99.94	96.28	96.38	99.92	194.5	194.66
- SMP/MTs	%	89.9				78.05	86.82	90.1	74.81	96.34	89.7	153.32	170.93
			- SMA/MA	%	61.32	37.39	60.98	61.8	52.54	85.02	60.84	113.57	186.67
			- SMK	%	47.45	71.41	150.5	47.95	71.41	148.93	46.95	137.05	291.91
			f. Rasio ketersediaan sekolah										

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian Kinerja 2016			% Capaian Kinerja 2017			% Capaian Kinerja RPJMD		
					Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja 2017	Target RPJMD 2014-2019	Realisasi s/d 2017	% Capaian Kinerja RPJMD
			terhadap jumlah penduduk per usia tingkatan sekolah										
			- SD	%	49	49	100	49	49	100	48	98	204.17
			- SMP	%	18	18	100	19	18	94.74	18	36	200
			- SMA/SMK	%	20	20	100	21	20	95.24	19	39	205.26
		2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	a. Angka Harapan Hidup (AHH)	tahun	66.12	71.41	108.8	66.25	66.25	100	65.98	208.13	315.44
			b. Ratio kematian ibu	point	90.61	100.42	110.83	85.38	84.01	101.61	95.92	295.93	308.52
			c. Ratio kematian bayi	point	4.06	4.38	107.88	3.96	3.99	99.24	4.17	12.79	306.72
			d. Balita gizi buruk	%	0.97	1.09	112.37	0.85	0.13	184.71	1.09	1.31	120.18
			e. Cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar	orang	1.345.865	1.345.865	100	1,345,865	1,365,085	101.43	1345865		
			f. Rasio rumah sakit per satuan penduduk	%	0.054	0.054	100	0.054	0.054	100	0.055	0.112	203.64
			g. Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	%	0.055	0.055	100	0.055	0.08	145.46	0.027	0.2	740.74
			h. Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan	unit	57	57	100	57	57	100	57	114	200
			i. Rasio dokter terhadap penduduk	%	1.14	1.14	100	0.139	0.216	155.4	0.142	1,261	888180.3
			j. Rasio paramedis terhadap penduduk	%	1,485	1,485	100	1,516	1,682	110.73	1,457	2,833	194.44
			k. presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	orang	1.345.000	1.345.000	100	1,345,000	1,345,000	100	1345000	2690000	200
			l. Jumlah Posyandu Purnama	unit	538	538	100	615	999	162.44	769	1627	211.5735
		3. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berkepribadian, dan berjiwa kewirausahaan	a. Jumlah kawasan seni	kawasan	0	0	0	1	0	0	-	0	#VALUE!
			b. Jumlah pertunjukan/pagelaran/festival budaya tingkat nasional	kali	1	1	100	1	1	100	-	3	0
			c. Cakupan peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (SPM)										
			- Besaran Tenaga Kerja yang	%	60	48	80	65	55.56	85.48	55	150.05	272.82



No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian Kinerja 2016			% Capaian Kinerja 2017			% Capaian Kinerja RPJMD		
					Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja 2017	Target RPJMD 2014-2019	Realisasi s/d 2017	% Capaian Kinerja RPJMD
			mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi										
			- Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan kewirausahaan	%	60	78.49	130.82	65	81.63	125.58	55	234.48	426.33
			- Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	40	64.83	162.08	45	49.08	109.07	35	166.41	475.46
			- Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	50	89.91	179.82	60	40.63	67.72	45	216.25	480.56
			- Besaran Pekerja/buruh yang menjadi program jamsostek.	%	50	64.66	129.32	50	65.05	130.1	45	184.73	410.51
			- Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	45	51.27	113.93	50	Pindah Ke Provinsi		40		
			- Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan.	%	50	53.01	106.02	55	Pindah Ke Provinsi		45		
			d. Jumlah wirausahawan baru	orang	100	100	100	100	320	320	500	520	104
			e. Angka pengangguran terbuka	%	9.3	10.37	111.51	9.1	9.12	100.22	9.5	29.98	315.58
		4. Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya	a. Meningkatnya kunjungan wisatawan	%	10	58.89	588.9	10	85.57	855.7	50	191.62	383.24
		5. Terwujudnya peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga	a. Prestasi olah raga di tingkat provinsi Jawa Barat	Peringkat	9	9	100	14	18	71.43	-	27	0
	III	1. Peningkatan koneksitas antar wilayah	a. Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Kilometer	551.44	531.57	96.4	594.44	548.49	92.27	509.14	1080.06	212.13
			b. Jumlah panjang ruas jalan poros desa dalam kondisi baik	Kilometer	389.91	394.83	101.26	419.91	430.46	102.51	359.91	825.29	229.31
		2. Terwujudnya pembangunan	a. Jaringan irigasi										
			- Panjang saluran induk	Kilometer	63,772	60,653	95.11	68,548	148,813	217.09	58,995	209,46	355.06

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian Kinerja 2016			% Capaian Kinerja 2017			% Capaian Kinerja RPJMD		
					Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja 2017	Target RPJMD 2014-2019	Realisasi s/d 2017	% Capaian Kinerja RPJMD
		prasarana wilayah yang memadai									6		
			- Panjang saluran sekunder	Kilometer	32,866	30,644	93.24	35,065	22,972	65.51	30,666	53,616	174.84
			- Bangunan jaringan irigasi	%	60	58	96.67	70	77	110	50	135	270
			b. Jumlah rumah tangga berakses air minum untuk keperluan sehari-hari	rumah tangga	102.1	135,935	133.14	118.62	477,365	402	84,400	725,976	860.16
			c. Jumlah daerah rawan banjir	Kecamatan	6	6	100	4	6	50	8	13	162.5
			d. Prosentase pengangkutan sampah	%	37	21	56.76	42	37	88.1	32	73	228.125
			e. Persentase penduduk yg terlayani sistem jaringan drainase Skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm. selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	%	35	52.88	151.09	40	39	97.5	150	138.3	92.2
			f. Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan persampahan)	%	36	22	61.11	33	22	66.67	39	64	164.1
			g. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	71	73	102.82	75	96.05	128.07	67	244.05	364.25
			h. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (pos jaga)	Pos jaga	10	9	90	12	12	100	9	21	233.33
		3. Terwujudnya Cirebon yang bersih. Asri dan lestari	a. Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri	Kelompok	8	9	112.5	8	8	100	42	28	66.67
			b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kecamatan	10	5	50	20	20	100	40	32	80
			c. Prosentase kawasan lindung	%	30	2.43	0.38	30	2.43	8.1	30	7.29	24.3
			d. Penghargaan Adipura	kali	1	0	0	1	1	100	5	1	20
			e. Jumlah sungai yang memenuhi kualitas baku mutu air	sungai	5	4	80	5	5	100	25	13	52
			f. Jumlah industri yang memenuhi kualitas baku mutu udara	industri	10	8	80	15	15	100	75	25	33.33
			g. Jumlah pengaduan kasus	pengadua	12	12	100	12	12	100	60	36	60

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian Kinerja 2016			% Capaian Kinerja 2017			% Capaian Kinerja RPJMD		
					Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja 2017	Target RPJMD 2014-2019	Realisasi s/d 2017	% Capaian Kinerja RPJMD
			dugaan terjadinya pencemaran lingkungan	n									
	IV	1. Terwujudnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	a. Jumlah komunitas	komunitas	75	122	162.67	85	122	162.67	424	266	62.73585
			b. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	75	206	274.67	85	206	274.67	424	618	145.76
			c. Jumlah lembaga ekonomi pedesaan	lembaga	84	112	133.33	254	112	133.33	424	308	72.64
	V	1. Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	a. Nilai PDRB	Rp (dml juta)	##### ###	28.821.657	262.68	##### ###	#####	252.16	10,419,976		
			b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5.4	4.68	86.67	5.45	5.62	103.12	5.35	15.47	289.16
			c. PDRB per kapita	Rp	##### ###	16.470.366	101.6	##### ###	#####	102.67	14,765,489	#VALUE!	#VALUE!
			d. Tingkat Inflasi	%	3.5-4.5	4.15	92.22	3.5-4.5	4.15	92.22	3.5-4.5	8.3	#VALUE!
			e. Jumlah Daerah rawan pangan	desa	10	9	90	9	9	100	45	18	40
			f. Nilai Investasi	Rp (dml juta)	981.171	698.246	71.16	1,128,347	846.16	75	853,192	1544.406	0.18
			g. Prosentase Koperasi aktif	%	91	89.67	98.54	94	89.67	100	88.42	179.34	202.83
			h. Jumlah lokasi wisata kuliner di kecamatan	lokasi	8	4	50	8	4	50	40	12	30
		2. Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	a. Menurunnya jumlah penduduk miskin	%	13.06	14.41	110.34	12.59			11.65	14.41	123.69
			b. meningkatnya cakupan listrik bagi penduduk	%	100	85.2	85.2	100			100	92.5	92.5
	VI	1. Terwujudnya pelayanan publik yang prima	a. Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	3.88	3	77.32	4	3.88	97	4.25	7.39	173.88
			b. Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan SOP dan SPM	unit	6	6	100	7	7	100	30	19	63.33
			c. Kecamatan yang menjalankan Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)	Kecamatan	10	10	100	20	10	50	40	35	87.5

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian Kinerja 2016			% Capaian Kinerja 2017			% Capaian Kinerja RPJMD		
					Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja 2017	Target RPJMD 2014-2019	Realisasi s/d 2017	% Capaian Kinerja RPJMD
		2. Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	a. Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai	%	2.8	2.8	100	3.1	3	96.77	2.93	5.8	197.95
			b. Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi/ latar pendidikan	%	90	90	100	95	69	72.63	100	159	159
		3. Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih	a. Rata-rata capaian kinerja SKPD	%	55.6	55	98.92	60-70	65		50-55	120	#VALUE!
			b. Penilaian RAD Pencegahan Penanggulangan Korupsi (PPK)	%	51-75	75 /Baik	100	51-75	75		Baik		
			c. Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal	%	3	0	0	0	0		5	2	40
			d. Peningkatan Pendapatan asli daerah	%	15	61.5	410	0			15	61.5	410





## B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan Berpedoman pada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014–2019 diarahkan kepada :

- a. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
- b. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja;
- c. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional;
- d. Meningkatkan peranserta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut di atas, maka kebijakan umum keuangan/anggaran RPJMD Kabupaten Cirebon 2018-2019 diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu : fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

- a. Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur;
- b. Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya;
- c. Fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

## 1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun 2016 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, pagu dan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

**Tabel 3.18**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017**

Uraian	Pagu	Realisasi	Capaian
Pendapatan Daerah	3.589.545.026.089,00	3.631.342.858.755,85	101,16%
Belanja Daerah	3.855.244.761.111,73	3.598.094.858.227,07	93,33%

Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Penerimaan yang Sah, pada Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp. 3.589.545.026.089,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.631.342.858.755,85 (101,16%).

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.19**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017**

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	736.582.294.811,00	819.137.634.791,85	111,21%
2	Dana Perimbangan	2.107.960.622.575,00	2.074.515.204.058,00	98,41%
3	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	745.002.108.703,00	737.690.019.906,00	99,02%
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>3.589.545.026.089,00</b>	<b>3.631.342.858.755,85</b>	<b>101,16</b>

### a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp. 736.582.294.811,00 dan realisasi sebesar Rp. 819.137.634.791,85 (111,21%). Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.20**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017**

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1	Hasil Pajak Daerah	167.700.000.000,00	186.141.908.461,00	111,00%
2	Hasil Retribusi Daerah	36.717.750.356,00	40.180.721.251,00	109,43%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.840.054.247,00	7.215.262.367,00	105,49%
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	525.324.490.208,00	585.599.742.712,85	111,47%
Jumlah Pendapatan Daerah		736.582.294.811,00	819.137.634.791,85	111,21%

### b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus ditargetkan sebesar Rp. 2.107.960.622.575,00 dan realisasi/penerimaan sebesar Rp. 2.074.515.204.058,00 (98,41%).

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Dana Perimbangan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.21**  
**Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2017**

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	87.457.077.575,00	97.883.197.546,00	111,92
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.495.142.625.000,00	1.495.142.625.000,00	100,00
Jumlah Dana Perimbangan		2.107.960.622.575,00	2.074.515.204.058,00	98,41



### c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya tahun anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp. 230,928,428,135.00 dengan realisasi sebesar Rp. 194.486.247.266,00 atau 84,22%.

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.22**  
**Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**  
**Tahun 2017**

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 2)	255.228.064.503,00	255.598.616.406,00	100,15%
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	367.996.820.000,00	367.996.820.000,00	100,00%
4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	121.777.224.200,00	114.094.583.500,00	93,69%
<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>		<b>745.002.108.703,00</b>	<b>737.690.019.906,00</b>	<b>99,02%</b>

Belanja Daerah Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp. 3.855.244.761.111,73 dengan realisasi sebesar Rp. 3.598.094.858.227,07 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar Rp. 2.116.711.161.551,73 dengan realisasi sebesar Rp. 1.977.088.287.360,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.738.533.599.560,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.621.006.570.867,07 sehingga ada penghematan sebesar Rp. 257.149.902.884,66.

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Belanja Daerah tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 3.23****Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017**

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1	Belanja Tidak Langsung	2.116.711.161.551,73	1.977.088.287.360,00	93,40%
2	Belanja Langsung	1.738.533.599.560,00	1.621.006.570.867,07	93,24%
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>3.855.244.761.111,73</b>	<b>3.598.094.858.227,07</b>	<b>93,33%</b>

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan, dalam Laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, merupakan Anggaran yang digunakan secara langsung untuk program pembangunan.

**2. Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat Nomor : 29.A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 tanggal 29 Mei 2017, BPK RI Perwakilan Jawa Barat memberikan **Opini Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP) atau *unqualified opinion* adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material dan menerapkan system pengendalian intern yang memadai.

Dengan pemberian opini WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Cirebon, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.



# 4

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2017 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2014-2019.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Cirebon telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Cirebon yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019. Pada Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan 15 sasaran dengan 73 indikator sasaran yang terbagi atas 9 indikator untuk Misi 1, 25 indikator untuk Misi 2, 17 indikator untuk Misi 3, 3 indikator untuk Misi 4, 10 indikator untuk misi 5, 9 indikator untuk misi 6.

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 15 sasaran yang mencakup 73 indikator sasaran, diketahui bahwa 35 indikator sasaran atau 49,3% Baik Sekali, 26 indikator sasaran atau 36,62 % Baik, 4 indikator sasaran atau 5,63% Cukup, 6 indikator sasaran atau 8,45% kurang dan 2 indikator sasaran kewenangannya pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **110,99%** atau bermakna **Baik Sekali**. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2017 **Baik Sekali**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama, secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran dalam kategori Sangat Berhasil. Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung adanya kerja sama yang sinergis dari seluruh jajaran Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait.

Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi, sehingga diketahui langkah-langkah strategis yang dilaksanakan dalam meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

## **B. Rencana Tindak Lanjut**

Mencermati hasil pencapaian kinerja Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Cirebon akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Mengupayakan prioritas alokasi anggaran berbasis prioritas program dan kegiatan dengan semangat efisiensi dan efektivitas untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang belum memenuhi target dan meningkatkan pencapaian hasil yang sudah memenuhi target.
2. Mengupayakan system perencanaan dan pengendalian yang lebih transparan dan akuntabel pada setiap satuan kerja perangkat daerah
3. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama daerah yang telah ditetapkan.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyusun dan merumuskan target dan indikator kinerja program dan kegiatan.
5. Mendorong masyarakat/komunitas, dunia akademik, dan dunia usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Menekan angka putus sekolah melalui peningkatan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar
7. Perluasan pelayanan kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasaran kesehatan



Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada Tahun 2017 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Cirebon.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## BELANJA BERDASARKAN URUSAN TAHUN 2017

KODE	SKPD	TARGET	TOTAL REALISASI	%	TARGET BTL	REALISASI BTL	%	TARGET BL	REALISASI BL	%	
1.	<b>URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR</b>										
1.	01. 01	DINAS PENDIDIKAN	1.349.936.267.359,73	1.245.318.765.817,00	92,25	1.064.966.829.559,73	965.950.882.429,00	90,70	284.969.437.800,00	279.367.883.388,00	98,03
1.	02. 01	DINAS KESEHATAN	391.229.159.069,00	345.166.127.849,00	88,23	126.204.193.500,00	116.275.733.250,00	92,13	265.024.965.569,00	228.890.394.599,00	86,37
1.	02. 02	RSUD WALED	131.739.386.545,00	137.891.304.877,00	104,67	22.406.709.000,00	21.505.488.795,00	95,98	109.332.677.545,00	116.385.816.082,00	106,45
1.	02. 03	RSUD ARJAWINANGUN	137.095.422.330,00	131.512.182.862,07	95,93	26.242.099.000,00	25.248.642.198,00	96,21	110.853.323.330,00	106.263.540.664,07	95,86
1.	03. 01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	329.139.602.757,00	320.401.713.269,00	97,35	21.281.087.685,00	19.817.866.181,00	93,12	307.858.515.072,00	300.583.847.088,00	97,64
1.	04. 01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	204.699.555.468,00	176.420.252.769,00	86,18	5.341.487.000,00	4.961.947.983,00	92,89	199.358.068.468,00	171.458.304.786,00	86,01
1.	05. 01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	17.511.500.400,00	16.761.770.839,00	95,72	5.275.904.000,00	5.150.953.132,00	97,63	12.235.596.400,00	11.610.817.707,00	94,89
1.	05. 02	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	12.687.788.100,00	11.964.338.050,00	94,30	5.079.903.000,00	4.885.889.561,00	96,18	7.607.885.100,00	7.078.448.489,00	93,04
1.	06. 01	DINAS SOSIAL	20.206.405.541,00	19.220.440.917,00	95,12	16.872.875.541,00	15.942.550.305,00	94,49	3.333.530.000,00	3.277.890.612,00	98,33
		<b>TOTAL</b>	<b>2.594.245.087.569,73</b>	<b>2.404.656.897.249,07</b>	<b>92,69</b>	<b>1.293.671.088.285,73</b>	<b>1.179.739.953.834,00</b>	<b>91,19</b>	<b>1.300.573.999.284,00</b>	<b>1.224.916.943.415,07</b>	<b>94,18</b>
2.	<b>URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR</b>										
2.	01 01	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	18.193.813.754,00	14.489.325.869,00	79,64	4.625.148.000,00	4.339.167.438,00	93,82	13.568.665.754,00	10.150.158.431,00	74,81
2.	03. 01	DINAS KETAHANAN PANGAN	7.937.337.170,00	7.367.572.008,00	92,82	3.899.893.000,00	3.658.342.210,00	93,81	4.037.444.170,00	3.709.229.798,00	91,87
2.	05. 01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	32.016.495.858,00	29.574.942.854,00	92,37	3.695.871.000,00	3.567.091.409,00	96,52	28.320.624.858,00	26.007.851.445,00	91,83
2.	06. 01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20.671.058.772,00	17.728.857.165,00	85,77	5.196.247.000,00	5.067.192.567,00	97,52	15.474.811.772,00	12.661.664.598,00	81,82
2.	07. 01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.089.423.821,00	8.723.778.272,00	95,98	2.515.577.000,00	2.457.909.269,00	97,71	6.573.846.821,00	6.265.869.003,00	95,32

2.	08.	01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN	20.685.543.772,00	19.997.424.929,00	96,67	12.625.196.000,00	12.118.707.623,00	95,99	8.060.347.772,00	7.878.717.306,00	97,75
2.	09.	01	DINAS PERHUBUNGAN	56.549.292.250,00	50.027.825.600,00	88,47	5.655.517.500,00	5.519.833.855,00	97,60	50.893.774.750,00	44.507.991.745,00	87,45
2.	10.	01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.478.126.900,00	9.932.845.202,00	94,80	2.712.893.000,00	2.473.533.219,00	91,18	7.765.233.900,00	7.459.311.983,00	96,06
2.	11.	01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.003.893.750,00	5.609.461.724,00	93,43	2.041.835.000,00	1.970.419.596,00	96,50	3.962.058.750,00	3.639.042.128,00	91,85
2.	12.	01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.037.715.602,00	9.369.060.459,00	93,34	3.613.368.000,00	3.398.441.130,00	94,05	6.424.347.602,00	5.970.619.329,00	92,94
2.	16.	01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	29.842.371.150,00	29.047.228.969,00	97,34	3.650.764.000,00	3.531.267.415,00	96,73	26.191.607.150,00	25.515.961.554,00	97,42
2.	18.	01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	7.430.900.700,00	6.998.032.128,00	94,17	3.711.791.000,00	3.487.767.234,00	93,96	3.719.109.700,00	3.510.264.894,00	94,38
<b>TOTAL</b>				<b>228.935.973.499,00</b>	<b>208.866.355.179,00</b>	<b>91,23</b>	<b>53.944.100.500,00</b>	<b>51.589.672.965,00</b>	<b>95,64</b>	<b>174.991.872.999,00</b>	<b>157.276.682.214,00</b>	<b>89,88</b>
<b>3.</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>											
3.	01.	01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.074.086.850,00	10.642.976.929,00	81,41	3.937.809.000,00	3.542.913.714,00	89,97	9.136.277.850,00	7.100.063.215,00	77,71
3.	03.	01	DINAS PERTANIAN	53.579.047.526,00	47.527.405.172,00	88,71	18.717.073.550,00	16.925.997.374,00	90,43	34.861.973.976,00	30.601.407.798,00	87,78
3.	06.	01	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	35.838.679.175,00	34.222.275.876,00	95,49	6.654.994.275,00	6.255.161.609,00	93,99	29.183.684.900,00	27.967.114.267,00	95,83
<b>TOTAL</b>				<b>102.491.813.551,00</b>	<b>92.392.657.977,00</b>	<b>90,15</b>	<b>29.309.876.825,00</b>	<b>26.724.072.697,00</b>	<b>91,18</b>	<b>73.181.936.726,00</b>	<b>65.668.585.280,00</b>	<b>89,73</b>
<b>4.</b>	<b>URUSAN FUNGSI PENUNJANG</b>											
4.	01.	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	14.803.971.100,00	13.503.021.748,00	91,21	4.496.004.000,00	4.362.332.750,00	97,03	10.307.967.100,00	9.140.688.998,00	88,68
4.	02.	00	PPKD	604.748.867.082,00	595.363.979.809,00	98,45	604.748.867.082,00	595.363.979.809,00	98,45	-	-	-
4.	02.	01	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	18.473.316.940,00	16.399.511.163,00	88,77	4.938.578.000,00	4.338.281.786,00	87,84	13.534.738.940,00	12.061.229.377,00	89,11
4.	02.	02	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	28.600.747.446,00	27.246.297.874,00	95,26	14.536.937.000,00	14.295.422.995,00	98,34	14.063.810.446,00	12.950.874.879,00	92,09
4.	03.	01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	15.037.511.561,00	13.789.850.709,00	91,70	4.471.554.000,00	4.329.599.649,00	96,83	10.565.957.561,00	9.460.251.060,00	89,54



4.	05.	01	INSPEKTORAT	15.848.995.950,00	14.500.332.065,00	91,49	7.434.433.000,00	6.647.815.213,00	89,42	8.414.562.950,00	7.852.516.852,00	93,32
4.	06	00	DPRD	20.846.302.400,00	18.812.516.106,00	90,24	20.846.302.400,00	18.812.516.106,00	90,24	-	-	-
4.	06	01	SEKRETARIAT DPRD	42.445.425.155,00	38.814.002.070,00	91,44	4.258.396.000,00	3.732.853.860,00	87,66	38.187.029.155,00	35.081.148.210,00	91,87
4.	07	00	KDH/WAKIL KDH	763.723.000,00	710.400.640,00	93,02	763.723.000,00	710.400.640,00	93,02	-	-	-
4.	07	01	SEKRETARIAT DAERAH	64.163.317.282,00	57.287.399.052,00	89,28	13.562.458.000,00	12.727.756.945,00	93,85	50.600.859.282,00	44.559.642.107,00	88,06



**RENCANA AKSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2017**

SASARAN SRATEGIS						INDIKATOR KINERJA			TARGET			
									TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
Meningkatnya Indeks Pendidikan						Angka Melek Huruf			-	-	-	95
						Angka Rata-Rata Lama Sekolah			-	-	-	7,90
						Angka Harapan Sekolah			-	-	-	11,93
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Melaksanakan Workshop Instruktur LKP Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran	√	-	-	-	Sertifikat Peserta Bintek LKP sejumlah 60 lembar	Program Pendidikan Non Formal	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	62.460.000,00	-	-	-
2	Melaksanakan Lomba/Apresiasi i PTK-PAUDNI dan Ekspo Kursus Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2017	√	-	√	-	Peserta Lomba Keteladanan dan Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi tingkat Provinsi dan Expo Kursus Tingkat Provinsi	Program Pendidikan Non Formal	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	50.200.000,00	-	66.680.000,00	-
3	Menurunkan Angka Melek Huruf	√	√	√	√	Warga belajar pendidikan keaksaraan dan warga belajar KUM	Program Pendidikan Non Formal	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	645.213.000,00	912.042.000,00	815.150.000,00	605.275.000,00
4	Melaksanakan Workshop Kurikulum Bagi Tutor Pendidikan Keaksaraan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran	-	√	-	-	Sertifikat Peserta Bintek Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran KF sejumlah 70 lembar	Program Pendidikan Non Formal	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	-	69.325.000,00	-	-
5	Mutu Pendidikan Meningkatkan	-	-	√	√	Laporan Hasil Verifikasi	Program Pendidikan Non Formal	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	15.850.000,00	14.150.000,00
Meningkatnya Pemerataan dan Kesempatan Pendidikan						APK			-	-	-	APK PAUD : 3780
									-	-	-	APK SD/MI : 109
									-	-	-	APK SMP/MTs : 11
NO	KSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Bukti Fisik Adanya Ruang Kelas Baru Sekolah	-	√	√	-	Ruang Kelas Baru	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	-	6.316.250,00	607.377.000,00	-
2	Bukti Fisik Adanya APE Dalam dan APE Luar	-	-	√	-	APE Dalam dan APE Luar	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan sarana dan prasarana bermain	-	-	127.500.000,00	-

3	Bukti Fisik Adanya Halaman Sekolah yang Terpasang Vaving Blok dan Pagar	-	√	√	-	Halaman sekolah yang terpasang vaving blok, Pagar lingkungan sekolah	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	-	4.377.000,00	239.300.000,00	-
4	Bukti Fisik Buku Referensi, Pengayaan, Panduan Pendidikan, dan Raport Siswa.	-	-	-	√	Buku referensi, pengayaan, panduan pendidik dan Raport Siswa	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	-	-	-	392.515.000,00
5	Bukti Fisik Alat Pendukung Kebersihan dan Keindahan Sekolah	-	-	√	-	Alat Pendukung Kebersihan dan Keindahan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	-	71.200.000,00	-
6	Lomba Guru TK dan Kepala TK Tingkat Kab. Cirebon	-	√	-	-	Lomba Guru Teladan Tingkat Kecamatan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	-	38.350.300,00	-	-
7	Lomba - lomba PAUD Tingkat Kab. Cirebon	-	-	-	√	Terpilihnya Juara I, II, dan III Lomba-lomba PAUD Tingkat Kab. Cirebon	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan pendidikan anak usia dini	-	-	-	100.000.000,00
8	Terlaksananya Pembelajaran Anak Usia Dini	√	√	√	√	Terlaksananya Pembelajaran PAUD	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	4.500.000,00	326.105.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
9	Meningkatnya Mutu dan Kualitas PAUD Untuk Mengikuti Pendidikan Selanjutnya	-	√	-	-	Tetap Berjalannya Proses kegiatan Pembelajaran Bermain di PAUD	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	-	616.200.000,00	-	-
10	Tercapainya rasio kebutuhan ruang kelas/rombel	√	√	√	√	Ruang Kelas Baru	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	699.861.750,00	854.884.220	2.680.958.830	952.625.800,00

11	1. Merancang Juknis BOS Kabupaten; 2. Mensosialisasikan juknis BOS Kabupaten; 3. Melaksanakan Bimbingan Teknis BOS; 4. Penyusunan DPA Turunan; 5. Pendistribusian Dana BOS ke Sekolah Penerima BOS Kabupaten	√	√	√	√	1. Materi Sosialisasi dan Bimtek 2. Laporan hasil sosialisasi dan bimtek	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren	1.051.231.550	2.940.647.200	11.574.000	34.045.250
12	Mendistribusikan Dana Operasional SMP Satap	-	√	-	√	Bantuan biaya operasional SMP Satu Atap	1.01.1.01.01.16. - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	1.01.1.01.01.16.66. - Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS		75.000.000		75.000.000
Meningkatnya Pemerataan dan Kesempatan Pendidikan							Melek Huruf Al-Qur'an		-	-	-	SD (%) : 54.8
									-	-	-	SMP (%) : 61.9
NO	KSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Test Baca Al Quran (IQRA 6/juz Amma)	-	√	-	-	Penerapan pembelajaran mengenal dan menguasai baca Al - Qur'an	1.01.1.01.01.23. - Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan	1.01.1.01.01.23.01. - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Keagamaan	-	492.643.250	-	-
Meningkatnya Mutu dan Referensi Pendidikan							Angka Lulusan (AL)		-	-	-	SD (%) : 99.95
									-	-	-	Paket A (%) : 85
									-	-	-	SMP (%) : 99.94
									-	-	-	Paket B (%) : 85
									-	-	-	Paket C (%) : 85
NO	KSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Melakukan Survey Sekolah yang akan dibangun ruang laboeratorium	-	√	√	√	Tersedianya Ruang Laborator	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	-	120.482.700	115.000.000	102.780.000
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	√	√	√	√	Gedung Olahraga	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	73.645.625	88.374.750	88.374.750	44.187.375



3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	√	√	√	√	Ruang Perpustakaan Sekolah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pembangunan perpustakaan sekolah	120.866.250	145.039.500	145.039.500	72.519.750,00
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	√	√	√	√	Alat Praktik dan Peraga Siswa	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	44.778.688	53.734.425	53.734.425	26.867.212
5	1. Rapat Penyusunan Draf Buku Raport; 2. Melakukan Survey Pasar; 3. Pengajuan Proses Lelang ke ULP; 4. Pendistribusian Buku Rapot	√	√	√	√	Buku referensi, pengayaan, panduan pendidik dan Raport Siswa	1.01.1.01.01.16. - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	1.01.1.01.01.16.15. - Pengadan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	12.635.300	27.339.300	4.794.734.000	3.500.492.000
6	1. Melakukan Survey Pasar ; 2. Pengajuan proses Lelang ke ULP; 3. Pendistribusian Alat Perlengkapan Sekolah	-	√	-	-	Alat pendukung kebersihan dan keindahan sekolah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pengadaan perlengkapan sekolah	-	106.000.000	-	-
7	Seleksi Lewat Lomba dan Pertandingan	√	√	√	√	Pelaksanaan lomba: OSN, FLSN, O2SN, Calistung, Pasanggiri Bahasa dan Sastra Sunda/Cirebon	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	341.546.000	391.145.000	27.000.000	88.000.000
8	Monitoring dan Pembinaan	√	√	√	√	Pelaksanaan US/UN SD/MI dan SMP/MTs	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	83.610.000	62.694.000	173.285.000	(43.665.000,00)
9	Pemerataan Akses Pendidikan Yang Putus Sekolah SMA	√	√	√	√	Kelompok Belajar Paket C Setara SMA	Program Pendidikan Menengah	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	220.200.000,00	290.112.000,00	431.400.000,00	540.000,00
10	Melaksanakan Workshop Tutor Paket C setara SMA untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran	-	√	-	-	Sertifikat Peserta BinteK Paket C sejumlah 60 peserta	Program Pendidikan Menengah	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Paket C	-	62.652.000,00	-	-

Meningkatnya Mutu dan Referensi Pendidikan						Angka Putus Sekolah (APS)			-	-	-	SD : 2.26
									-	-	-	SMP : 02
NO	KSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	1. Pelaksanaan Lomba Motivasi Belajar Mandiri; 2. Workshop SMP Terbuka	-	-	√	-	1. Pengadaan Seragam Batik untuk siswa terbuka kelas 7, 2. Juara Lomojar, 3. Materi Workshop	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pembinaan SMP Terbuka			65.120.000	
2	Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Yang Putus Sekolah SMP dan Tidak Melanjutkan Ke SMA	√	√	√	√	Kelompok Belajar Paket B Setara SMP	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	272.458.450,00	247.945.000,00	223.200.000,00	214.200.000,00
Meningkatnya Mutu dan Referensi Pendidikan						Angka Melanjutkan			-	-	-	SD ke SMP Sederajat : 90.01
NO	KSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	1. Mendata Siswa Kelas 6 SD Lulusan tahun sebelumnya yang belum melanjutkan; 2. Pendistribusian Bea Siswa Kepada Penerima	-	-	√	-	Pemberian Beasiswa dari keluarga tidak mampu	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Penyediaan Beasiswa Transisi			458.060.000	
SASARAN SRATEGIS						INDIKATOR KINERJA			TARGET			
Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik						Guru Layak Mengajar			TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
									-	-	-	PAUD (%) : 61.8
									-	-	-	SD (%) : 82.5
									-	-	-	SMP (%) : 96.5
NO	KSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Sosialisasi Kurikulum Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	-	√	-	-	Sertifikat Peserta BinteK Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD sejumlah 100 lembar	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	-	96.337.000,00	-	-

2	1. Melakukan Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi; 2. Pelaksanaan Kegiatan MGMP SMP	√	√	√	-	Pelaksanaan lomba Guru, Kepala Sekolah, Pengawas berprestasi jenjang SD dan SMP	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	130.132.000	73.078.000	27.750.000	24.000.000
3	Guru Mendapat Sertifikat Pelatihan Kurikulum Sebanyak 2700 Orang	-	-	√	-	Guru SD dan calon pendamping mendapatkan sertifikat pelatihan kurikulum	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	-	-	661.195.000	-
4	Melaksanakan Workshop Tutor Paket B setara SMP untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran	√	-	-	-	Sertifikat Peserta Bintek Paket B sejumlah 60 lembar	1.01.1.01.01.16. - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Paket B Setara SMP	62.277.000,00	-	-	-
5	Guru memahami proses, maksud dan tujuan adanya Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	√	√	√	√	Peserta sosialisasi sertifikasi pendidik	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	31.952.900,00	286.653.900,00	31.952.900,00	(167.046.904,00)
6	Pelaksanaan BIMTEK Aplikasi DAPODIK Bagi Operator Sebanyak 567 Orang	√	√	-	-	Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Aplikasi Dapodik	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	57.400.000,00	118.600.000,00	-	-
Meningkatnya Mutu dan Jumlah Sarana prasarana Pendidikan						Ruang Kelas Baik			-	-	-	<b>95</b>
									-	-	-	<b>7,90</b>
									-	-	-	<b>11,93</b>
NO	KSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Melaksanakan Workshop Instruktur LKP Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran	-	√	√	-	Ruang kelas / penunjang pembelajaran dalam kondisi baik	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	14.634.750,00	199.620.000,00	-

2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	√	√	√	√	Ruang Guru	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Penambahan ruang guru sekolah	216.595.625,00	217.214.750,00	217.214.750,00	215.357.375,00
3	Tertatanya lingkungan Sekolah	√	√	√	√	Halaman sekolah yang terpasang vaving blok, Pagar lingkungan sekolah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	1.360.656.225	1.470.303.770	1.470.303.770	2.441.361.135
4	Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan	√	√	√	√	Jamban	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	44.920.625	53.904.750	53.904.750	26.952.375
5	Terpenuhinya ruang kelas / penunjang pembelajaran yang layak	√	√	√	√	Ruang kelas / penunjang pembelajaran dalam kondisi baik	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	348.097.500	4.854.893.100	7.778.573.000	1.474.528.500

SASARAN SRATEGIS						INDIKATOR KINERJA			TARGET			
									TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
Meningkatnya Mutu dan Jumlah Sarana prasarana Pendidikan						Rasio Siswa/Kelas (S/K)			-	-	-	SD : 30.66
									-	-	-	SMP : 31.66
NO	KSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana	√	√	√	√	Meubelair Ruang Kelas	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pengadaan Mebeleur Sekolah	287.713.625	345.256.350	345.256.350	172.628.175
Meningkatnya Mutu dan Jumlah Sarana prasarana Pendidikan						Terakreditasi			-	-	-	SD (%) : 99.95
									-	-	-	SMP (%) : 98
NO	KSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Penilaian Kompetensi Kinerja Kepala Sekolah Dasar	-	-	√	√	Pelaksanaan Sosialisasi dan penilaian kinerja Kepala Sekolah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	-	-	113.470.000,00	214.425.000,00
Meningkatnya Mutu dan Jumlah Sarana prasarana Pendidikan						Rasio Guru / Siswa			-	-	-	SD (%) : 22
									-	-	-	SMP (%) : 16
NO	KSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
2	Proses pembelajaran di sekolah lancar	√	√	√	√	Pembayaran honor guru kont	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS dan Guru Bantu Daerah Terpencil	34.608.000	514.208.000	514.208.000	514.208.000
Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Pendidikan						Indeks Kepuasan Masyarakat			-	-	-	SD 78,5 ; SMP 77,28
									-	-	-	
NO	KSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV



1	Seleksi Gugus 40 UPT Pendidikan Kecamatan	-	-	-	√	Lomba Gugus dan Perpustakaan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	-	-	-	83.000.000,00
2	Pelaksanaan BIMTEK Verval NUPTK Bagi Operator Sebanyak 567 Orang	-	-	√	√	Peserta Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi (Verval) Data NUPTK	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	136.431.900,00	(182.000,00)
3	Pelaksanaan Rakoor Bagi Kepala Sekolah dan Kepala UPT Sebanyak 366 Orang	√	-	-	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Perencanaan Program Pendidikan Tahun 2018	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	130.000.000,00	-	-	-
4	Pelaksanaan BIMTEK Pengolahan Data Bagi Operator Sebanyak 355 Orang	√	√	√	√	1. Dokumen Pendataan Profil Pendidikan; 2. Dokumen Laporan Penyelenggaraan PPDB Online	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	7.985.295,00	338.123.800,00	153.470.590,00	98.585.295,00
5	Pelaksanaan Monev	-	-	-	√	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Pelaporan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	78.625.000,00
Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Pendidikan						Indeks Kepuasan Masyarakat			-	-	-	SD 78,5 ; SMP 77,28
NO KSI / STRATEGI		JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Pelaksanaan BIMTEK Penyusunan IKM Bagi Operator Sebanyak 375 Orang	-	-	-	√	Peserta Bimbingan Teknis dan Exspose Penyusunan Dokumen IKM Bidang Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Sosialisasi dan Advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan	-	-	-	84.000.000,00

Penanggulangan Penyakit potensial KLB						Penanggulangan KLB penyakit 1x24 jam						100%
NO AKSI/STRATEGIS		JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	Meningkatkan sistem kewaspadaan dini dan respon KLB	√	√	√	√	Tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan dan faktor risiko penyakit menular di wilayah Kab. Cirebon	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Peningkatan surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	82.186.450	97.989.450	99.634.950	44.576.950

Pengendalian penyakit menular						Bertambahnya fasilitas dan layanan HIV/AIDS				10 PKM		
						Case Notification Rate (CNR) 145/100.000 pddk				160		
						Angka Kesembuhan (Cure Rate) >85%				83		
						Layanan komprehensif berkesinambungan				5 PKM		
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	Meningkatkan pengendalian penyakit menular	√	√	√	√	1. bertambahnya fasilitas dan layanan HIV-AIDS 2. penasun ikut PTRM 3. Pengobatan IMS 4. Konseling test 5. ODHA dapat ART 6. ODHA bumil dapat ART  7. ODHA screening TB 8. Layanan Komprehensif	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan HIV/AIDS	160.592.000	238.475.000	290.578.000	386.760.000
						307.983.000			375.517.000	379.760.000	191.680.000	
						1. Fogging Focus 2. Larvasida 3. Reagent IgG/IgM Caccette  CNR, angka kesembuhan TB, angka penemuan kasus TB, tatalaksana pneumonia, tatalaksana diare, penemuan kasus kusta, cacat 2 kusta, DBD yang ditangani		Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	108.861.500	180.326.000	214.601.000	105.099.000
Pengendalian penyakit tidak menular						Penurunan jumlah kasus baru penyakit tidak menular				> 25%		
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	Pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular	√	√	√	√	Tersedianya data / informasi hasil ukur faktor resiko PTM di posbindu PTM	Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	Surveilans Faktor Resiko PTM (Penyakit Tidak Menular)	25.076.500	39.419.000	29.921.000	10.000.000
Balita gizi sangat kurus dapat terdeteksi dan tertangani						Menurunnya Prevalensi balita Gizi sangat kurus					0,12%	
						Menurunnya Prevalensi balita Gizi Buruk					0,85%	
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	Meningkatkan upaya perbaikan gizi balita	√	√	√	√	Presentase Balita gizi buruk yang mendapatkan penanganan	Perbaikan Gizi Masyarakat	Penanggulangan Gizi buruk	362.221.800	382.075.000	385.608.000	340.000.000
		√	√	√	√	Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif		Penguatan Peningkatan Cakupan ASI	1.093.900	55.125.000	37.875.000	2.950.000
Terdeteksinya bumil resiko tinggi, dan tertanganinya bumil, bulin dan bufas komplikasi						Menurunnya Rasio kematian ibu					85,38	
						Meningkatnya presentase kunjungan ibu hamil (K4)					96%	
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	Meningkatkan deteksi resiko tinggi pada bumil dan penanganankomplikasi bumil,	√	√	√	√	bumil resti dan komplikasi dapat ditangani, 424 bidan dapat mendeteksi sesuai	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Peningkatan Kapasitas Kabupaten dalam	119.700.000	133.970.000	139.337.800	39.342.200
		√	√	√	√	1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan neonatal		Peningkatan Kesehatan Ibu hamil, Bersalin dan	117.333.500	147.900.000	169.684.000	73.660.000

bunin dan butas						2. penguatan rujukan dan peningkatan kebijakan		Nifas				
		√	√	√	√	1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan neonatal		Pembangunan Sistem Implementasi Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru lahir	38.480.000	42.754.000	40.511.000	20.375.000
Tertanganinya neonatus komplikasi dan penanganan bayi & balita sakit						Rasio Kematian Bayi						3,96
						Persentase neo komplikasi yang ditangani						81%
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	Meningkatkan penanganan neonatus komplikasi, bayi dan balita sakit	√	√	√	√	Peningkatan kapasitas Nakes dalam penanganan komplikasi neo, MTBS dan	Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Peningkatan Kapasitas Kabupaten dalam Penanganan	125.267.500 96.626.300 96.626.300	124.365.000	154.125.000	75.602.500
		√	√	√	√	1. Pelayanan bayi muda dengan MTBM 2. Peningkatan kunjungan bayi dan balita		Peningkatan Pelayanan kesehatan Bayi dan Balita	36.019.500 39.995.500 39.995.500	43.770.500	43.820.000	21.640.000
Meningkatnya PHBS di 5 tatanan						Persentase Rumah Tangga ber PHBS						66,90%
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	Melakukan pemetaan, pengkajian dan	√	√	√	√	Meningkatnya tatanan yang melaksanakan PHBS di RT, tempat kerja, TTU, sekolah,	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	27.839.700 9.090.000 9.090.000	231.950.000	189.051.000	205.339.000
Pengembangan desa siaga						Presentase strata desa siaga aktif madya						60%
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	Meningkatkan pembinaan forum desa	√	√	√	√	Meningkatkan strata desa siaga aktif madya	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Indikator Desa Siaga Aktif	87.660.300 9.090.000 9.090.000	283.804.000	61.596.000	38.950.000
Meningkatnya strata posyandu						Presentase strata posyandu purnama						57,30%
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	Meningkatkan pembinaan posyandu	√	√	√	√	Peningkatan strata posyandu, peningkatan pemberdayaan masyarakat	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Strata Posyandu	63.101.000	127.500.000	235.110.000	52.510.000
Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan optimal dalam memberikan pelayanan						Presentase rawat jalan						15%
						Presentase rawat inap						1,5%
						Presentase pelayanan kesehatan khusus						85%
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	√	√	√	√	Peningkatan kemampuan teknis pengelolaan rawat jalan/inap dan unit gawat darurat puskesmas dengan optimal	Upaya Kesehatan masyarakat	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	20.630.000	22.200.000	23.020.000	13.620.000
		√	√	√	√	Pos kesehatan : lebaran, natal tahun baru, penanggulangan bencana dan pelayanan P3K		Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah kesehatan	217.185.000	272.410.000	242.620.000	123.837.500

√	√	√	√	Jumlah yang menerima biaya operasional dan pemeliharaan	Penyediaan Biaya Operasional dan pemeliharaan	5.710.178.850	5.710.178.850	5.710.178.850	5.710.179.006
√	√	√	√	Meningkatnya cakupan penderita katarak yang dapat di lakukan operasi	Pelayanan Operasi Katarak	188.230.000	201.622.500	101.886.250	100.761.250
√	√	√	√	Meningkatnya pengetahuan pengelola pelayanan kesehatan tradisional, kesehatan indera dan kesehatan gigi dan mulut (GIMUL), serta meningkatnya cakupan penemuan kasus gangguan indera	Pelayanan Kesehatan Pengembangan Khusus	24.500.000	37.850.000	25.600.000	15.325.000
√	√	√	√	Surat izin praktik perorangan dan surat rekomendasi izin sarana kesehatan	Pelayanan Perizinan Praktik Perorangan dan Pembinaan Sarana Kesehatan	15.500.000	19.000.000	19.165.000	8.830.000
√	√	√	√	Jumlah jamaah haji yang terpantau kondisi kesehatannya melalui pembinaan di puskesmas dan rumah sakit	Peningkatan Kesehatan Jamaah Calon Haji	34.497.500	37.020.900	42.440.000	24.000.000
√	√	√	√	Seluruh sekolah (SD, SMP, SMA) melaksanakan penjangkauan dan pelayanan kesehatan anak sekolah	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	121.329.000	146.450.000	156.560.000	68.855.600
√	√	√	√	Terbinanya sarana kesehatan swasta yang berizin	Pembinaan Sarana Kesehatan Swasta	7.450.000	9.250.000	8.700.000	5.000.000
√	√	√	√	Masyarakat miskin terjamin BPJS (Penerima bantuan Iuran (PBI)) daerah dan SKTM	Kemitraan Asuransi kesehatan masyarakat	5.738.821.250	6.887.946.250	10.028.620.250	310.522.250
√	√	√	√	Terjalannya kemitraan antara pelayanan kesehatan dasar dengan rumah sakit kabupaten cirebon	Kemitraan antara Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta dan RS dalam rangka Penguatan Sistem Rujukan	88.470.000	93.730.750	102.457.750	92.878.500
√	√	√	√	Diterapkan dan dilaksanakannya SIRS dan SIMRS oleh rumah sakit	Kemitraan sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) dan Sistem Informasi Manajemen Rumah sakit (SIMRS)	24.115.000	25.839.500	25.839.500	20.666.000
√	√	√	√	Terjalannya kemitraan antara Dinas Kesehatan dengan masyarakat dan organisasi profesi	Kemitraan dengan masyarakat umum dan Organisasi profesi	21.905.000	5.728.000	2.605.000	5.246.900



Meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak						Presentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan			70%			
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	Meningkatkan cakupan kepesertaan	√	√	√	√	Terlayannya kebutuhan pelayanan kesehatan tingkat pertama peserta JKN	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN	50.450.000	25.000.000	132.250.000	22.800.000
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar						Indeks Kepuasan Masyarakat			3,15			
						Puskesmas berkinerja baik			10			
						Puskesmas yang sudah melakukan self assesment akreditasi			9			
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan	√	√	√	-	Terlaksananya Survey IKM dan sosialisasi SOTK	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Penyusunan Standar Kesehatan	32.407.300	116.292.700	4.200.000	-
		√	√	√	√	Terselenggaranya sosialisasi SPM yang baru, evaluasi SPM, penyusunan buku profil, pengelolaan laporan SP3		Evaluasi dan Pengembangan Standar pelayanan Kesehatan	52.241.200	22.493.200	26.202.400	31.223.200
		-	√	√	-	Terlaksananya kegiatan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan		Pembangunan dan Pemutakhiran data dasar Standar pelayanan kesehatan	-	53.342.500	28.337.500	-
		√	√	√	√	Penilaian kinerja puskesmas		Penilaian Kinerja Puskesmas	13.833.750	13.133.750	18.433.750	10.433.750
		√	√	√	√	Jumlah puskesmas yang terakreditasi		Akreditasi Puskesmas	64.043.750	64.463.750	64.463.750	63.203.750
		Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan untuk kelancaran arus lalu lintas dan mempermudah akses perekonomian						Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap			83%	
						Proporsi Panjang Jaringan Jalan Desa dalam kondisi mantap			79%			
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK.III	TK. IV				TK. I	TK. II	TK.III	TK. IV
1	Pembangunan, P Jaringan Jalan	√	√	√	√	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			14.823.117.422	17.898.156.349	17.929.883.049	9.023.643.639
						Desain Teknis Perencanaan Sebagai Bahan Acuan Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan		Perencanaan Pemb	12.434.400	182.520.200	176.295.600	95.724.772
						Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan dan Pembangunan Jalan Baru		Pembangunan Jalan	11.655.006.022	13.946.176.049	13.982.427.549	7.064.065.967
						Jumlah Jembatan Kabupaten yang ditingkatkan dan Pembangunan Jembatan		Pembangunan Jemba	3.132.887.500	3.744.102.000	3.734.841.500	1.850.418.900
						laporan Evaluasi program pembangunan jalan dan jembatan		Monitoring, Evaluasi	22.789.500	25.358.100	36.318.400	13.434.000

	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		3.957.849.626	4.787.568.926	4.916.279.826	1.645.161.426
Tersedianya dokumen teknis perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan		Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	2.689.900	106.297.000	308.904.400	2.208.600
Panjang Jalan Kabupaten yang dipelihara secara Rutin dan Periodik		Rehabilitasi/Pemeliharaan	3.671.225.926	4.339.944.326	4.270.319.826	1.495.934.826
Jumlah Jembatan Kabupaten yang terpelihara		Rehabilitasi/Pemeliharaan	263.883.800	315.726.200	309.637.000	136.853.000
Laporan Evaluasi Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan		Monitoring, Evaluasi	20.050.000	25.601.400	27.418.600	10.165.000
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan		9.544.188.797	11.442.250.329	11.420.910.529	5.520.137.239
Panjang Jalan Desa yang ditingkatkan, Jumlah Jembatan Desa yang ditingkatkan dan jumlah jembatan desa yang dibangun		Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaaan	8.375.362.397	10.066.897.229	10.039.232.829	4.990.494.531
Panjang jalan Desa yang terpelihara		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaaan	1.143.360.600	1.344.870.400	1.352.935.500	508.833.500
laporan Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	25.465.800	30.482.700	28.742.200	20.809.208
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		6.897.965.488	8.358.354.025	8.291.430.725	4.128.572.513
Desain teknis perencanaan Bangunan Pelengkap Jalan		Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2.437.300	56.100.200	-	-
Jumlah Bangunan Pelengkap jalan yang dibangun		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	6.895.528.188	8.302.253.825	8.274.538.225	4.120.742.513
laporan Evaluasi Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			16.892.500	7.830.000

						Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan		29.884.000	173.219.100	169.474.000	209.502.780	
						Tersedianya data kondisi jalan	Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan	26.082.000	28.199.900	24.720.000	208.777.980	
						Tersedianya data kondisi jembatan	Penyusunan Sistem Informasi/Database Jembatan	3.802.000	145.019.200	144.754.000	724.800	
							Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	23.663.000	31.141.500	35.761.500	12.931.500	
						Tersedianya Laporan Pemanfaatan Ruang milik Jalan yang dipergunakan masyarakat	Pemanfaatan Jalan	23.663.000	31.141.500	35.761.500	12.931.500	
							Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	95.189.200	429.189.000	1.184.311.700	390.581.836	
						Jumlah patok Km/Hm yang terpasang dan Pembebasan Lahan	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Cirebon	95.189.200	429.189.000	1.184.311.700	390.581.836	
Menjaga kondisi Infrastruktur Sumber Daya Air						Intensitas Tanam					225%	
						Prosentase berkurangnya luas daerah genangan akibat banjir					20%	
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK.III	TK. IV				TK. I	TK. II	TK.III	TK. IV
1	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air	√	√	√	√		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		9.066.637.608	11.739.144.268	12.321.289.733	5.129.373.991
						Tersedianya dokumen perencanaan detail reservoir		Perencanaan Pemban	71.487.250	150.078.000	139.745.650	65.325.000
						Kondisi prasarana jaringan irigasi menjadi lebih baik		Rehabilitasi/Pemeliha	994.291.458	1.210.933.101	1.176.146.800	605.385.291

					- Dokumen RTT (Rencana Tata Tanam), Rencana Penyediaan dan Pengaturan Air Irigasi, Jadwal Pengeringan Jaringan Irigasi	Pemberdayaan Petani	50.218.600	59.977.800	57.383.000	19.400.000
					- Dokumen Sosialisasi Rencana Tata Tanam (Peraturan Bupati) Tersedianya data monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi prasarana pengelolaan sumber daya air Operasi Sarana Prasarana Sumber Air, Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Sumber Air, Pemeliharaan Berkala Sarana Prasarana Sumber Air	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	23.062.650	29.729.000	25.262.650	16.375.000
					Perencanaan teknis (detail engineering detail) penanganan lokasi kritis sungai, muara sungai dan pengamanan kawasan pantai	Operasi dan Pemeliharaan	545.937.300	589.743.100	551.884.800	380.292.700
					Kondisi prasarana jaringan irigasi menjadi lebih baik	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sungai, Muara Sungai dan Pengamanan Kawasan Pantai	44.572.100	203.441.667	49.262.733	14.166.000
					Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi saluran sungai	Operasi dan Pemeliharaan	905.423.400	1.033.655.000	929.335.700	755.499.000
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai/Saluran Pembuang	Pembangunan dan Peningkatan Sumber Air	6.431.644.850	8.461.586.600	9.392.268.400	3.272.931.000
					Program Pengendalian Banjir		1.674.473.800	1.634.093.800	1.998.854.600	1.519.306.500
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai/Saluran Pembuang	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Muara Sungai dan Pengamanan Pantai	870.558.500	854.638.800	1.033.853.200	673.685.000
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai/Saluran Pembuang	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Muara Sungai dan Pengamanan Pantai	803.915.300	779.455.000	965.001.400	845.621.500
					Program Pengembangan Data/Informasi		31.411.900	79.229.700	80.671.200	31.987.200



								Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	31.411.900	79.229.700	80.671.200	31.987.200
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	75.000.000
								Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	75.000.000
Meningkatnya Perencanaan, Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan							Terkendalinya Pemanfaatan Ruang					100%
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK.III	TK. IV				TK. I	TK. II	TK.III	TK. IV
1	Pembuatan Draft atau Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah	√	√	√	√	Penyusunan Draft Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi Penyusunan Dokumen Teknis RDTR dan Peraturan Zonasi	Program Perencanaan Tata Ruang	Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	36.365.000 2.713.400 33.651.600	1.008.718.700 313.600.150 695.118.550	28.800.000 - 28.800.000	3.000.000 - 3.000.000
						Program Pemanfaatan Ruang			27.112.000	64.702.000	19.042.000	11.952.000
						Tersusunnya Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	13.610.000	14.400.000	12.300.000	10.350.000
						Pemahaman yang Meningkat Terhadap Pemanfaatan Lahan		Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	13.502.000	50.302.000	6.742.000	1.602.000
						Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			19.787.525	75.907.525	22.717.525	18.877.525
						Pemasangan Billboard Mengenai Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	3.040.000	59.160.000	5.795.000	1.605.000

						Kesesuaian Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Pengawasan Pemanfaatan Ruang	16.747.525	16.747.525	16.922.525	17.272.525
SASARAN STRATEGIS						INDIKATOR KINERJA			TARGET			
									TK. I	TK. II	TK.III	TK. IV
Meningkatnya Peralatan Pendukung infrastruktur Pekerjaan Umum						Tersedianya Peralatan Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang						100%
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK.III	TK. IV				TK. I	TK. II	TK.III	TK. IV
1	Penambahan Per	√	√	√	√		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan		1.368.167.267	2.518.245.367	405.654.767	154.262.267
						Bertambahnya jumlah alat-alat berat		Pengadaan Alat-alat B	1.110.450.000	2.175.200.000		
						Bertambahnya jumlah peralatan bengkel alat-alat berat		Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	14.300.000	11.050.000	5.700.000	
						Bertambahnya alat-alat laboratorium kebinamargaan		Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan		90.900.000	82.100.000	
						jumlah alat-alat berat yang dipelihara		Rehabilitasi/Pemelihara	202.176.090	195.439.190	156.688.590	140.471.090
						jumlah peralatan bengkel alat-alat berat yang dipelihara		Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Aat-alat Berat		6.873.000		
						jumlah alat-alat laboratorium Kebinamargaan yang dipelihara		Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan	41.241.177	38.783.177	161.166.177	13.791.177
Tertibnya penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksana						Penilaian hasil Evaluasi Lakip						CC
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK.III	TK. IV				TK. I	TK. II	TK.III	TK. IV
1	Penyelenggaraan Tertib Administrasi	√	√	√	√		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		352.536.800	855.153.600	648.403.800	239.851.000
						Terselesaikannya Jasa komunikasi, Listrik, air dan PBB		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.900.000	83.300.000	78.900.000	78.900.000
						Tersedianya jasa Jaminan Barang milik Daerah		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	-	42.200.000	-	-

		Tersedianya Jaminan perizinan kendaraan operasional dinas		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	93.950.000	-	3.375.000	-
		Tersediannya Alat tulis kantor		Penyediaan Alat Tulis Kantor	39.529.000	39.249.000	39.588.000	39.213.500
		terpenuhinya cetakan dan penggandaan sebagai penunjang administrasi		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.352.800	20.528.000	20.543.800	21.723.200
		Tersedianya alat listrik sebagai penunjang adm		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	8.260.000	8.255.000	8.250.000	8.185.000
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	537.249.600	369.250.000	-
		Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.891.000	8.891.000	8.891.000	8.930.300
		Tersedianya bahan bacaan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.082.000	43.082.000	43.082.000	43.079.000
		Tersedianya makanan dan minuman penunjang kegiatan dinas		Penyediaan Makanan dan Minuman	30.790.000	28.675.000	33.500.000	35.145.000
		Terpenuhinya koordinasi dengan instansi terkait		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	19.782.000	43.724.000	43.024.000	4.675.000
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		47.271.000	32.283.000	29.769.000	28.311.500
		Tersedianya Laporan capaian kinerja dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.136.000	16.944.000	17.982.000	14.040.000
		Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	13.047.000	15.339.000	11.787.000	14.271.500
		Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	11.088.000	-	-	-
			Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral		24.000.000	-	-	-

						Tersedianya Dokumen Perencanaan Dinas		Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	24.000.000	-	-	-
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		467.170.720	543.909.720	2.557.460.720	736.178.720
						Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas		Pengadaan Kendaraan	-	-	2.003.450.000	-
						Kain gording		Pengadaan Perlengkapan	-	50.000.000	-	-
						Terpeliharanya rumah dinas		Pemeliharaan Rutin/	-	-	-	363.900.000
						Terlaksananya perbaikan gedung kantor		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	207.221.720	240.660.720	139.221.720	139.221.720
						Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	199.807.000	206.107.000	198.807.000	195.632.000
						Terlaksana Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	8.750.000	8.750.000	8.500.000	8.500.000
						Pemeliharaan mesin tik, computer, printer, alat komunikasi, pompa air		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	46.392.000	38.392.000	28.682.000	28.925.000
						Mebeleur dapat digunakan dengan baik		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	5.000.000	-	-	-
						Terpeliharanya gedung kantor		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	-	178.800.000	-
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-	98.550.000	203.682.500	-
						Pakaian dinas PNS		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	-	98.550.000	-	-
						Tersedianya Pakaian untuk pekerja Lapangan		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	-	-	128.000.000	-
						Tersedianya Pakaian khusus hari tertentu pegawai		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	-	-	75.682.500	-
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan						Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah			-	-	-	8 Pokmas dan 3 bank sampah
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan			-	-	-	50%
						Meningkatnya pelayanan pengangkutan sampah			-	-	-	100%
No	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV



Meningkatkan pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, penyediaan teknologi dan informasi status lingkungan	√	√	√	√	Terbentuknya pokmas, lembaga bank sampah dan meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	103.116.750	103.116.750	103.116.750	103.116.750		
					Pelayanan kepada masyarakat, baik pasar, permukiman, dan perusahaan		Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	1.643.778.900	1.287.728.700	1.277.208.700	1.085.353.700		
					- Persentase pengangkutan sampah - Persentase pengoperasian TPA		Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk						
					- Bintek pengelolaan lingkungan bagi siswa.	Program Peningkatan Edukasi dan komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	4.500.000	66.010.000	4.500.000	130.190.000		
					- Bintek adiwiyata pembinaan 10 sekolah sebagai prasyarat adiwiyata mandiri								
					- Stimulan dalam bentuk hadiah uang								
					- Pembinaan calon sekolah adiwiyata mandiri								
					- Pembinaan adiwiyata nasional								
					- Pembinaan adiwiyata kabupaten dan provinsi								
					- Pembentukan dan pembekalan lingkungan bagi duta-duta lingkungan sekolah								
- Pelaksanaan kemah lingkungan													
Meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan bagi dunia usaha dan masyarakat					Meningkatnya kualitas lingkungan di kota sumber sebagai kota kecil	-	-	-	1 Penghargaan				
					Tersedianya data kualitas udara, air sungai, air laut dan air sumur	-	-	-	1 dokumen				
					Meningkatnya kegiatan usaha yg mentaati peraturan di bidang lingkungan hidup	-	-	-	30 Unit Kegiatan Usaha				
					Tersedianya data/alat untuk pengambilan kebijakan pengelolaan lingkungan akibat pencemaran	-	-	-	1 Kajian				
					Penurunan pencemaran melalui peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup	-	-	-	4 Unit Industri				
No	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)				
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV	
						- Buku data non fisik adipura - Sosialisasi program adipura - Masyarakat yang terlibat dalam gerakan bersih		Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura	35.925.000	4.500.000	91.653.000	4.500.000	

Meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan bagi dunia usaha dan masyarakat	√	√	√	√	- Pengujian kualitas air (5 sungai dan TPA) dan udara (5 titik) di lokasi titik pantau	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kota Sehat/Kaipura				
					- Penghargaan adipura						
					- Monitoring ke perusahaan						
					- Perusahaan yang menjadi peserta sosialisasi		27.075.000	14.925.000	16.730.000	0	
					- Penyusunan data base						
					- Penyusunan DED IPAL penanganan limbah tahu						
					- Bintek penanganan limbah tahu		53.217.000	0	143.750.000	0	
					- Bintek Produksi bersih untuk UKM.						
					- Penyusunan Inventarisasi UKM.						
					Inventarisasi home industri		500.000	82.300.000	450.000	0	
					- Penilaian dokumen lingkungan		Koordinasi Penyusunan AMDAL	8.785.000	7.205.000	54.635.000	5.855.000
					- Bintek tentang Dokumen Lingkungan dan Pelaporan pelaksanaannya						
					Kajian Daya dukung lahan Industri dikabupaten Cirebon		Pengkajian Dampak Lingkungan	625.000	341.475.000	1.825.000	2.682.000
					Kajian Perhitungan Beban Pencemar DAS		Koordinasi Pengelolaan Prokasi/ Superkasi	6.225.000	155.850.000	5.700.000	6.440.000
					- Laporan hasil pemantauan kualitas lingkungan						
					- Bintek peningkatan kapasitas masyarakat untuk kualitas lingkungan		Pemantauan Kualitas Lingkungan	4.500.000	167.148.000	22.502.000	4.500.000
					- Kegiatan usaha milik pemerintah maupun swasta yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup		Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang	1.900.000	18.140.000	2.500.000	2.337.500

						- Laporan hasil pengawasan ketaatan kegiatan usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup		Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup				
						Penyusunan Masterplan dan DED area relokasi pengusaha batu alam		Penanganan Limbah Batu Alam	0	342.851.600	402.618.400	0
Meningkatnya kualitas fungsi sumber daya alam						Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim			-	-	-	1 Kampung Iklim
						Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam			-	-	-	1 Dokumen
						Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam di pesisir pantai			-	-	-	2 Kecamatan
No	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
	Meningkatkan pengendalian dan rehabilitasi serta pengawasan fungsi sumber daya alam	√	√	√	√	- Bintek Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	35.925.000	4.500.000	91.653.000	4.500.000
- Bintek Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Kerusakan Pantai							Pantai dan Laut Lestari	27.075.000	14.925.000	16.730.000	0	
- Bintek pengelolaan sampah masyarakat pesisir												
- Gerakan bersih lingkungan pesisir												
Inventarisasi keaneka ragaman hayati tingkat kecamatan		Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	53.217.000	0	143.750.000	0						
						Kajian dampak abrasi terhadap ekosistem pesisir dan laut kecamatan mundu	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	500.000	82.300.000	450.000	0
						- Monitoring kegiatan pertambangan	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan	8.785.000	7.205.000	54.635.000	5.855.000
						- Rapat koordinasi						
						- Bintek Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Kerusakan Pantai	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	625.000	341.475.000	1.825.000	2.682.000
						- Bintek pengelolaan sampah masyarakat pesisir						
						- Gerakan bersih lingkungan						

Meningkatnya kualitas fungsi sumber daya alam						Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim	-	-	-	1 Kampung Iklim		
						Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	-	-	-	1 Dokumen		
						Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam di pesisir pantai	-	-	-	2 Kecamatan		
						Meningkatnya ekosistem pesisir laut dan tanaman mangrove di kec	-	-	-	1 Dokumen		
						Terkendalinya dampak kegiatan pertambangan rakyat	-	-	-	10 Kegiatan Usaha		
No	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
	Meningkatkan pengendalian dan rehabilitasi serta pengawasan fungsi sumber daya alam	√	√	√	√	- Bintek Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	1.000.000	950.000	26.309.400	1.137.500
						- Bintek Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Kerusakan Pantai		Pantai dan Laut Lestari	0	40.492.000	30.806.000	30.892.000
						- Bintek pengelolaan sampah masyarakat pesisir						
						- Gerakan bersih lingkungan pesisir						
						Inventarisasi keaneka ragaman hayati tingkat kecamatan		Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	0	2.845.000	49.400.000	800.000
						Kajian dampak abrasi terhadap ekosistem pesisir dan laut kecamatan mundu	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	131.125.000	1.166.000	1.775.000	740.000
						- Monitoring kegiatan pertambangan	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan	0	0	0	7.743.000
						- Rapat koordinasi						
						- Bintek Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Kerusakan Pantai	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	4.500.000	24.837.000	54.234.000	4.500.000
						- Bintek pengelolaan sampah masyarakat pesisir						
						- Gerakan bersih lingkungan pesisir						
Terselesaikannya pengaduan sengketa lingkungan						Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim	-	-	-	1 Kampung Iklim		
No	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV



	Meminimalisir terjadinya konflik dan pencemaran lingkungan	√		√	√	- Terlayannya pengaduan kasus lingkungan - Laporan hasil kegiatan - Pengujian kualitas air dan udara	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan	9.300.000	0	9.300.000	10.837.100
Meningkatnya ketersediaan RTH						persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kabupaten Cirebon			-	-	-	5 buah
						Terciptanya kawasan RTH yang asri						75%
No	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
	Meminimalisir terjadinya konflik dan pencemaran lingkungan	√	√	√	√	Adanya sosialisasi, pembinaan dan stimulasi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha ekonomi agar menyediakan RTH dan taman di lingkungan usahanya	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	0	170.000.000	0	0
						terbangunnya sarana dan prasarana penghijauan		Penataan RTH	3.192.275.500	3.048.508.108	5.992.205.500	1.092.205.500
						terpeliharanya RTH		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	305.789.400	610.290.200	440.703.400	300.493.200
Meningkatnya ketersediaan tempat pemakaman umum						Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk			-	-	-	1 Unit
No	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
	Meminimalisir terjadinya konflik dan pencemaran lingkungan			√		Terbangunnya sarana dan prasarana tempat pemakaman umum secara bertahap	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	0	0	250.000.000	0
<b>Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi sosial</b>						<b>Cakupan PMKS yang terehabilitasi</b>						
No.	AKSI/STRATEGI I	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase PMKS yang terehabilitasi		√			Keluarga miskin mempunyai ketrampilan	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya</b>	Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Keluarga Miskin		99.400.000		

			√	PRSE memiliki Uep KUBE		Bimbingan Sosial dan Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi				88.880.000
	√			Sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan pembangunan		Monitoring, evaluasi dan pelaporan		198.235.180		
	√			Terpenuhinya Data PMKS Dan PSKS Yang Akurat		Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS		600.000.000		
	√	√		Peserta dan pendamping PKH memahami PKH		Fasilitasi Pengembangan Program Keluarga Harapan		226.453.000	167.531.000	
√	√	√	√	Lancarnya distribusi Raskin		Koordinasi Fasilitasi dan Monitoring Beras Miskin (Raskin)	153041250	18163750	21438750	46063750
			√	Eks Migran memiliki Uep KUBE		Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Eks Pekerja Migran Bermasalah Sosial				71.800.000
√				Anak Jalanan Dapat Sekolah Dengan Layak	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Anak Jalanan	59.725.000			
√	√	√		Orang terlantar diperjalanan dapat melanjutkan perjalanan		Pemberian Transport bagi Orang Terlantar di Perjalanan	2.000.000	4.000.000	4.000.000	
√				Anak nakal yang memiliki KUBE		Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	344.701.500			
√	√	√	√	Berkurangnya keluarga berumah idak layak huni		Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	244.815.000	1.012.500.000	2.349.000.000	675.000.000
			√	Bertambahnya anak terlantar yang memiliki KUBE	<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>	Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar (yatim Piatu)				46.350.000
	√			Penyandang Cacat Trauma memiliki KUBE	<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat</b>	Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma		72.737.500		

			√	Penyandang Cacat memiliki Alat bantu		Bimbingan Sosial dan Pemberian Alat Bantu bagi para penyandang disabilitas				129.437.500
		√		Penyandang Cacat Eks Kronis memiliki KUBE		Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi penyandang disabilitas eks kronis			48.450.000	
	√			Terpenuhinya kebutuhan dasar		Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat	127.900.000			
	√			Eks korban penyalahgunaan Napza mendapatkan rekomendasi tindak lanjut	<b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)</b>	Unit Pelayanan Sosial Keliling bagi Korban Penyalahgunaan Napza	58.650.000			
	√			Eks korban Napza memiliki UEP KUBE		Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA		190.150.000		
		√		Gelandangan dan pengemis memiliki UEP KUBE		Bimbingan Sosial dan Keterampilan Berusaha bagi Gelandangan dan Pengemis		77.000.000		
<b>2</b>	√	√	√	Bertambahnya lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia	105.829.000	101.748.000	101.748.000	
		√		Biaya Operasional dan Pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	<b>Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo</b>	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo		208.135.000		
<b>3</b>	√			Bertambahnya karang taruna yang memiliki KUBE	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	251.573.597			
			√	Bertambahnya Orsos yang mendapatkan bantuan		Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat			24.750.000	
			√	Berambahnya pengetahuan masyarakat tentang kesetiakawanan sosial		Fasilitasi Penyuluhan Kepedulian Sosial				48.749.100

				√		Bertambahnya PSM yang memahami tupoksi		Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat			23.875.000	
		√				Realisasi rehabilitasi Taman Makam Pahlawan		Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan	500.000.000			
	<b>Persentase Pelayanan Rumah Singgah</b>	√	√	√	√	Terlayannya PMKS yang singgah		Pelayanan Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	66.428.500	171.675.700	73.585.500	74.388.500
						<b>Prersentase PMKS yang terhabilitasi</b>						<b>6,52%</b>
<b>Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi sosial</b>						<b>Persentase Pelayanan Rumah Singgah</b>						<b>100%</b>
	<b>AKSI/STRATEG I</b>	<b>JADWAL PELAKSANAAN</b>							<b>PAGU ANGGARAN (Rp)</b>			
<b>No.</b>		<b>TR. I</b>	<b>TR. II</b>	<b>TR. III</b>	<b>TR. IV</b>	<b>OUTPUT/KELUARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TR. I</b>	<b>TR. II</b>	<b>TR. III</b>	<b>TR. IV</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
1	<b>Persentase PMKS yang terehabilitasi</b>		√			Keluarga miskin mempunyai ketrampilan	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya</b>	Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Keluarga Miskin		99.400.000		
					√	PRSE memiliki Uep KUBE		Bimbingan Sosial dan Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi				88.880.000
			√			Sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan pembangunan		Monitoring, evaluasi dan pelaporan		198.235.180		
			√			Terpenuhinya Data PMKS Dan PSKS Yang Akurat		Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS		600.000.000		
			√	√		Peserta dan pendamping PKH memahami PKH		Fasilitasi Pengembangan Program Keluarga Harapan		226.453.000	167.531.000	
		√	√	√	√	Lancarnya distribusi Raskin		Koordinasi Fasilitasi dan Monitoring Beras Miskin (Raskin)	153041250	18163750	21438750	46063750
					√	Eks Migran memiliki Uep KUBE		Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Eks Pekerja Migran Bermasalah Sosial				71.800.000



		√			Anak Jalanan Dapat Sekolah Dengan Layak	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Anak Jalanan	59.725.000			
		√	√	√	Orang terlantar diperjalanan dapat melanjutkan perjalanan		Pemberian Transport bagi Orang Terlantar di Perjalanan	2.000.000	4.000.000	4.000.000	
		√			Anak nakal yang memiliki KUBE		Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	344.701.500			
		√	√	√	Berkurangnya keluarga berumah idak layak huni		Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	244.815.000	1.012.500.000	2.349.000.000	675.000.000
				√	Bertambahnya anak terlantar yang memiliki KUBE	<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>	Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar (yatim Piatu)				46.350.000
			√		Penyandang Cacat Trauma memiliki KUBE	<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat</b>	Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma		72.737.500		
				√	Penyandang Cacat memiliki Alat bantu		Bimbingan Sosial dan Pemberian Alat Bantu bagi para penyandang disabilitas				129.437.500
				√	Penyandang Cacat Eks Kronis memiliki KUBE		Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi penyandang disabilitas eks kronis			48.450.000	
		√			Terpenuhinya kebutuhan dasar		Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat	127.900.000			
		√			Eks korban penyalahgunaan Napza mendapatkan rekomendasi tindak lanjut	<b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)</b>	Unit Pelayanan Sosial Keliling bagi Korban Penyalahgunaan Napza	58.650.000			
		√			Eks korban Napza memiliki UEP KUBE		Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA		190.150.000		

2			√			Gelandangan dan pengemis memiliki UEP KUBE		Bimbingan Sosial dan Keterampilan Berusaha bagi Gelandangan dan Pengemis		77.000.000			
	<b>Persentase Pelayanan Rumah Singgah</b>	√	√	√	√	Terlayannya PMKS yang singgah		Pelayanan Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	66.428.500	171.675.700	73.585.500	74.388.500	
<b>menurutnya Penanggung Masalan Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>						<b>Cakupan PMKS yang Mendapatkan Jaminan Sosial</b>						<b>100%</b>	
No.	AKSI/STRATEG I	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)				
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Prosentase lanjut Usia yang terlindungi					Meningkatnya Kemampuan PMKS untuk hidup layak	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>						
		√	√	√		LU tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial		Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia	105.829.000	101.748.000	101.748.000		
<b>Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKA) yang berdaya</b>						<b>Cakupan PMKS yang potensial</b>						<b>100%</b>	
No.	AKSI/STRATEG I	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)				
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	<b>Jumlah PSKS yang mampu menjalankan fungsinya</b>						<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>						
			√			Biaya Operasional dan Pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	<b>Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo</b>	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo		208.135.000			
		√				Bertambahnya karang taruna yang memiliki KUBE		Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	251.573.597				
					√	Bertambahnya Orsos yang mendapatkan bantuan		Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat				24.750.000	
						√	Bertrambahnya pengetahuan masyarakat tentang kesetiakawanan sosial		Fasilitasi Penyuluhan Kepedulian Sosial				48.749.100

				√		Bertambahnya PSM yang memahami tupoksi		Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat			23.875.000	
		√				Realisasi rehabilitasi Taman Makam Pahlawan		Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan	500.000.000			
									<b>TARGET</b>			
<b>SASARAN STRATEGIS</b>						<b>INDIKATOR KINERJA</b>			<b>TR.I</b>	<b>TR.II</b>	<b>TR.III</b>	<b>TR.IV</b>
Terwujudnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						Meningkatnya kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran			25%	30%	30%	15%
<b>NO</b>	<b>AKSI/STRAT EGI</b>	<b>JADUAL PELAKSANAAN</b>				<b>OUTPUT/KELUARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp)</b>			
		<b>TR.I</b>	<b>TR.I I</b>	<b>TR.I II</b>	<b>TR.I V</b>				<b>TR.I</b>	<b>TR.II</b>	<b>TR.III</b>	<b>TR.IV</b>
1	Peningkatan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran	√	√	√	√	Tersedianya kebutuhan penerangan dan berfungsi inya alat elektronik perkantoran, komunikasi dan koordinasi serta air bersih dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 tahun	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	37,500,000	45,000,000	45,000,000	22,500,000
						tersedianya kebutuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2 dan 4 dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun dan tidak adanya tunggakan pembayaran pajak tersebut		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	1,899,999	2,279,999	2,279,999	1,139,999
						tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun		Penyediaan alat tulis kantor	6,500,000	7,800,000	7,800,000	3,900,000
						tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran		Penyediaan	6,845,200	8,214,240	8,214,240	4,107,120



2	Peningkatan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran	√	√	√	√	terpeliharanya gedung kantor secara berkala dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	23,100,000	27,720,000	27,720,000	13,860,000
						terpeliharanya kendaraan		Pemeliharaan				
						dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara berkala		rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25,641,000	30,769,200	30,769,200	15,384,600
						dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran						
						terpeliharanya peralatan		Pemeliharaan				
						gedung kantor secara berkala dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran		rutin/berkala peralatan gedung kantor	3,500,000	4,200,000	4,200,000	2,100,000
						selama 1 (satu) tahun						
									<b>TARGET</b>			
<b>SASARAN STRATEGIS</b>						<b>INDIKATOR KINERJA</b>			<b>TR.I</b>	<b>TR.II</b>	<b>TR.III</b>	<b>TR.IV</b>
Terwujudnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						Meningkatnya kedisiplinan dan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran			25%	30%	30%	15%
<b>NO</b>	<b>AKSI/STRATEGI</b>	<b>JADUAL PELAKSANAAN</b>				<b>OUTPUT/KELUARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp)</b>			
		<b>TR.I</b>	<b>TR.I I</b>	<b>TR.I II</b>	<b>TR.I V</b>				<b>TR.I</b>	<b>TR.II</b>	<b>TR.III</b>	<b>TR.IV</b>
3	Peningkatan kedisiplinan dan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran	√	√	√	√	terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi pegawai DPMD dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	2,507,500	3,009,000	3,009,000	1,504,500
									<b>TARGET</b>			
<b>SASARAN STRATEGIS</b>						<b>INDIKATOR KINERJA</b>			<b>TR.I</b>	<b>TR.II</b>	<b>TR.III</b>	<b>TR.IV</b>
Terwujudnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			25%	30%	30%	15%



NO	AKSI/STRATEGI	JADUAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
4	Peningkatan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran	√	√	√	√	tersusunnya dokumen LKPJ, LPPD dan LAKIP dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,570,000	4,284,000	4,284,000	2,142,000
						tersusunnya dokumen laporan keuangan (satu) tahun		Penyusunan laporan keuangan semesteran	2,500,000	3,000,000	3,000,000	1,500,000
						tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2,500,000	3,000,000	3,000,000	1,500,000
						tersusunnya dokumen laporan capaian program dan kegiatan triwulan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran		Penyusunan pelaporan capaian program dan kegiatan triwulan	3,621,250	4,345,500	4,345,500	2,172,750
						tersusunnya dokumen laporan tahunan dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun		Penyusunan laporan tahunan dinas	2,430,000	2,916,000	2,916,000	1,458,000
						tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun		Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas	3,014,375	3,617,250	3,617,250	1,808,625
									<b>TARGET</b>			

SASARAN STRATEGIS						INDIKATOR KINERJA			TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
Terwujudnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			25%	30%	30%	15%
NO	AKSI/STRATEGI	JADUAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR.I	TR.I I	TR.I II	TR.I V				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
5	Peningkatan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran	√	√	√	√	tersusunnya dokumen Rencana Jangka Menengah (RENJA), Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan RENSTRA dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	Penyusunan dokumen perencanaan sektoral	7,100,000	8,520,000	8,520,000	4,260,000
						tersusunnya dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun		Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD	3,650,000	4,380,000	4,380,000	2,190,000
						tersusunnya profil dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun		Penyusunan pembuatan profil dinas	2,440,000	2,928,000	2,928,000	1,464,000
<b>TARGET</b>												
SASARAN STRATEGIS						INDIKATOR KINERJA			TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
Terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan						Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan			25%	30%	30%	15%
NO	AKSI/STRATEGI	JADUAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR.I	TR.I I	TR.I II	TR.I V				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
6	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan	√	√	√	√	Terlatihnya kader dan TP.PKK	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Fasilitasi Penguatan TP. PKK	115,852,700	139,023,240	139,023,240	69,511,620
						disetiap tingkatan						
						Terbinanya Pokjanal		Fasilitasi				



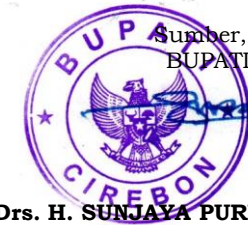
7	Peningkatan perekonomian masyarakat yang kuat melalui pengembangan potensi Badan Usaha Milik Desa dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat	√	√	√	√	Terlatihnya pengurus/pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	156,560,150	187,872,180	187,872,180	93,936,090
						Terlaksananya gelar teknologi		Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional	83,323,125	99,987,750	99,987,750	49,993,875
						tepat guna tingkat provinsi dan nasional						
						Terbinanya kelompok usaha		Pemberdayaan Usaha				
						ekonomi keluarga dan usaha sektor informal		Ekonomi Keluarga dan Usaha Sektor Informal	41,957,000	50,348,400	50,348,400	25,174,200
						Terlaksananya revitalisasi		Revitalisasi Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)	3,803,125	4,563,750	4,563,750	2,281,875
						Posyantek						
						Terlatihnya para pelaku PNPM-MPd mengenai pelestarian aset dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan program PNPM-MPd		Pelestarian Aset dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Program PNPM-MP	88,623,750	106,348,500	106,348,500	53,174,250
									<b>TARGET</b>			
<b>SASARAN STRATEGIS</b>						<b>INDIKATOR KINERJA</b>			<b>TR.I</b>	<b>TR.II</b>	<b>TR.III</b>	<b>TR.IV</b>
Terwujudnya peningkatan pembangunan desa, potensi desa, dan sumber daya desa						Meningkatnya pembangunan desa, potensi desa, dan sumber daya desa			25%	30%	30%	15%
<b>NO</b>	<b>AKSI/STRATEGI</b>	<b>JADUAL PELAKSANAAN</b>				<b>OUTPUT/KELUARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp)</b>			
		<b>TR.I</b>	<b>TR.I I</b>	<b>TR.I II</b>	<b>TR.I V</b>				<b>TR.I</b>	<b>TR.II</b>	<b>TR.III</b>	<b>TR.IV</b>
						Terlaksananya kegiatan TMMD dan BSMSS	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Fasiltasi TMMD dan BSMSS	32,925,000	39,510,000	39,510,000	19,755,000
	Peningkatan pembangunan					Terlaksananya kegiatan lomba desa Tk.Kab. dan		Penyelenggaraan Perlombaan Desa	82,500,000	99,000,000	99,000,000	49,500,000

8	desa, potensi desa, dan sumber daya desa	√	√	√	√	Tk.Prov. Terfasilitasinya							
						pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa		Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	34,137,500	40,965,000	40,965,000	20,482,500	
						Terbinanya desa/kelurahan		Peningkatan Kapasitas					
						dalam Pemanfaatan Sumber Daya Desa/Kelurahan		Pemanfaatan Sumber Daya Desa/Kelurahan	19,373,850	23,248,620	23,248,620	11,624,310	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>						<b>INDIKATOR KINERJA</b>				<b>TARGET</b>			
Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa yang bersih, ber wibawa, transparan dan akuntabel						Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa yang bersih, ber wibawa, transparan dan akuntabel				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
										25%	30%	30%	15%
NO	AKSI/STRATEGI	JADUAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)				
		TR.I	TR.I I	TR.I II	TR.I V				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV	
9	Peningkatan kapasitas aparatur	√	√	√	√		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan	51,978,750	62,374,500	62,374,500	31,187,250	
	pemerintahan desa yang bersih, ber wibawa, transparan dan akuntabel							Keuangan Desa					
						Terlatihnya aparatur desa							
						mengenai pengelolaan keuangan desa							
						terlatihnya aparatur		Pelatihan					
						pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa		Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan	64,639,000	77,566,800	77,566,800	38,783,400	
						Terevaluasinya pelaporan		Monitoring,					
						tentang fasilitasi pemilihan kuwu		Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitasi	25,611,250	30,733,500	30,733,500	15,366,750	
						tersusunnya profil desa/kelurahan		Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	23,429,125	28,114,950	28,114,950	14,057,475	



NO	AKSI/STRATEGI	JADUAL				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR.I	TR.I I	TR.I II	TR.I V				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
		√	√	√	√	terlatihnya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)		Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	29,943,750	35,932,500	35,932,500	17,966,250
						terlatihnya aparatur pemerintah desa dalam penyusunan peraturan di desa		Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Penyusunan Peraturan di Desa	25,000,000	30,000,000	30,000,000	15,000,000
						Terbinanya desa dalam penyelenggaraan pemilihan kuwu		Pembekalan Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu	35,475,000	42,570,000	42,570,000	21,285,000
						Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	35,233,781	42,280,538	42,280,538	21,140,269
						Terfasilitasinya penyelesaian masalah kedesasaan		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Kedesasaan	4,965,625	5,958,750	5,958,750	2,979,375
						Terlaksananya pengesahan dan pelantikan kuwu terpilih		Pengesahan dan Pelantikan Kuwu Terpilih	42,170,000	50,604,000	50,604,000	25,302,000
						Terevaluasinya penerapan Perbup ttg pemerintah desa		Evaluasi Perbup tentang Pemerintah Desa	11,525,000	13,830,000	13,830,000	6,915,000
								<b>TARGET</b>				
<b>SASARAN STRATEGIS</b>						<b>INDIKATOR KINERJA</b>		<b>TR.I</b>	<b>TR.II</b>	<b>TR.III</b>	<b>TR.IV</b>	
Terwujudnya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kecamatan						Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan		25%	30%	30%	15%	
NO	AKSI/STRATEGI	JADUAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR.I	TR.I I	TR.I II	TR.I V				ANGGARAN (Rp)	TR.I	TR.II	TR.III

10	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan	√	√	√	√		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan	Forum Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa bagi Fasilitator Kecamatan	18,650,000	22,380,000	22,380,000	11,190,000
						Terfasilitasinya pengelolaan						
						administrasi desa bagi fasilitator kecamatan dan pendamping desa						



Sumber, April 2017  
BUPATI CIREBON

*[Handwritten signature in blue ink]*

**Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM., M.Si**





|